

KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN

(Studi Kasus pada Masyarakat Muslim
Di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)



Dr. Ismail, M.Ag

Konflik antar kelompok masyarakat Muslim itu disebabkan oleh adanya iklim yang panas, watak dan sifat manusia yang cenderung keras, struktur sosial yang timpang, sikap keberagamaan menyimpang dan adanya prasangka. Karenanya, upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dengan cara konsiliasi atau perdamaian, mediasi atau lewat perantara, arbitrase atau melalui jalur hukum, coercion atau paksaan dan detente atau mengendorkan (melumpuhkan lawan) serta upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan dan politik.

Untuk itu, perlu dilakukan resolusi konflik antarkelompok masyarakat Muslim tersebut; kalau konflik itu menyangkut kemajemukan vertikal konflik yang timbul karena tiap-tiap kelompok atau individu yang berdasarkan pekerjaan, profesi dan tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan alternatif yang bisa dilakukan adalah kemampuan semua pihak yang berkonflik untuk saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain.

Kalau konflik itu menyangkut kemajemukan horisontal-struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan- adalah mengurangi disparitas (perbedaan) di antara dua belah pihak. Kalau hal itu menyangkut kekayaan adalah bagaimana kekayaan itu mampu didistribusikan secara merata. Sedangkan kalau menyangkut kekuasaan adalah adanya prinsip asas proporsionalitas yakni posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan masyarakat sesuai dengan posisi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.

Kalau menyangkut kurangnya saluran katarsis politik adalah bagaimana proses penyaluran aspirasi, komentar, partisipasi dan uneg-uneg masyarakat bisa dilakukan. Sebab, selama ini disinyalir adanya kekuatan besar negara di satu sisi dan ketidakberdayaan masyarakat di sisi lain menyebabkan tersumbatnya saluran katarsis. Ini menyebabkan timbulnya sistem politik yang kaku dengan tidak adanya peluang kemandirian masyarakat. Akibatnya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemerintah akan menyingkir (atau memang disingkirkan) dan mengalah (atau sengaja dikalahkan).

CV.
ELSI pro
PENERBIT



KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim
Di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)

Dr. Ismail, M.Ag.

**PENERBIT :
CV. ELSI PRO**

KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim

Di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)

Dr. Ismail, M.Ag.

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713

Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Aziza Aryati, M.Ag

Desain cover & layout : Khayatun Nufus

Percetakan : CV. ELSI PRO

Cetakan Pertama : Februari 2019

122 Halaman

ISBN 978-602-1091-85-2

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Penguasa alam semesta, dan Dzat yang telah menjadikan langit dan bumi selalu beredar di orbitnya. Kepada Dialah semua tindakan, ucapan, pemikiran penulis serahkan dan haturkan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah SAW, semoga kita memperoleh sya'faatnya di yaumil akhir. Amin.

Keberhasilan penulis dalam melakukan penelitian ini, tidak dilakukan sendirian, tetapi atas bantuan dan do'a keluarga, saudara, sahabat, dan teman. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberikan jalan dan memberikan kebaikan kepada saya. Istri tercinta, Aziza Aryati, yang dengan cinta dan kesabarannya telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penlitian. Anak-anakku tersayang, Nafilah Chaudittisreen (Fila), Najma Namirilkamila (Najma), dan Nabil Muhammad Dhiaulasith (Nabil), yang selalu memberikan spirit, menjadi obat, dan sumber kebahagiaan dalam melakukan penelitian ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Djam'annuri, M.A. selaku pembimbing dan Prof. Dr. Burhanudin Daya sebagai penilai. Dengan sabar dan ikhlas keduanya telah meluangkan waktu untuk membaca hasil penelitian dan memberikan masukan serta kritik baik secara konten maupun metodologi. Berkat bimbingannya, penelitian ini selesai dan bisa diterbitkan. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prof. Dr. H. Musa Asy'ary selaku Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyiapkan sarana, fasilitas, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk memacu pertumbuhan atmosfer

akademik di lingkungan Pascasarjana. Dengan semua fasilitas dan kebijakan-kebijakan tersebut, penulis telah terpacu untuk menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu dan bermutu. Nama-nama yang telah disebutkan, semoga amal baiknya mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Namun, penulis tetap berharap semoga karya ini dapat berguna dalam mewarnai khasanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang kajian Agama dan Filsafat (konsentrasi Hubungan Antar Agama). Akhir kalam, penulis tetap menerima dengan hati terbuka bila para pembaca yang budiman berkenan memberikan kritik konstruktif dan saran dalam rangka proses perbaikan penulisan maupun penelitian berikutnya.

Bengkulu, Februari 2019

Ismail

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

No	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
2	ب	Ba	B	be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	je
6	ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Kadan Ha
8	د	Dal	D	de
9	ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
10	ر	ra'	R	er
11	ز	Zai	Z	zet
12	س	Sin	S	es
13	ش	Syin	Sy	esdan ye
14	ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
16	ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	‘	Koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	qi
22	ك	Kaf	K	ka
23	ل	Lam	L	el
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	W	W	We
27	ه	H	h	Ha

28	ء	‘	Apostrof	Apostrof
29	ي	Y	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Saddah* ditulis Rangkap

عدّة	Ditulis	‘iddah
------	---------	--------

C. *Ta’ Marbutah*

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis sebagaimana berikut;

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

Apabila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis sebagaimana berikut;

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	fathah	a	A
-----◌-----	kasrah	i	I
-----◌-----	dammah	u	U

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
Fathah+alif	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+alif layyinah	يسعى	<i>yas ‘ā</i>
Kasrah+ya’mati	كريم	<i>Kariim</i>
Dammah+wawu mati	فروض	<i>Furuud</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ي	<i>Fathah dan ya 'mati</i>	ai	a dan i (ai)	بينكم
و	<i>Fathah dan wawu mati</i>	au	a dan u (au)	قول

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la, in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf qomariyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut pengucapannya dan penulisannya sebagaimana berikut;

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
أَهْلُ النَّدْوَةِ	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 15
A. Konsep Penelitian Agama.....	15
B. Sosiologi Agama.....	19
1. Sosiologi Agama Max Weber.....	22
2. Sosiologi Agama Emile Durkheim.....	25
3. Sosiologi Agama Joachim Wach.....	26
4. Sosiologi Agama Ibnu tihaldun.....	28
C. Teori Konflik.....	30
1. Pandangan Karl Marx Tentang Konflik.....	32
2. Pandangan George Simmel Tentang Konflik.....	39
3. Pandangan Weber Tentang Konflik.....	40
4. Pandangan Ralf Dahrendorf Tentang Konflik.....	42
5. Pandangan Lewis A. Coser Tentang Konflik.....	44
D. Teori Psikologi Agama.....	46
1. Lingkup Psikologi Agama.....	46
2. Agresi dan Kekerasan: Perspektif Psikologi.....	48
 BAB III HASIL PENELITIAN.....	 55
A. Penduduk Indramayu.....	55
B. Bentuk Konflik: Kerusakan Antar Desa di Kecamatan Sliyeg.....	66
C. Desa Rawan Konflik dan Desa Tidak Rawan Konflik.....	71
D. Akar Konflik dan Dampaknya Bagi Masyarakat.....	74
E. Upaya Penanganan Konflik.....	77

BAB IV REFLEKSI RESOLUSI KONFLIK.....	85
A. Analisis Sosiologi Agama.....	85
B. Analisis Konflik: Konflik Vertikal dan Konflik Horizontal.....	91
C. Analisis Psikologi Agama.....	97
BAB V PENUTUP.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
BIOGRAFI PENULIS.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional sekarang ini diarahkan kepada terbinanya masyarakat Indonesia seutuhnya. Acuan normative terhadap arah pembangunan ini, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia yang relevan dengan kerangka budaya dan sistem nilai yang menghargai Tuhan atau nilai-nilai ke-Tuhanan sebagai masalah yang sangat sentral. Konsep manusia Indonesia seutuhnya tersebut mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia adalah sosok mahluk Tuhan yang senantiasa berinteraksi dengan alam, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan serta keyakinan agama yang ada dan berkembang di Indonesia. Kesadaran akan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Nilai-nilai Ketuhanan itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok.

Dengan kata lain, manusia Indonesia seutuhnya itu sebagai orang yang beragama, memiliki simbol-simbol, norma dan nilai serta tingkah laku yang berbeda meskipun mereka sama-sama penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti digambarkan dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyebutkan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."¹

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Islam diakui sebagai agama universal dan kosmopolitan yang pada mulanya hanya diturunkan kepada bangsa Arab. Setelah

¹ Mursyid Ali, *Studi Kasus Keagamaan dan Kerusuhan Social, Profil Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1999-2000), h. 9-10.

penyebaran Islam, unsur-unsur domestik mewarnai universalisme ajaran Islam. Sehingga hubungan antara keduanya sering terjadi dikotomik karena sulit dipertemukan, terutama bila unsur-unsur domestik berisi nilai-nilai tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam.²

Kerukunan beragama dalam masyarakat, bukan merupakan *taken for granted* atau terjadi dengan sendirinya. Dalam aktualisasi kehidupan masyarakat tidak jarang muncul konflik-konflik sosial bernuansa agama atau menggunakan agama sebagai bensin pembakar untuk meningkatkan eskalasi konflik. Akibatnya, timbul kerusuhan-kerusuhan yang memprihatinkan dan sangat merugikan semua pihak, seperti yang terjadi di belahan pelosok Indonesia.³ Memang akhir-akhir ini tingkat kekerasan di masyarakat semakin meningkat. Persoalan perebutan akses ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, agama, suku, adat istiadat dan sebagainya. Persoalan lain (meski sulit diferifikasi), adalah adanya kecurigaan bahwa kerusuhan yang terjadi di mana-mana itu merupakan bagian dari skenario besar untuk menciptakan situasi ketidakpastian dalam masyarakat.

Terlepas dari ada tidaknya pihak-pihak yang merekayasa, namun secara psikologis, ada peluang bagi setiap individu maupun massa kolektif untuk melakukan kekerasan atau agresi. Perasaan dan emosi yang ditekan dalam waktu sekian lama, baik terjadi pada orang perorang maupun pada kelompok masyarakat, cepat atau lambat akan meletus eksplosif dalam bentuk agresi dan kekerasan.⁴ Serangkaian kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang berlangsung sedemikian brutal dan ganas, seperti terjadi di Sambas dan Sanggau Ledo (Kalimantan Barat), Ambon (Maluku), Poso dan daerah-daerah lain, sulit dikatakan sebagai tindak berdimensi

²Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, (Jakarta: Wijaya, terj. H.A. Nawawi Rambe, 1979), h. 2.

³Mursyid Ali, *Ibid*, h. 10.

⁴Franz Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h, 129.

etnis. Secara tidak langsung masyarakat telah membenarkan dengan menyebutnya sebagai kerusuhan bemuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Mencermati cara-cara pengelompokan yang berlangsung mengenai mana kawan dan mana lawan (*enemy*), agaknya sulit untuk tidak mengatakan bahwa kerusuhan tersebut adalah kerusuhan etnik dengan segala kaitan-kaitannya.⁵

Kerusuhan semacam itu pula, terjadi di wilayah Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang saat ini sering terjadi. Namun uniknya, kerusuhan itu terjadi pada kalangan sesama Muslim, bukan dengan agama lain, suku lain dan ras lain. Warga masyarakat setempat menamakannya dengan sebutan, "*kerusuhun antar desa*". Misalnya, pada tanggal 29 September 2001 terjadi kerusuhan antara desa Tugu dengan desa Gadingan. Akibat kerusuhan tersebut, rumah dibakar, pekarangan dan kebun rusak, sawah hancur, toko-toko dijarah, serta kerugian-kerugian lain yang sifatnya immaterial yang diderita oleh kedua desa yang bertikai.⁶ Karenanya, peneliti ingin mengetahui lebih jauh, apa yang terjadi pada wilayah yang mayoritas masyarakatnya Muslim tersebut. Bukankah Islam mengajarkan bahwa sesama Muslim adalah "bersaudara"?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ?
2. Apa pengaruh konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ?
3. Apa solusi alternatif dalam menyelesaikan konflik sosial keagamaan di Kecamatan sliyeg Kabupaten Indramayu.

⁵*Ibid*; h. 130.

⁶Sumber ini di ambil dari *Pikiran Rakyat*, Edisi 29 September, 2001.

C. Batasan Masalah

Agar bahasan ini menjadi fokus, perlu diberi batasan pengertian tentang "*konflik sosial keagamaan*". Konflik adalah pertentangan antara dua kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang mendorong ke arah pertentangan.⁷ Dengan pengertian ini tercakup didalamnya kasus konflik dan potensialitas konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah konflik berarti: percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan "*konflik social*" berarti: pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh.⁸ Untuk melengkapi pengertian yang memadai, ditampilkan pula pengertian kasus keagamaan. Menurut Sujangi dan Abdul Aziz, "*kasus keagamaan*" diartikan sebagai suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan sejumlah orang secara kolektif dan melibatkan penggunaan ajaran agama atau simbol keagamaan, di dalam proses sosial tertentu, yang menimbulkan tantangan (*challenge*) bagi ajaran agama atau simbol keagamaan yang telah ada sebelumnya.

Meminjam istilah Sartono Kartodirjo,⁹ gerakan protes itu mengambil corak letupan-letupan yang terpisah-pisah dan berbasis lokal, dengan kepemimpinan dan kelembagaan yang bersifat spontan. Sedangkan gerakan keagamaan mengambil bentuk tindakan terencana (jangka pendek hingga jangka panjang) yang

⁷Rumusan tersebut berbeda dengan Coser yang mengatakan bahwa dorongan untuk menyerang atau dorongan rasa permusuhan tidaklah cukup untuk menimbulkan Konflik Sosial. Konflik sosial hanya dapat terjadi dalam interaksi antara subyek dan obyek. Rumusan tersebut juga memperlihatkan batasan bahwa yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah konflik antar kelompok (dalam hal ini konflik antara kelompok intern umat Islam). Dengan meminjam istilah Dahrendorf, yang dibahas dalam penelitian ini adalah, *exogenous conflicts* bukan *endogenous conflict*. Lihat Dahrendorf, Ralf, dalam *Toward a Theory of Social Conflict*, (Stanford University Press, 1959), h. 101.

⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 518.

⁹Sartono Kartodirjo, *Protest Movement in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, second impression, 1978), h. 1.

digerakkan oleh para pemimpin, memiliki simbol-simbol yang dijadikan sebagai keyakinan umum oleh para pengikut serta pengaturan kelembagaan yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan tindakan terencana tersebut.¹⁰ Dengan demikian, pengertian *konflik sosial keagamaan* dalam penelitian ini yaitu pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dan menimbulkan tantangan bagi ajaran agama atau simbol keagamaan yang telah ada sebelumnya (misalnya pengaruh simbol-simbol organisasi atau partai politik yang berbasis keagamaan). Dengan kata lain kasus sosial keagamaan ini, merupakan suatu gerakan protes (*protest movement*) yang dapat digolongkan ke dalam *social movement*.

Ada konflik pasti ada integrasi. Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah protes atau potensialitas yang mendorong ke arah di mana komponen-komponen dua kelompok sosial atau lebih menjadi terpadu sehingga memberikan kebersamaan dan kesatuan antara kelompok-kelompok yang ada. Dengan pengertian ini tercakup didalamnya kasus integrasi dan potensialitas integrasi.¹¹

¹⁰ Abdul Aziz, *Kehidupan Beragama dan Kelompok Keagamaan di Kampus Universitas*

Indonesia Jakarta, (Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1994), h. 7-9.

¹¹ Dengan batasan tersebut integrasi dalam pengertian ini lebih merupakan gabungan dari akomodasi, kooperasi, dan asimilasi. *Akomodasi* adalah penyesuaian sementara dari perbedaan antara dua kelompok yang saling bermusuhan untuk meredakan konflik. Masing-masing menjaga sikap permusuhannya dan berubah tingkah lakunya untuk tidak meneruskan pertentangannya. *Koperasi* adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, biasanya diiringi dengan pembagian kerja. *Asimilasi* adalah proses dimana dua kelompok atau lebih yang mempunyai pola sikap yang berbeda secara berlahan-lahan membentuk satu pola sikap baru yang bersumber dari sikap masing-masing kelompok. Untuk keperluan penjelasan konsepsional analitis, integrasi sosial perlu dibedakan dari institusionalisasi dan segmentasi yang berarti kegiatan sub-unit untuk meluaskan diri dengan tetap teroantung kepada keseluruhan organisasi.

Agar penelitian tidak melebar, perlu diberi batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dengan mengambil beberapa desa yang relevan dengan pembahasan ini.
2. Penelitian ini mengangkat persoalan Konflik Sosial Keagamaan pada masyarakat Muslim (kerusuhan massal antar desa) yang terjadi di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
3. Penelitian ini berbentuk *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama dan pendekatan historis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mencari latar belakang konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui akibat konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
3. Mencari jalan keluar (*problem solving*) atas konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,

Di samping tujuan di atas, juga dimaksudkan untuk menambah khazanah intelektual, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan ilmu keagamaan. Hasil penelitian ini juga, diharapkan dapat berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui obyek tersebut dan juga bagi yang ingin mengembangkan penelitian mengenai konflik sosial keagamaan lebih lanjut.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Sosiologi Agama

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial.¹² Plato misalnya, membandingkan tiga

¹²Thomas F.O'dea, *The Sociology of Religion*, tim penterjemah Yasogama,

kelas sosial; yakni penguasa, militer dan kaum pekerja tangan, masing-masing menggunakan daya pikir, perasaan atau semangat dan nafsu.¹³

Cara menganalogikan masyarakat dengan organisme geologis berkembang subur pada masa sebelum Auguste Comte. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pendekatan organismik muncul pada awal pertumbuhan sejarah sosiologi. Perwujudan yang paling penting dari pendekatan tersebut tergambar dalam usaha menjelaskan hubungan antara konsep "struktur dan fungsi", yang sudah muncul dalam pemikiran Herbert Spencer dan Emile Durkheim serta di perjelas oleh pemikiran antropologi Inggris, seperti Bronislaw Malinewski dan Redcliffe Brown. Pendekatan tersebut akhirnya mencapai perkembangannya yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, khususnya pemikiran Talcott Parsons dan pengikutnya. Pendekatan itulah yang sekarang dikenal dengan pendekatan *fungsiionalisme struktural*.¹⁴

Fungsionalisme Durkheim mengacu kepada unsur-unsur solidaritas masyarakat. Ia mencari prinsip yang mempertalikan anggota masyarakat. Durkheim menyatakan agama harus mempunyai fungsi. Agama bukan *ilusi*, tetapi merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. Semua konsep dasar yang dihubungkan dengan agama seperti dewa, jiwa, nafas dan tote berasal dari pengalaman manusia terhadap keagungan golongan sosial. Prinsip ini ditemukan Durkheim pada waktu ia mempelajari masyarakat Aborigin Australia.¹⁵

Sosiologi Agama Suatu Pengenal Awal, (Yogyakarta: Rajawali, 1985), h.1 .

¹³Charles A. Eliwood, *History of Social Philosophy*, (New York: Prentice-Hall, 1938), h.33.

¹⁴Alex Inkeles, *Ulhal is Sociology: An Introduction on the Discipliar and Profession*, "Foundation of Modern Sociology Series", (New jersey: Prentice Hall. Inc, Englewood Cliffs, 1964), h. 34.

¹⁵Emile Durkheim, *The Elementan- Form of Feligiuos Life*, terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Joseph Ward Swain, (New York: The Free Press, 1965), dalam Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat Pendekaant Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 31 .

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis ini digunakan untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan masa lampau, data masa lalu itu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu sama lainnya.¹⁶ Data yang dikumpulkan dalam pendekatan historis ini berasal dari sumber primer, antara lain dokumen, peninggalan langsung dari peristiwa, catatan saksi mata dan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel dan ensiklopedia.¹⁷ Pendekatan histories ini diharapkan dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa kerusuhan masa lampau untuk dijadikan acuan dalam menjelaskan kerusuhan-kerusuhan masa kini.

3. Metode Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini berbentuk studi kasus (*cuse study*) dan bersifat mencari penjelasan tentang sebab-sebab yang mendorong terjadinya konflik dan integrasi sosial di Kecamatan Sliyeg, setelah terlebih dahulu mengungkapkan secara deskriptif kenyataan konflik dan integrasi di daerah tersebut.¹⁸

Berdasarkan masalah yang hendak di kaji dengan menghendaki jawaban yang bersifat *deskriptif* dan *eksplanatif*, maka penelitian ini dapat digolongkan model penelitian *kualitatif*. Bogdan dan Taylor, mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998), h.79.

¹⁷ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendekatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 81.

¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang hanya bersifat deskriptif atau bersifat menjelajah dan berbeda pula dengan penelitian yang bersifat menguji hipotesis atau teori (*verivikatory*) yang sering juga dikelompokkan sebagai salah satu bentuk dari riset eksplanatoris (*explanatory reseach*). Lihat Mely G. Tan "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam huntjaraningrat, *Model Penelitian Masyarakat*, edisi ketiga. 1997, h. 34.

yang dapat diamati.¹⁹ Model penelitian ini juga dianggap lebih peka dan mampu menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta itu pada tahap awal tertuju pada usaha mengemukakan gejala secara lengkap pada aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya. Pada tahap ini metode deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Pada tahap berikutnya metode ini harus di beri bobot yang lebih tinggi, karena sulit untuk dibantah bahwa hasil penelitian yang sekedar mendeskripsikan fakta tidak hanya artinya saja. Untuk itu pemikiran dalam metode ini perlu dikembangkan dengan penafsiran yang adequate terhadap fakta yang ditemukan. Dengan kata lain tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data saja; tetapi juga analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itu penelitian ini dapat diwujudkan sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan hubungan antar gejala yang ditemukan dan lain-lain. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah melakukan representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.

¹⁹ Robert C. Bogdan & Steven Taylor, *Introducion to kualitatif Reseach Methods* (New Jersey: John Willey and Sons, 1984), h. 4.

²⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 4.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang adequate.²¹

Adapun tahapan kerja metode deskriptif adalah sebagai berikut:

1. *Tahapan Heuristik* atau pengumpulan data. Tahapan heuristik adalah kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber informasi. Pada saat pengumpulan data ini penulis berusaha mengadakan observasi, wawancara dan riset kepustakaan.
 - a. *Observasi*, hal ini dilakukan untuk melihat dunia sebagai yang di lihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada saat itu. Observasi juga memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber data.²²
 - b. *Wawancara*, yakni wawancara tak struktur yang menekankan pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran kembali, pendekatan baru atau pandangan ahli. Jenis wawancara ini, biasanya responden terdiri atas mereka yang terpilih karena memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, serta lebih mengetahui informasi yang diperlukan.²³
 - c. *Riset Kepustakaan*, ini dimaksudkan untuk melengkapi

²¹ Hadari Nawawi, *Metode ...* h. 63-64.

²² Lexy Moleong, *Ibid*, h. 126.

²³ *Ibid*, h. 139.

materi penelitian. Sumber yang diperoleh yaitu dari buku, majalah, surat kabar, atau sarana lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik itu primer atau sekunder.

2. *Tahapan Kritik*. Sumber yang ditemukan pada tahapan heuristik harus diuji terlebih dahulu. Pengujian ini dilakukan melalui kritik atau analisis. Kritik sumber ditujukan pada dua aspek yaitu intern dan ekstern. Kritik ekstern menguji masalah otensitas sumber, sedang kritik intern mempermasalahkan kredibilitas sumber, dalam arti apakah kesaksian yang diberikan sumber itu bisa dipercaya atau tidak.
3. *Tahapan Interpretasi*. Sumber informasi diuji dalam tahap kritik hingga menghasilkan apa yang disebut fakta. Fakta kemudian disusun dalam kerangka logis dan harmonis hingga menjadi kesatuan yang utuh, tahap ini disebut sebagai proses sintesis atau interpretasi.
4. *Tahapun Penulisan*. Pada tahap ini hasil interpretasi di tulis dalam bentuk yang sistematis, selaras dan harmonis. Menurut Louis Gotschalk dalam setiap penelitian sejarah fakta-fakta harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan ditempatkan dalam satu urutan kausal. Masing-masing diantara proses itu memiliki kompilasikoinpilasi tersendiri.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Menurut hemat penulis, belum ada orang yang meneliti Konflik Sosial Keagamaan di kecaatan Sliyeg Kabupaten Indramayu", baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Kendati demikian ada tulisan yang membahas mengenai konflik misalnya dalam bentuk artikel dan tulisan kolom dalam surat kabar. Buku--

²⁴ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto Pent., (Jakarta: UI Press, 1995), h. 144.

buku yang membahas persoalan konflik itu antar lain:

(1) Robby I. Chandra menulis *Konflik dalam Hidup Sehari-Hari*. Buku itu diterbitkan oleh Kanisius Yogyakarta tahun 1992 membahas tentang konflik dalam kehidupan sehari-hari dan cara mengintegrasikannya dari sudut pandang teori.

(2) Franz Magnis Suseno mengantarkan sebuah buku *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* diterbitkan oleh Pustaka pelajar Offset Yogyakarta, tahun 2000. Dalam buku itu terkumpul sejumlah ahli dalam bidang ilmu sosial, keagamaan, psikologi, politik maupun ahli sejarah. Mereka berusaha -dengan keahliannya- melawan kekerasan dengan tanpa menggunakan kekerasan.

(3) Susetiawan menulis buku *Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, perusahaan dan Negara di Indonesia*, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Offset Yogyakarta tahun 2000.

(4) Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto menulis *Atusi Konflik lanis*, diterbitkan oleh Global Pustaka Utama bekerja sama dengan Gharba dan UPN Veteran Yogyakarta. Buku itu memuat teori-teori konflik yang dikemukakan oleh para tokoh misalnya; Dahrendorf, Simmel, Weber, Karl Marx dan lain-lain. Begitu pula.

(5) Ralf Dahrendorf menulis *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford University Press, tahun 1959. Buku itu membicarakan konflik yang terjadi di masyarakat industri dengan menggunakan teori konflik serta buku-buku lain yang tidak bisa disebutkan di sini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu berupa pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori menjelaskan tentang konsep penelitian agama, penelitian agama dengan pendekatan sosiologis, sosiologi agama, teori konflik dan teori psikologi agama.

Bab tiga hasil penelitian. Bab ini menjelaskan tentang penduduk Indramayu, bentuk konflik: kerusuhan antar desa, desa rawan konflik dan desa tidak rawan konflik, akar konflik dan dampaknya bagi masyarakat serta upaya penanganan konflik.

Bab empat berupa refleksi resolusi konflik dengan menggunakan analisis sosiologi agama, analisis konflik: konflik vertikal dan konflik horizontal serta analisis psikologi agama.

Bab lima penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Penelitian Agama

Konsep penelitian agama bisa menimbulkan beberapa pengertian. *Pertama*, penelitian agama berarti mencari agama atau mencari kembali kebenaran suatu agama atau dalam rangka menemukan agama yang dianggap paling benar. Dalam pengertian ini; penelitian agama berarti mencari kebenaran substansi agama sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, pendiri, atau pembaru suatu agama. Pengembalaan intelektual Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan yang bukan buatan manusia (berhala) atau Tuhan rekaan manusia (benda yang di Tuhankan), Pencarian kebenaran oleh Budha Gautama dan pencarian hadis yang benar oleh para ahli hadis adalah bagian dari upaya manusia mencari agama yang benar. Pengertian ini bisa dipersoalkan karena dalam perspektif agama Samawi, agama itu bukan hasil penelitian manusia, melainkan *given* dari Tuhan melalui wahyu yang diterima dari para rasul-Nya. Persoalan berikutnya adalah siapakah yang menentukan kebenaran suatu agama? Bukankah agama itu sendiri adalah suatu Kebenaran? Bukankah meneliti itu terdorong oleh hasrat yang normatif padahal agama-agama adalah sumber segala norma? Dengan berbagai pertanyaan ini, dan mungkin alasan-alasan lainnya, sebagian ulama atau tokoh agama menolak gagasan penelitian agama. Bagi mereka agama adalah realits sosial yang final, tidak perlu dipersoalkan lagi. Agama bagi mereka bukan untuk diteliti melainkan untuk dipelajari, diambil *barokahnya* (tabarrukan) dan hikmahnya, kemudian diamalkan dan dipertahankan.

Kedua, penelitian agama berarti metode untuk mencari kebenaran agama atau usaha untuk menemukan dan memahami kebenaran agama sebagai realitas empiris serta bagaimana penyikapan terhadap realitas tersebut. Di sini agama sebagai

subject matter sebagai fenomena yang riil, betapapun mungkin terasa agama itu abstrak metode studi al-Qur'an (*dirasah Al-Qur'an*), metode studi hadis (*dirasah al-hadis*), metode studi fiqh (*ushul, fiqh*), filsafat agama, sejarah agama, perbandingan agama dan sebagainya. Dengan kata lain, metodologi penelitian agama dalam pengertian kedua ini adalah metode studi agama sebagai doktrin yang melahirkan ilmu-ilmu keagamaan (*religionwissenschaft*).

Penelitian agama sebagai doktrin berfokus pada substansi ajaran agama yang didasari oleh keyakinan atas kebenaran agama itu sendiri. Sebab, sebuah realitas sosial dianggap sebagai non-norma suci yang mengikat perilaku apabila norma itu disakralkan dan diyakini dari Tuhan. Apakah substansi dari keyakinan religius itu? Apakah pemikiran agama telah mendekati *ide moral* atau semangat agama itu sendiri? Bagaimana dialektika teks kitab suci dengan konteks? Apakah yang dilakukan oleh para *mujtahid* dan pemikir dalam upaya mencari kebenaran dan semangat suatu agama adalah maksud dalam pengertian ini ?

Ketiga, penelitian agama berarti meneliti fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama dan penyikapan masyarakat terhadap agama. Yang pertama adalah fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama berupa struktur sosial, pranata sosial, dan dinamika masyarakat.²⁵ Agama yang mengandung aspek intelektual, spiritual, mistikal, dan institusional menurut Abdullah; adalah landasan terbentuknya suatu "masyarakat kognitif. Artinya, agama merupakan awal terbentuknya suatu komunitas antara kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama, yang memungkinkan berlakunya suatu patokan pengetahuan yang sama pula. Organisasi-organisasi keagamaan pada mulanya terbentuk dan pemukiman keagamaan yang sama, organisasi tarekat terbentuk dari ikatan spiritual yang sama, Ikatan

²⁵ Imam Suprayogo dan Tabrani. *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, -001), h. 15-16.

Persaudaraan Haji di bentuk dan ikatan ritual yang sama. Sebagai komunitas, "masyarakat kognitif memiliki simbol-simbol, tatanan struktural, doktrin, bagaimana sosialisasi dan perwujudannya, serta dinamika kesejarahannya.

Yang kedua, penyikapan masyarakat terhadap agama seperti pola pemahaman, *stereotype*, komitmen dan tingkat keberagamaan serta perilaku sosial sebagai manifestasi keyakinan doktrin agama. Pola pemahaman agama seperti ini akan muncul skripturalisme, fundamentalis, modernisme, dan tradisionalisme. Dari *stereotype* dan tingkat keberagamaan, muncul varian abangan-santri, Islam kultural-Islam polotok. Dan perilaku sosial sebagai manifestasi keyakinan doktrin agama, muncul perilaku politik. Ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.²⁶

Sebagai usaha akademis, penelitian agama mensyaratkan obyek, metode, dan sistematika yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu, konsep Penelitian agama tidak bermaksud menemukan agama baru, agama yang "benar" atau kebenaran suatu agama, karena itu bukan tugas metodologi penelitian agama, melainkan filsafat agama. Dengan demikian, pengertian pertama, yang obyeknya tidak bersifat empiris, dan penelitian agama dan penelitian agama tidak termasuk dalam pembahasan ini. Penelitian agama yang dimaksud adalah pengkajian akademis terhadap agama sebagai realitas sosial, baik berupa teks, pranata sosial maupun perilaku sosial yang lahir atau sebagai perwujudan kepercayaan suci. Dengan kata lain, Penelitian agama adalah pengkajian akademis terhadap ajaran dan keberagamaan (*religiosity*).²⁷

Sementara menurut Abdullah dan Karim, yang dimaksud dengan ajaran adalah teks (lisan atau tulisan) yang sakral yang menjadi sumber rujukan, sedangkan keberagamaan adalah perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada

²⁶ Abdullah dan T. Karim, M.R (ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. XIV.

²⁷ Imam Suprayogo dan Tabrani, *Melodologi..* h. 17.

nash.²⁸ Fakta membuktikan bahwa agama merupakan kebutuhan asasi manusia. Karena itu masalah keagamaan adalah masalah yang senantiasa menyertai kehidupan umat manusia sepanjang sejarahnya, sebagaimana masalah sosial lainnya. seperti masalah ekonomi dan politik. Keberagamaan menjadi bagian dari kebudayaan yang terus dikembangkan sedemikian rupa, baik berupa ritus, pranata sosial maupun perilaku dalam berbagai dimensinya.

Ilmu pengetahuan sosial dengan berbagai paradigma dan metode, dikembangkan dalam rangka mengkaji perilaku manusia, tak terkecuali perilaku dalam beragama. Karena itu, sebuah penelitian dikatakan sebagai penelitian agama atau penelitian sosial di dasarkan pada obyek yang dikaji, bukan karena metodologinya. Obyek studilah yang menentukan metode, bukan sebaliknya. Misalnya, perilaku poligami masyarakat nelayan di katakan sebagai penelitian agama ketika dihubungkan dengan keberagamaannya, tetapi dikatakan sebagai penelitian sosial (biasa) apabila dihubungkan dengan misalnya kondisi ekonomi atau pranata sosial.²⁹ Begitu pula penelitian masalah konflik yang sekarang sedang marak terjadi di pelosok tanah air Indonesia, baik antar agama, antar suku, antar etnis, maupun antar desa. Salah satunya adalah mengkaji persoalan "Konflik Sosial-Keagamaan Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa barat. Di sini jelas, obyek atau sasarannya adalah masyarakat Muslim dan konflik itu terjadi antar sesama Muslim. Untuk lebih jelas lagi bahwa konflik itu berupa konflik intern sesama agama yaitu Islam.

Persoalan konflik intern sesama agama yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, perlu dikaji secara mendalam untuk dicarikan solusi atau jalan keluar supaya tidak terjadi peristiwa serupa. Karenanya, tesis ini merupakan

²⁸ Abdullah dan T.Karim, *Melodologi Penelitian Agama.....h.* 93.

²⁹ *Ibid*, h. 18.

upaya akademis untuk menelusuri mengapa peristiwa itu kerap kali terjadi dan bagaimana upaya pemecahannya. Upaya untuk mencari akar-akar konflik dan solusinya, penulis menggunakan beberapa pendekatan; yaitu pendekatan Sosiologi Agama dan pendekatan historis.

B. Sosiologi Agama

Definisi Sosiologi secara luas adalah ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut *macro sociology*³⁰, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial, dan pergaulannya terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi di definisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial di tinjau dari kecenderungannya individu dengan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi. Pendiri sosiologi adalah Auguste Comte³¹, catatan mengenai istilah *sociologi* terdapat banyak di dalam karangannya; *course de Philosophie Positive* (1830/1842) dan dalam *Systeme de Politique Positive au Traite de Sociologie* (1851/1854). Karangannya yang lain, *Prospectus da Travaur Necessaire Pour Organiser La Siciele* (1882). Comte melalui ketiga buku itu menjelaskan perkembangan dunia melalui tiga fase.³² Dalam *Course de Philosophie Positive* terdapat istilah *soisologi*: Sosiologi yang merupakan mahkota dari ilmu-ilmu.

³⁰ Istilah "micro dan macro" pada mulanya dipergunakan dalam ilmu ekonomi sehingga dikenal antara dua tipe analisis, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro; Maurice Duverger, *An Introduction to the Social Sciences; With Special Reference to Their Methods*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm Anderson, (New York: Frederick A. Praeger, Publisher, 1964.), h. 44.

³¹ Auguste Comte lahir di Montpellier pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal di Paris pada tanggal 5 September 1857.

³² Comte's theoretical formulations, as well as the voluminous historical reference adduced to illustrate them, focus on one theory of which he pinned the label "*The Law of Three Stages*", and which asserts that civilizations as a whole, as well as the various provinces of knowledge and belief which make it up, regularly developed through three stages; the theological, the metaphysical and the positive-that is scientific", demikian Stavislav Andraeski menyebutkan dalam *The Assertrial Comte*, (New York: Barnes & Noble Books, 1974), h. 12.

Ide-ide yang dikembangkan oleh Comte dalam filsafat dan politik juga dipakai di bidang sosiologi: Comte mendefinisikan positif sama dengan atau sebagai realitas fakta atau gejala. Comte menekankan seorang ahli filsafat harus berpijak pada gejala-gejala atau realitas, itulah yang disebut pendekatan ilmiah empiris. Begitu juga Comte membedakan antara fakta dan pernyataan nilai, kenapa menolak pernyataan nilai? Menurut Comte suatu nilai tidak pernah dapat dibuktikan. Ia menuntut bahwa sosiologi perlu bebas dari pernyataan-pernyataan nilai.³³ Comte memformulasikan bahwa tujuan sosiologi itu sama dengan tujuan ilmu pengetahuan alam yaitu memformulasikan generalisasi yang merupakan rangkaian hukum sebab - akibat.

Auguste Comte sangat berpengaruh terhadap dua sarjana yang dianggap pendiri Sosiologi Agama, yaitu Emile Durkheim (1858-1917 M)³⁴ dan Max Weber (1864-1920 M)³⁵

Sosiologi agama dirumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara manusia. Anggapan para sosiolog bahwa dorongan, gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial. Jadi, seorang sosiolog agama bertugas menyelidiki bagaimana tata

³³ Pertimbangan-pertimbangan nilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan dibahas antara lain dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*. Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Daniel Dhakidae, (Jakarta : cv. Rajawali, 1998) h.13-15.

³⁴ Emile Durkheim lahir di Epinde pada tahun 1858. Ia belajar filsafat pada Universitas Paris Pada tahun 1902 menjadi guru besar di Universitas Sorbone. Karangannya tentang agama; *Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse, Le System Totemique en Australie*. Paris tahun 1912 Di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Joseph Ward Swain menjadi *The Elementary Form of the Religious Life*, 1915. Tertera pada halaman 62 terjemahan Inggris itu ada definisi tentang agama yaitu "A religion is a unified system of believe and practices relative to sacred thing that is to say, things set apart forbidden beliefs and practices with unite one single moral community called a Church, all those who adhere to them".

³⁵ Max Weber, *The Sociology of Religion*, Trans. Ephraim Fischhoff, into by Talcott Parsons, Boston Beacon Press, 1963), h, 275-279.

cara masyarakat, kebudayaan dan pribadi-pribadi mempengaruhi agama sebagaimana agama itu sendiri mempengaruhi mereka. Kelompok-kelompok yang berpengaruh terhadap agama, fungsi-fungsi ibadah untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata duniawi, interaksi langsung dan tidak langsung antara sistem-sistem religius dan masyarakat dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam katagori bidang penelitian sosiologi agama.

Sosiologi agama mempelajari aspek sosial agama. Obyek penelitian agama dengan pendekatan sosiologi menurut Keith A. Robert memfokuskan pada: 1) kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan (meliputi pembentukannya; kegiatan demi kelangsungan hidupnya, pemeliharannya dan pembubarannya); 2) perilaku-perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut (proses sosial yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual); 3) konflik antarkelompok. Yang dimaksud dengan kelompok dan lembaga keagamaan adalah pranatapanrata sosial yang menjadi infrastruktur tegaknya agama dalam masyarakat, yang meliputi organisasi keagamaan (ulama, kiai, pendeta), pengikut suatu agama (jamaah, warga), upacara-upacara keagamaan (ritus, ibadah, kebaktian, doa), sarana peribadatan (masjid, gereja, pura) dan proses sosialisasi doktrin-doktrin agama (sekolah, pesantren, masjid, gereja).

Sedangkan kajian mengenai perilaku meliputi: 1) perilaku individu dalam hubugannya dengan keyakinan yang dianut seperti pengalaman keagamaan; 2) perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok; 3) perilaku individu dalam hubungannya dengan pemimpin; 4) perilaku kelompok atau jamaah dalam hubungannya dengan sistem simbol atau doktrin keagamaan tertentu; 5) perilaku kelompok dalam hubungannya dengan pemimpin; 6) stratifikasi sosial; 7) perilaku pemimpin atau elit agama dalam hubungannya dengan sistem simbol atau doktrin keagamaan; 8) perilaku elit agama dalam hubungannya dengan stratifikasi sosial.

Adapun konflik antarkelompok keagamaan meliputi konfli

intern umat beragama , konflik antar kelompok umat beragama, hubungan (konflik, kerjasama dan kompetisi) masyarakat beragama dengan penguasa (agama negara versus agama sipil).³⁶ Penelitian tentang salah satu atau beberapa hal tersebut di atas dikatakan sebagai penelitian agama (keberagamaan) dengan perspektif sosiologis, yang sekaligus juga termasuk ke dalam wilayah kajian disiplin sosiologi agama. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad Hatta, bahwasanya sosiologi agama itu penting di pelajari di perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), agar mengenal masyarakat sedalam-dalamnya, supaya masyarakat itu bisa dipimpin, maka perlu sosiologi.³⁷

Agama dan masyarakat merupakan suatu *organisme sosial* yang merupakan suatu keutuhan karena terdapat hubungan-hubungan permanen antara satu dengan lainnya. Masyarakat sebagai suatu organisme sosial mempunyai 2i hukum hidupnya sendiri. Oleh karena itu, yang hendak memberi pimpinan hidup hendaklah yang tahu tentang hukum hidup masyarakat dengan berdasarkan pengetahuan tentang masyarakat.³⁸

1. Sosiologi Agama Max Weber

Max Weber pada awal pembahasannya mengenai Sosiologi Agama dalam *wirtschaft und gesellschaft*, mengambil sikap bahwa definisi agama jikapun mungkin dilakukan, hanya bisa diperoleh pada akhir, bukan pada penulaan, suatu tugas yang telah ditetapkan bagi dirinya sendiri. Tidak mengherankan dia tidak pernah sampai pada akhir seperti yang dikehendaki, akan tetapi secara *de facto* Weber mengikuti definisi dari lingkup agama yang

³⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitiann Sosial-Agama.... h. 61.*

³⁷ Muhammad Hatta, Ketua Perencana Sekolah Tinggi Islam (April, 1945) melalui memorendumnya, ia mengatakan: "dalam lingkungan Sekolah Tinggi Islam bisa diselenggarakan didikan agama yang berdasarkan pengetahuan tentang filsafat, sejarah dan sosiologi".

³⁸ Syamsuddin Abdullam, *Agama dan Masyarakat.... h. 4.*

berlaku dalam *Religionswissenschaft* saat itu.³⁹

Weber mempelajari penyelidikan antara soal-soal sosial dan pengaruh berbagai agama. Okok pikiran Weber, bahwa agama Kristen Barat sebagai suatu keseluruhan dan teristimewa beberapa sekte tertentu yang tumbuh dan muncul sebagai akibat reformasi, telah banyak membantu terbentuknya keadaan jixN-a perekonomian (*Wirts Chufigesinnung*) yang memungkinkan terjadinya kapitalisme modern. Dengan singlat kita dapat kita katakan bahwa pusat perhatian Max Weber adalah dalam dua hal; yaitu agama dapat mempengaruhi pandangan hidup manusia terhadap masyarakat dan perubahan ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi agama. Weber sendiri lebih cenderung pada aspek yang pertama, meskipun aspek kedua disinggunginya walaupun sepiantas lalu. Dalil Weber itu perlu mendapat tambahan karena dalam hal-hal yang pokok tidak seluruhnya diuraikan secara detail. Dalil-dalil itu terlalu banyak bersendi kepada tulisan di Inggris dan Amerika, yang dalam isinya kadang-kadang menyimpang dari dari fikiran sosial Calvin. Bahwa Calvinisme yang paling tua, seperti halnya Lutheranisme, juga memiliki gelagat-gelagat anti kapitalisme juga telah di buktikan oleh E. Beins yang mengadakan penyelidikan jiwa perekonomian Calvinis di negeri Belanda Utara dari tahun 1565-1650 M).⁴⁰

- Tipe Ideal Max Weber

Istilah ini menunjukka pada suatu "construct", yaitu perumusan tentang hakikat gejala-gejala atau realistik fenomena-fenomena. Istilah "ideal" sama sekali tidak ada hubungannya dengan penilaian suatu gejala. Dalam mengadakan suatu analisa orang boleh saja membuat suatu "construct" tentang polarisasi "abangan" dan "santri". Polarisasi ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa "abangan" atau "santri" adalah "uswah

³⁹ Peter L. Berger, *"The Sacred Canopy"*, terjemahan Hartono, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 204.

⁴⁰ P.J. Bouman, *Sosiologi Pengertian-Pengertian dan Masalah-Masalah*, terjemahan Suaito Sujitno, (Yogyakarta: Kanisius, 1974), h. 128-130.

hasanah" (*suri tauladan, pen*) atau sesuatu yang harus diikuti sebagai *way of life* yang ideal.⁴¹

Menurut Weber, penelitian mengenai berbagai gejala agama dan kebudayaan serta memasukannya kedalam tipe-tipe ideal sangat erat hubungannya dengan metode komparatif. Metode ini berarti dalam dua himpunan gejala dapat di bandingkan dengan ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perumusan gejala-gejala yang sama itu berarti kita menggunakan konsep-konsep yang umum. Di samping mengadakan tipologi agama-agama dunia ke dalam ascetism dan mysticism (*Typology of Asceticism and Mysticism*), Weber juga menggunakan tipologi dalam menganalisis paham kapitalisme ke dalam "Gooty Capitalism" ; memperoleh kekayaan secara spekulasi dan tipuan, "Traditional Capitalism"; kegiatan ekonomi kuno yang tidak memiliki etos mencari keuntungan dan yang terakhir "Rasional Capitalism".⁴² Dengan ini berarti Max weber mempunyai perumusan yang berwilayah sangat luas.

- Konsep Rasionalisasi Max Weber

Pada esensinya sosiologi agama Weber bercirikan *racionalisasi* yang progresif khas masyarakat Barat. Artinya; *pertama*, sistematisasi yang mungkin tumbuh dari ide-ide dan konsep-konsep keagamaan. Contoh, dulu di Eropa segala macam dewa untuk segala benda. Sistematisasi sekarang: wurateis. *Kedua*, pertumbuhan rasionalitas yang etis dan kemunduran yang progressif dari unsur-unsur magis. *Ketiga*, Weber adalah seorang pemikir evolusionis, karena ia memberikan perhatian kepada hancurnya kebudayaan Eropa yang tradisional, kemudian munculnya sains modern dan kapitalisme modern yang berhubungan dengan industri kemudian makin tumbuhnya birokrasi yang

⁴¹ H.H. Gerth and C. Wright Mills, (Ed), from Max Weber; *Essay in Sosciology*, trans and into. By H.H. Gerth and C. Wright Mills, (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1952), h. 5960.

⁴² Brian Morris, *Anthropological Studies of Religion : An Ifrtroductory Text*, (New York: Cambridge University Press, 1987), h. 62.

mengarah kepada sentralisasi politik. *Keempat*, Weber menolak *definisi* agama. Dia mengatakan bahwa agama adalah merupakan kepercayaan mengenai yang gaib dan agama merupakan kepercayaan universal karena terdapat pada setiap masyarakat.⁴³

2. Sosiologi Agama Emile Durkheim

Emile Durkheim dalam *Elementary Forms of the Religious Life*, mendiskripsikan secara substantif atas fenomena-fenomena religius, terutama dalam konteks dikotomi keramat atau profan, akan tetapi berakhir dengan suatu definisi dalam konteks fungsionalitas agama yang sosial umum. Dalam hal ini, berbeda dengan Weber, Durkheim menolak kecenderungan keilmuan *religiunswissenschaftliche* saat itu, yang mencoba mendefinisikan agama secara substantif dengan satu atau lain cara. Bisa dikatakan bahwa pendekatan Durkheim terhadap agama secara radikal lebih sosiologis ketimbang Max Weber yaitu agama dipahami sebagai "fakta sosial" dalam pengertian Durkheim.⁴⁴

Durkheim tertarik pada unsur-unsur solidaritas masyarakat. Ia mencari prinsip yang mempertalikan antara anggota masyarakat. Agama bukan *ilusi*⁴⁵, tetapi merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. Semua konsep dasar yang dihubungkan dengan agama seperti; dewa, jiwa, nafas dan totem berasal dari pengalaman manusia terhadap keagungan dari golongan sosial. Prinsip ini ditemukan oleh Emile Durkheim pada waktu ia mempelajari masyarakat Aborigin di Australia, karena dasar agama terdapat dalam *totemism*.⁴⁶ Bagi Durkheim

⁴³ Max Weber, *The Sociology of Religion*, Terjemahan Ephraim Fischaft, intro-oleh Talcott Parsons, (Boston: Beacon Press, 1963), h. XXXII. Lihat juga Brian Morris, *Anthropological Studies of Religio: An Introductory Text*, 1987, h. 68-69.

⁴⁴ Peter L. Berger, *Langit Suci*,...,h 204

⁴⁵ Agama di teorikan apakah ilusi atau realitas merupakan problem dalam pendekatan psikologi. Bisa di baca dalam Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat pendekatan Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 31.

⁴⁶ Konsep dasar totemisme menjadi tema buku Emile Durkheim, *Me Elementary Forms of Religious Life*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Joseph Word Swain, New York, the Free Press, 1965.

agama memainkan peranan yang fungsional, karena agama adalah prinsip solidaritas masyarakat. Dengan demikian Durkheim dikenal sebagai pelopor fungsionalisme dalam antropologi.

Usaha yang paling meyakinkan dan paling jauh jangkauannya guna mendefinisikan agama dalam konteks fungsionalitas sosialnya adalah karya Thomas Luckmann, dalam bukunya: *Das Problem der Religion in der Modernen Gesellschaft*, 1963, versi bahasa Inggris *The Invisible Religion*, 1967. Usaha ini sangat jelas berada dalam tradisi Durkheimian, walaupun ditambah dengan pembahasan-pembahasan antropologis umum yang jauh melebihi Durkheim. Luckmann juga berhati-hati dalam membedakan antara konsepsi fungsionalitasnya dengan konsepsi struktural-fungsionalisme kontemporer. Esensi konsepsi agama menurut Luckmann adalah kapasitas organisme manusia untuk memuliakan hakikat biologisnya melalui pembangunan semesta-ternesta makna yang obyektif, mengikat secara moral, dan meliputi segalanya. Karena itu, agama bukan saja fenomena sosial (seperti dalam Durkheim) melainkan fenomena antropologis *Par Excellence*. Teristimewa agama itu disamakan dengan transendensi diri simbolik. Maka segala sesuatu yang benar-benar manusiawi itu dengan begitu adalah religius dan fenomena yang religius dalam lingkungan manusia adalah fenomena-fenomena yang didasarkan dalam hakikat kebinatangan manusia atau lebih tepat bagian dari konstruksi biologisnya yang dimilikinya bersama dengan binatang-binatang lainnya.⁴⁷

3. Sosiologi Agama Joachim Wach

Joachim Wach lahir tanggal 25 Januari 1898 di Chemnitz, Saxony dan meninggal tahun 1955 di Swiss.⁴⁸ Ia adalah ahli ilmu

⁴⁷ Peter L. Berger, *Langit .Suci... h. 205.*

⁴⁸ Riwayat hidup Joachim Wach dapat di baca dalam karyanya *The Comparative Study of Religions*, (New York: Columbia University Press, 1958), h. xviii-xxii; terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Djam'annuri, (1984), h. xvi-xxii.

agama. Sosiologi agama Wach dapat dipahami dalam konteks ilmu agama. Wach mendefinisikan "Sociology of Religion" dengan melalui penelitian hubungan antar agama dengan *gesellschaft* (masyarakat) yang dipengaruhi oleh agama. Metode yang paling cocok untuk mengadakan penelitian sosiologi agama adalah metode empiris deskriptif dan fenomenologis. Wach menyatakan masalah-masalah normatif merupakan masalah etika dan filsafat agama. Pengaruh masyarakat terhadap agama sama kuatnya dengan pengaruh agama masyarakat.

Wach mengemukakan latar belakang sosial pendiri agama menentukan ciri awal sebuah agama dibentuk. Wach menekankan pada faktor sosial ekonomi dan agama. Sedangkan persoalan sosiologis berasal dari sifat dasar manusia dan nabinya. Dalam bukunya; *Sociology of Religion*", sifat dasar manusia itu dicari melalui tiga jalan. *Pertama*, pencarian pertama merupakan pencarian realitas terakhir (*erchatology*), dilaksanakan oleh teologi; *Kedua*, realitas manusia oleh (*antropologi*); *Ketiga*, sifat dasar alam semesta (*kosmologi*) dan ilmu sains.⁴⁹

- Metode Tipologi Joachim Wach

Petama menganalisis dengan cara perbandingan kelompok-kelompok keagamaan yang secara alami menjadi bagian masyarakat: cults keluarga, cults kekerabatan; cults yang berhubungan dengan tempat; cults ras, cults etnis bangsa dan cults berdasarkan kelamin, umur. "*Cross Sectional Comparative Method*".

Kedua, menganalisis kelompok-kelompok keagamaan yang secara alami menjadi bagian dari masyarakat, terdiri dari kecenderungan-kecenderungan yang lebih spesifik berhubungan akibat dari diferensiasi masyarakat yang lebih maju. *Ketiga*, diferensiasi sosial dalam masyarakat berpengaruh atas sikap keagamaan dengan cara spesial. Misalnya, prajurit, pedagang,

⁴⁹ Joachim Wach, *Sociology of Religion*, (Chicago: The University of Chicago Press. 1944), dalam Syamsuddin Abdullah, *Agama dan pendekatan Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 94.

petani berpengaruh terhadap perkembangan agama. *Keempat*, mempelajari hubungan antara agama dengan negara. Menurut Wach, hubungan antara agama dengan negara sangat berpengaruh terhadap agama. Hubungan antara agama dengan negara berbeda sekali, pada waktu raja-raja Sassanid Persia, hubungan antara agama-agama sangat kuat. Agama-agama misteri dan rahasia merupakan contoh pemisah yang radikal antara agama dan negara. *Kelima*, Menganalisis secara perbandingan jenis-jenis wibawa otoritas: pendiri, pembaharu, nabi, ahli peramai, orang suci dan lain-lain.⁵⁰

4. Sosiologi Agama Ibnu tihaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunis tahun 1332-1406. Ia memulai hidupnya dengan belajar hadis, fiqh Maliki, ilmu-ilmu bahasa dan syair-syair mantiq dan falsafah. Ibnu Khaldun menyaksikan peristiwa-pristiwa yang menyebabkan hancurnya kekuasaan Islam terakhir di Andalusia dan kekuasaan (pemerintahan) yang tersebar di Afrika Utara. Ia juga menyaksikan di Timur sebuah ras Tartar ke negeri Syam di bawah pimpinan Timur Leng.

Bagi Ibnu Khaldun sejarah itu perlu dipelajari untuk kepentingan studi sejarah. Ia menggunakan metode yang berdasarkan kepada penjelasan (deskriptif), analisis dan keterangan kausalitas mengenai peristiwa-peristiwa. Dengan peristiwa-peristiwa itu, ia menganggap perlu adanya ilmu baru yaitu; *ilmu peradaban*. Pada zaman modern ini, ilmu itu dinamakan ilmu pengetahuan sosiologi. Sebagian lain ada yang menyatakan *dengan falsafat sejarah*.⁵¹

Dalarn *Muqadimah*nya. Ibnu Khaldun membagi topik kajiannya ke dalam 6 fase.

Pertama, mengenai masyarakat manusia secara umum dan jenis-jenis serta pertimbangannya dengan bumi "Ilmu Sosiologi Murni".

⁵⁰ *Ibid* h, 95.

⁵¹ *Ibid*, h, 58.

Kedua, tentang masyarakat pengembara dengan menyebut kabilah-kabilah dan etnis yang biadab "Sosiologi Pedesaan".

Ketiga, tentang negara, khilafah dan pergantian sultan-sultan; "Sosiologi Politik".

Keempat, Tentang masyarakat menetap negeri-negeri dan kota; "Sosiologi Kota".

Kelima, tentang pertukangan, kehidupan, penghasilan dan aspek-aspeknya; "Sosiologi Industri".

Keenam, tentang ilmu pengetahuan, cara memperolehnya dan mengajarkannya; Sosiologi Pendidikan".

Muqaddimah bukanlah kajian sederhana bagi ilmu kemasyarakatan, tetapi percobaan yang berhasil dalam memperbaharui ilmu sosial. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengajak menjadikan ilmu sosial sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Prof Sali al-Hasri berpendapat bahwa, Ibnu khaldun berhak dengan gelar pendiri ilmu sosial lebih daripada Comte, oleh karena itu Ibnu Khaldun telah berbuat yang demikian jauh sebelum Comte, yaitu lebih dari 460 tahun.

Menurut Ibnu Khaldun agama bukanlah pikiran manusia. Metode berfikir manusia adalah akal, sedangkan metode agama adalah wahyu, dan wahyu itu bukanlah akal. Dalam kajiannya Ibnu Khaldun lebih menonjolkan etnis satu atas etnis yang lainnya yaitu ras Arab, yang kemudian lebih dikenal dengan *Teori Ras Ibnu Khaldun*, yaitu, *pertama*, ras Arab dengan ciri pengembara yang ada pada mereka adalah ras perampok dan pemalas. *Kedua*, ras Arab adalah ras pengembara, sebagai naluri dan watak. *Ketiga*, etnis Arab adalah etnis yang unggul dalam pengembaraan dibanding dengan suku-suku lainnya. Dengan agama sebagai asas kekuatan agama mereka.⁵²

⁵² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 228-247.

C. Teori Konflik

Masyarakat manusia di mana pun mereka berada akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakan warna lain dari kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Konflik atau pertentangan umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak fungsional. Suatu sistem, pranata, atau institusi yang acapkali mengalami konflik dinilai lebih tidak harmonis daripada sistem, atau institusi lain yang relatif jarang mempunyai konflik. Pemahaman seperti ini lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan dari kebanyakan orang untuk memilih "*strategi hidup*" yang akomodatif dari pada harus memakai jalan yang sering menempatkan orang dalam posisi yang saling kontraditif.

Seharusnya konflik disikapi sebagai cara untuk merengkuh warna kehidupan yang lebih memberdayakan masyarakat manusia. Selama ini, konflik paling sering disikapi sebagai suatu peringatan, cobaan, dan laknat dari Sang Penguasa Alam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konflik merupakan sesuatu yang terpaksa diterima oleh manusia. Konflik tidak diterapkan dalam agenda kehidupan sebagai strategi, cara atau jalan untuk mencapai tujuan kehidupan. Meskipun demikian masyarakat masih mencoba mengidentifikasi beberapa hikmah konflik yang biasanya dikaitkan dengan serangkaian keberuntungan yang didapat setelah terjadinya konflik.

Masyarakat intelektual dapat mempergunakan strategi konflik dalam rangka mencapai target kekuasaan dan wewenangnya. Berbagai cara dalam strategi konflik seperti penghembusan isu sosial-politik, statemen atau diplomasi politik pembuatan produk perundangan atau kebijakan, persaingan pasar, penonjolan idiologi tertentu dengan disertai pengebirian idiologi lain, rekayasa aksi atau gerak sosial adalah merupakan sesuatu yang tidak terlaui sulit untuk dijadikan contohnya, meski secara

hukum agak berat diemukan pembuktiannya.⁵³

Konflik, dalam sosiologi, dapat dipahami melalui teori konflik yang merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta. Pengertian paradigma menurut Ritzer adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Sementara itu, dalam sosiologi, paradigma fakta sosial merupakan salah satu paradigma dalam sosiologi yang memahami bahwa manusia pada prinsipnya tunduk atau mengikuti fakta sosialnya. Dalam hal ini teori konflik merupakan antitesis dari teori fungsionalisme struktural. Oleh sebab itu maka proposisi yang dibangun bertentangan dengan proposisi dalam teori fungsionalisme struktural.⁵⁴

Teori konflik sebenarnya berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsionalisme struktural. Tetapi diantara keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsionalisme struktural menilai bahwa fakta atau realita sosial adalah fungsional. Sementara teori konflik menyoroti bahwa fakta sosial berupa wewenang dan posisi justru merupakan sumber pertentangan sosial.

Wewenang dan posisi merupakan konsep sentral dari teori konflik. Menurut teori ini, ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang otomatis akan menempatkan masyarakat pada posisi yang saling berbeda. Perbedaan posisi itu pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. ide pokok dari teori konflik dapat di rinci menjadi tiga, yaitu :*Pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang di tandai dengan adanya pertentangan terus menerus diantara unsur-unsurnya. *Kedua*, Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan ; *Ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau

⁵³ Agus Surata dan Johana Taufik Andriyanto, *Atasi Konflik Etnis*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h. 3.

⁵⁴ Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, *Atasi Konflik...*, h. 3.

pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Sementara, lawannya, teori struktural yang ditentang oleh teori konflik mengandung pula tiga pemikiran pokok, yaitu: *Pertama*, masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. *Kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. *Ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.⁵⁵

Berikut ini dipaparkan beberapa teori konflik oleh para tokohnya guna menganalisis peristiwa kerusuhan atau konflik yang terjadi di pelosok nusantara, termasuk juga konflik sosial-keagamaan yang terjadi di Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu Jawa barat.

1. Pandangan Karl Marx Tentang Konflik

Dalam teori Marx terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun, antara lain adalah pengakuan akan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang yang berada dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadarannya. Serta berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial.

Marx memberi tekanan pada dasar ekonomi untuk kelas sosial, khususnya pemilikan alat produksi. Ia juga mempunyai ide yang kontroversial mengenai sistem dua kelas yang digunakan dalam analisisnya, khususnya tentang ramalannya mengenai pertumbuhan yang semakin melebar antara kelas borjuis dan proletar. Marx mengajukan ramalan mengenai revolusi proletarian diwaktu yang akan datang, dimana menurutnya tidak akan menjadi perubahan struktur sosial yang utama, kecuali dengan revolusi.

Filosofis Marx banyak ditemukan dalam analisis sosiologi maupun ekonomi: Pada intinya ia menghubungkan antara

⁵⁵ *Ibid. h. 4.*

komitmen idiologi dengan struktur ekonomi dan posisi kelas. Pemikiran filosofi Marx berpusat pada usahanya untuk membuka kedok sistem nilai masyarakat; pola kepercayaan; dan bentuk kesadaran sebagai idiologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Marx lebih memberi tekanan pada pentingnya kondisi materiil dalam struktur-struktur masyarakat, dan membatasi pengaruh budaya yang bebas terhadap kesadaran individu serta perilakunya.

Marx membagi kesadaran manusia menjadi "kesadaran palsu" dan "kesadaran benar". Misalnya, ia meyakini bahwa kepatuhan dari para buruh dalam pekerjaannya merupakan kesadaran palsu, sebab sesungguhnya dalam diri mereka terdapat bentuk kebutuhan lain yang ingin diperjuangkannya.⁵⁶ Dalam bagian lain, Marx juga menyebutkan bahwa adanya kontrol terhadap Kondisi kehidupan manusia akan menghasilkan alienasi atau perasaan akan keterasingan alienasi tersebut dapat berupa tempat tipe yakni alienasi dan proses produksi, alienasi dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan individu, alienasi dari manusia lain disekitarnya, serta alienasi dari dirinya sendiri. Menurut Johnson, Marx menunjukkan kondisi-kondisi obyektif dari kelas pekerja dan dari kaum kapitalis sebagai sesuatu yang sifatnya memang mengalienasi; tanpa menghubungkannya dengan reaksi subyektif mereka atas kondisinya.⁵⁷

Manusia akan senantiasa berada dalam pengaruh struktur sosialnya. Bentuk dominasi yang dinyatakan melalui orientasi budaya dapat mempengaruhi kesadaran subyektif individu. Bentuk dominasi ini dapat meliputi pembentukan pandangan hidup dan cara berfikir dengan tujuan untuk memperkuat struktur kekuasaan. Marx melihat bahwa pemenuhan kebutuhan manusia ternomorduakan jika ketika itu juga harus diupayakan pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan sistem sosial. Dengan kata lain,

⁵⁶ *Ibid*, h. 8.

⁵⁷ *Ibid*, h. 9.

dapat pula disebutkan, bahwa pemenuhan kebutuhan manusia akan menempati prioritas yang lebih rendah apabila pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat disatukan dengan mudah ke dalam struktur sistem tersebut.

Dalam masyarakat kapitalis akan terjadi dominasi baik dalam bentuk yang halus maupun tajam yang berupa ekspansi kapasitas produksi dari sistem kapitalis itu sendiri. Meskipun ekspansi semacam ini sudah diramalkan oleh Marx, tetapi ia tidak menduga bahwa ekspansi tersebut sebagian akan digunakan untuk kemakmuran para buruh pekerja, atau menciptakan kelas menengah baru yang sudah mulai kehilangan kontrol atas kepemilikan alat produksinya.

Apabila masyarakat kapitalis telah dapat menciptakan kesejahteraan materiil, maka akan berakibat pada peningkatan rasa puas yang meluas di kalangan masyarakat, dan tidak mempedulikan lagi akan *status quo*. Meskipun Marx meramalkan akan adanya kesulitan ekonomi dan kesengsaraan kaum buruh yang semakin besar, tetapi ahli teori kritis justru menganggap jika para buruh pekerja sudah merasa terdominasi oleh kekuasaan, maka ia akan menjadi orang yang pasif dan pasrah, tidak berkeinginan untuk memberontak. Dalam hal ini Johnson menyebutkan:

"Meskipun Marx sudah meramalkan bahwa kesulitan ekonomi yang semakin besar dan kesengsaraan kaum buruh akan merangsang keinginan mereka untuk memberontak, para ahli teori kritis menganggap bahwa sebagian besar dan populasi (termasuk kelas buruh) sudah menjadi pasif dan lesu, lebih suka mendukung status quo dan menjamin keselamatan mereka serta meneruskan usaha mempertahankan kesejahteraan daripada mengambil resiko masuk dalam perjuangan revolusioner untuk menghasilkan perubahan sosial yang diinginkan. "

Kerelaan dari massa untuk menerima dan mendukung struktur kekuasaan kapitalis mencerminkan lebih dari pada sekedar ketergantungan ekonomi mereka terhadap bertahannya struktur

kekuasaan itu. Selain dominasi ekonomi yang dirasakan secara eksternal, ada juga dominasi internal terhadap kesadaran, karena seluruh kebudayaan dirembes oleh semacam logika dan pandangan hidup yang secara intrinsik ada dalam bentuk produksi dan organisasi kapitalis. Logika yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan efisiensi teknis, atau dengan menggunakan istilah Weber, rasionalitas instrumental.

Dalam teori Marx disebutkan bahwa peran negara relatif lebih pasif dibandingkan dengan peran institusi-institusi yang mempunyai otonomi seperti lembaga pendidikan, organisasi ilmiah dan profesional, media massa, dan lain sebagainya. Bagi Marx lembaga-lembaga ini mempunyai otonomi _yang penting untuk perkembangan sesuai dengan logikanya sendiri terlepas dari kontrol politik secara terbuka. Meskipun demikian, menurut Marx, institusi tersebut harus tetap bekerja dalam suatu kerangka yang ditentukan oleh pemerintah. Lebih jelasnya Johnson mengungkapkan:

“... Lembaga-lembaga ini memiliki suatu otonomi yang penting untuk berkembang sesuai dengan logikanya sendiri, terlepas dari kontrol politik secara terbuka. Walaupun demikian, institusi-institusi ini harus bekerja dalam suatu kerangka biasa yang ditentukan pemerintah. Jadi sistem politik merupakan sebab dari dominasi ekonomi dan dominasi budaya. Hasilnya adalah kesadaran individu dijamin untuk menjamin kesetiaan politik mereka dan konfirmatis terhadap persyaratan sistem itu.”⁵⁸

Marx memberikan gambaran tentang model konflik kelas revolusioner dan perubahan sosial (*the model of revolutionary class conflict and social change*), Marx mengajukan asumsi yang sangat simpel yaitu bahwa: organisasi ekonomi, khususnya kepemilikan tanah (*the ownership of property*) akan menentukan organisasi yang ada dalam masyarakat. Struktur kelas dan susunan institusional seperti nilai budaya, kepercayaan, dogma agama-

⁵⁸ *Ibid*, h. 11.

religi, dan sistem ide lain merupakan refleksi dari dasar-dasar ekonomi masyarakatnya.⁵⁹

Pemikiran Marx akan dapat dilihat secara baik jika disajikan dalam bentuk yang abstrak dan dipisahkan dari polemik tentang kelas dan evaluasi sosial. Hal ini sebagaimana dinyatakan Turner. *I believe that This substantive contribution can best be seen if the propositions of his theoretical scheme are stated in a highly abstract form and divorced from his polemic and rhetoric about social class and , revolution.*⁶⁰ Sehubungan dengan prinsip semacam ini, di bawah ini ditampilkan proposisi abstrak Marx guna memberi landasan teoritik konflik dalam masyarakat. Proposisi tersebut adalah semakin terdapat ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber langka yang ada di dalam sistem, maka akan semakin besar terjadi konflik kepentingan antara segmen dominan dan subordinate. Semakin segmen subordinate menjadi sadar tentang kepentingan kolektifnya yang sesungguhnya (*true collective interest*), semakin cenderung mereka mempertanyakan legitimasi dari keberadaan pola distribusi sumber-sumber langka. Gejala itu terlihat sebagai berikut:

1. Semakin perubahan sosial dibuat oleh segmen dominan untuk merusak keberadaan hubungan di antara segmen subordinate, semakin cenderung mereka menjadi sadar tentang kepentingan kolektifnya.
2. Semakin segmen dominan menciptakan keterasingan di antara segmen subordinate, semakin cenderung mereka menjadi sadar tentang kepentingan kolektifnya.
3. Semakin para anggota segmen subordinate dapat mengkomunikasikan keluhan-keluhan di antara satu dengan yang lain, semakin cenderung mereka menjadi

⁵⁹ Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (California: Wadsworth Publishing Company. 1991). Dalam Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andri Susanto. *Atasi konflik Etnis* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h. 12.

⁶⁰ *Ibid*; h. 12.

sadar tentang kepentingan kolektifnya.

4. Semakin subordinate dapat mengembangkan ideologi yang mempersatukan (*unifying ideologies*), semakin cenderung mereka sadar akan kepentingan kolektifnya.

Memperhatikan proposisi abstrak di atas, beberapa kunci pemahaman dapat diintrodusir sebagai berikut:

1. Suatu sistem dapat dibagi menjadi dua segmen, yaitu kelompok dominant dan kelompok subordinate,
2. Konflik antar kedua segmen dapat terjadi karena:
 - Ada ketimpangan dalam distribusi sumber-sumber yang tergolong langka.
 - Kesadaran kelompok subordinate tentang kebutuhan kolektifnya.
 - tentang legitimasi pola distribusi sumber-sumber langka.
 - Tidak "*manifest*"-nya kepentingan kolektif dari kelompok dominant.
 - Terjadinya deprivasi dari absolute ke relative di kalangan kelompok subordinate.
 - Kemampuan kelompok subordinate dalam mengembangkan struktur kemampuan politik.
 - Adanya polarisasi di antara kedua segmen.
3. Ketidakadilan tersebut terjadi karena masing-masing segmen mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan.
4. Legitimasi dari keberadaan pola distribusi sumber-sumber langka akan segera dipertanyakan oleh segmen subordinate sejalan dengan perkembangan tingkat kesadarannya mengenai kepentingan kolektifnya. Perkembangan tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor:
 - Perubahan sosial yang sengaja diciptakan oleh kelompok dominant untuk merusak keberadaan hubungan di antara segmen subordinate.

- Penciptaan keterasingan di kalangan kelompok subordinate oleh kelompok dominant.
 - Terciptanya peluang pengkomunikasian keluhan-keluhan di antara anggota kelompok subordiat. Terciptanya peluang ini dipengaruhi oleh : Adanya pemusatan terhadap kelompok subordinate dalam lingkungan tertentu, serta adanya peluang pendidikan bagi kelompok subordinate yang kemudian mengakibatkan tertingkatkannya sarana komunikasi di antar mereka.
5. Perkembangan suatu ideologi yang dapat mempersatukan mereka, sehingga mengetahui kepentingan kolektifnya. Unifikasi ideology dapat terjadi karena: juru bicara ideologi dari kelompok subordinate dan tidak adanya kemampuan kelompok dominant dalam mengatur proses sosialisasi dan jaring komunikasi.
 6. Polarisasi di antara kedua segmen terjadi karena adanya unifikasi ideologi dan berkembangannya struktur kepemimpinan politik.
 7. Konflik dan perubahan struktur sistem dapat menghasilkan dilaksanakannya distribusi sumber-sumber langka.⁶¹

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa analisis Marx setidaknya dapat dipakai untuk membantu menganalisis kasus tawuran (konflik sosial-keagamaan) di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Secara teoritik, tindak kekerasan dalam konflik yang terjadi di pelosok tanah air, termasuk di Indramayu adalah disebabkan karena; 1). Adanya ketidakadilan distribusi sumber-sumber langka; 2). Tumbuhnya kesadaran kelompok subordinate-rakyat-tentang kepentingan kolektifnya; 3). Hilangnya legitimasi elit di mata rakyat; dan 4). Adanya polarisasi di antara kelompok dominant dan subordinate. Dengan demikian, apabila keempat hal tersebut tidak diselesaikan dengan tepat,

⁶¹ *Ibid*, h. 15

dapat diduga bahwa tindak kekerasan yang terjadi juga akan sulit berhenti.

2. Pandangan George Simmel Tentang Konflik

Serupa dengan Marx, Simmel juga memandang bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam suatu masyarakat. Meskipun mempunyai kesamaan pandangan semacam itu, namun Simmel tidak sependapat untuk melihat struktur sosial sebagai sistem yang hanya terbagi menjadi dua strata kelas dominant dan subordinate, tetapi lebih sebagai suatu proses asosiatif dan disosiatif yang paling bercampur dan tidak dapat saling dipisahkan. Pemisahan hanya dapat dilakukan dalam tingkat analisis, bukan pada taraf realita.⁶²

Terkait dengan kekerasan yang terjadi di dalam konflik, Simmel mengajukan proposisi tentang intensitas konflik sebagai berikut:

- 1) Semakin besar keterlibatan emosi di dalam konflik, semakin cenderung konflik akan menjadi keras. Semakin besar solidaritas di antara para anggota yang terlibat konflik, semakin besar pula keterlibatan emosinya. Semakin besar keharmonisan yang ada sebelumnya di antara anggota yang terlibat konflik, semakin besar pula tingkat keterlibatan emosinya.
- 2) Semakin suatu konflik dirasakan oleh para anggota yang terlibat konflik sebagai sesuatu yang memperjuangkan kepentingan individu, semakin cenderung konflik akan berlangsung secara keras.
- 3) Semakin konflik dapat dipahami sebagai sesuatu yang akan berakhir, semakin kurang kecenderungan konflik akan menjadi keras.⁶³

Berdasarkan proposisi Simmel di atas, dapat diketahui bahwa kekerasan di dalam konflik itu dapat terjadi karena; 1).

⁶² *Ibid*, h. 16

⁶³ *Ibid*, h. 17

Keterlibatan emosional dari pada anggota, dimana keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh solidaritas dan harmonitas yang terjalin sebelumnya; dan 2). Bahwa konflik dipersepsi sebagai suatu media untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dari masing-masing anggota. Tindakan emosional merupakan sesuatu yang tidak rasional atau yang dalam bahasa sosiologi dianggap "*unobtainable*", tidak dapat dicapai dengan ukuran-ukuran yang masuk akal. Perilaku semacam ini sulit dikendalikan, jika hanya mengandalkan anjuran-anjuran rasional karena para pelaku tidak dalam kondisi emosi yang normal.

Keterlibatan emosional tersebut juga dipengaruhi oleh adanya tingkat solidaritas dan harmonitas yang tinggi di antara para anggota kelompok masing-masing. Dengan demikian dapat di duga bahwa kebrutalan yang terjadi dalam - peristiwa konflik tertentu lebih dikarenakan adanya ledakan rasa sakit hati atau kecewa karena telah ada yang mengganggu harmonitas yang sebelumnya dinikmatinya. Oleh Karena itu maka wajar jika kekerasan atau kebrutalan terjadi Justru terjadi di dalam masyarakat _yang sebelumnya relative damai. Masyarakat semacam itu teramat membenci hal-hal yang anarkis ataupun destruktif, oleh" sebab itu begitu kedamaiannya terusik marahnya bukan kepalang.

Selain hal tersebut di atas, konflik akan berlangsung brutal jika kekerasan tersebut dipersepsi oleh para pelaku sebagai alat atau media untuk memperjuangkan kepentingan dari para individu dari masing-masing kelompok. Dalam posisi semacam ini, pelaku pertikaian sama-sama meyakini bahwa haya dengan cara mengalahkan musuhlah maka kehidupannya akan menjadi lebih terjamin. Model semacam ini banyak terjadi dalam peristiwa kekerasan di Indonesia.

3. Pandangan Weber Tentang Konflik

Weber mempunyai perhatian pada sisi historis terhadap transisi masyarakat tradisional menuju masyarakat kapitalis modern Menurutnnya masyarakat akan lebih diarahkan oleh

rasionalitasnya daripada oleh nilai-nilai tradisional. Meluasnya birokrasi di dalam wilayah ekonomi dan pasar menjadikan individu harus mempergunakan rasionalitasnya. Hal ini juga berarti semakin menghilangnya moral tradisional sebagai pedoman kehidupan. Rasionalisasi kehidupan dapat membawa kebebasan baru bagi individu-individu dari dominasi dogma religius, komunitas, kelas dan kekuatan tradisional lain menuju bentuk dominasi baru yang berupa kekuatan ekonomi yang bersifat impersonal, seperti pasar, birokrasi yang berbadan hukum, dan oleh luasnya alat administrasi yang dikembangkan oleh Negara.⁶⁴

Weber melihat adanya korelasi yang tinggi antara kekuasaan (power), kekayaan (wealth) dan martabat (prestige). Dalam istilah Weber, jabatan atau wewenang dalam kekuasaan politik (party), pemilikan posisi ekonomi yang menguntungkan dan keanggotaan di dalam kedudukan sosial yang tinggi (status group). Ketegangan dan kemarahan yang termanifestasikan dalam tindak kekerasan terkait pada diskontinuitas distribusi ketiga hal tersebut. Puncaknya adalah jika pergerakan atau mobilitas sosial secara vertikal peluangnya sangat kecil, maka konflik atau kemarahan akan semakin terakumulasi dalam ledakan kekerasan.

Sehubungan dengan analisisnya mengenai ketidaksamarataan (inequality) dan konflik, Weber mengajukan serial proposisi sebagai berikut:

- 1) Semakin besar tingkat kemunduran legitimasi dari kewenangan politik, semakin cenderung terjadi konflik antara superordinat dan subordinate.
- 2) Semakin pemimpin kharismatik dapat muncul untuk memobilisasi kemarahan subordinate di dalam sistem, semakin besar akan terjadi konflik antara superordinat dan subordinate.
- 3) Semakin efektif pemimpin kharismatik di dalam memobilisasi subordinate dalam mensukseskan konflik,

⁶⁴ *Ibid*, h. 18

semakin besar tekanan untuk meneruskan kewenangannya dalam penciptaan sistem aturan dan kewenangan administrative.

- 4) Semakin sistem aturan dan kewenangan administrative dapat meningkatkan kondisi: tingginya korelasi keanggotaan, tingginya diskontinuitas hirarki sosial dan rendahnya mobilitas sosial ke atas, semakin besar akan terjadi kemunduran legitimasi dari kewenangan politik dan semakin cenderung akan terjadi konflik antara superordinat dan subordinate.⁶⁵

Dalam analisa Weber di atas dapat diketahui bahwa kekerasan di dalam konflik itu dapat terjadi karena kemarahan kelompok subordinate yang tidak puas dengan akses-akses mereka pada: kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang ada pada dirinya. Lemahnya aspek mereka pada aspek strategi kehidupan tersebut dipersepsi akan menutup peluangnya dalam menaikkan level hirarki sosiainya. Anggapan semacam itu akan mendorong semakin kerasnya konflik antara pihak atas dan bawah. Perjuangan kelompok subordinate bergantung pada kemampuan pemimpin karismatik yang umumnya secara alamiah tiba-tiba muncul selama konflik sedang berlangsung. Apabila konflik berlangsung terus menerus dikonsepsikan legitimasi kelompok superordinat akan semakin melemah. Kondisi semacam ini pula yang saat ini sesungguhnya sedang mengedepan di Indonesia, dimana legitimasi pemerintah semakin mengurang kerana tidak mampu mengatasi beberapa konflik secara tepat, cepat dan berkeadilan.

4. Pandangan Ralf Dahrendorf Tentang Konflik

Menurut Dahrendorf ada anggapan bahwa jika suatu kelompok terbentuk secara kebetulan (byhance) sangat mungkin akan terhindar dari konflik. Sebaliknya apabila kelompok semu yang membentuknya ditentukan secara struktur maka akan memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan

⁶⁵ *Ibid*, h. 19.

yang dapat menjadi sumber konflik atau pertentangan.

Menurut Dahrendorf terdapat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan sosial. Konflik akan menyebabkan terciptanya perubahan sosial. Ia menyebutkan: *"aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif"*

Dalam pandangan Dahrendorf, masyarakat memiliki dua muka, yaitu konsensus dan konflik. Teorinya tentang konflik dialektik dianggap masih mendapat pengaruh dari Marx. Menurutny, setiap organisasi sosial akan menunjukkan realita:

1. Setiap sistem sosial akan menampilkan konflik berkesinambungan,
2. Konflik dimunculkan oleh kepentingan oposisi yang tak terhindarkan,
3. Kepentingan oposisi tersebut merupakan refleksi dari perbedaan distribusi kekuasaan diantara kelompok dominan dan kelompok lapisan bawah,
4. Kepentingan akan selalu membuat polarisasi dalam dua kelompok yang berkonflik.
5. Konflik selalu bersifat dialektik, karena resolusi terhadap suatu konflik akan menciptakan serangkaian kepentingan oposisi yang baru, dan dalam kondisi tertentu, akan memunculkan konflik berikutnya.
6. Perubahan selalu ada pada setiap sistem sosial, dan hal ini merupakan hasil yang terhindarkan dari konflik dialektik dan aneka tipe pola institusional.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, h. 21.

Analisis kausal Dahrendorf dinilai dengan elaborasinya mengenai kondisi yang memimpin tumbuhnya kesadaran kelas (Marx) atau kesadaran diantara kelompok semu atau laten (Dahrendorf) atas kepentingan obyek mereka. Dari sini kemudian dia menganalisis tentang terciptanya kelas politik "*untuk dirinya sendiri*" (Marx) atau "konflik kelompok" yang sesungguhnya (Dahrendorf). Akhirnya membatasi analisisnya pada fokus kemunculan konflik antara kelas polarisasi dan politik (Marx) atau konflik kelompok (Dahrendorf).

Konflik berhubungan dengan tumbuhnya kesadaran kelompok subordinate tentang kepentingan obyektif. Peningkatan kesadaran tersebut sejalan dengan berkembangnya kondisi *teknik* (kader kepemimpinan dan kodifikasi sistem ide); berkembangnya kondisi *politik* (diperbolehkannya kelompok oposisi mengorganisir diri); serta berkembangnya kondisi *sosial* (adanya peluang kelompok laten untuk berkomunikasi dengan lain, dan meningkatnya rekrutmen oleh struktur yang ada). Pada analisa Dahrendorf terlihat adanya posisi yang dilematis dari kelompok subordinat. Bahwa peningkatan atau perkembangan kondisi "teknik", "politik", dan "sosial" akan meningkatkan kesadaran kelompok semu atau laten tentang kepentingan obyektifnya. Hal ini akan membuka peluang tumbuhnya konflik. Di sisi lain, jika ketiga kondisi di dalam organisasi tersebut dirasa kurang, konflikpun akan berlangsung brutal atau keras. Kalaupun demikian, di akhir proposisinya dikatakan bahwa semakin keras suatu konflik, maka akan semakin besar angka perubahan struktural dan reorganisasi artinya, bahwa konflik yang terjadi di masyarakat mempunyai fungsi bagi terjadinya perubahan-perubahan sistem dalam skala tertentu.⁶⁷

5. Pandangan Lewis A. Coser Tentang Konflik

Menurut Coser, konflik disebabkan oleh adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari

⁶⁷ *Ibid*, h. 21

keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Pertanyaan tentang legitimasi tersebut diakibatkan oleh kecilnya saluran untuk menyampaikan keluhan yang ada dan perubahan deprifasi absolute ke relative.⁶⁸ Coser menyampaikan reposisi tentang kekerasan konflik (the violen of conflict) sebagai berikut:

1. Semakin suatu kelompok berada pada konflik yang terjadi karena isu-isu yang realistik atau tujuan yang dapat dicapai (obtainable goal), semakin cenderung mereka melihat kompromi sebagai alat untuk merealisasikan kepentingan, oleh karenanya maka kekerasan konflik akan semakin berkurang.
2. Semakin suatu kelompok berada pada konflik yang terjadi karena isu-isu yang tidak realistis atau tujuan yang tidak dapat dicapai (unobtainable goals) semakin besar tingkat emosional akan dapat membangunkan dan terlibat konflik, dan oleh karenanya konflik akan semakin keras. Semakin konflik terjadi karena nilai-nilai pokok, semakin cenderung mengerah pada isu-isu yang non realistis. Semakin konflik yang realistis berlangsung lama, semakin cenderung akan munculnya atau meningkatnya isu-isu yang non realistis.
3. Semakin kurang fungsi hubungan interdefedensi diantara unit-unit sosial di dalam sistem, semakin kurang tersedianya alat-alat institusi untuk menangani konflik dan ketegangan, semakin keras suatu konflik. Semakin besar perbedaan kekuasaan diantara superordinat dan subordinate di dalam sistem, semakin kurang fungsi interdefedensi. Semakin besar tingkat isolasi subpolulasi di dalam sistem, semakin kurang fungsi interdefedensi.⁶⁹

Berdasarkan pemikiran Coser di atas, secara teoritik dapat diduga, bahwa kekerasan yang terjadi disebabkan karena isu-isu yang non relaistik adalah isu yang tujuannya tidak dapat direlisir.

⁶⁸ *Ibid*, h. 23

⁶⁹ *Ibid*, h. 24

Coser mencontohkan: isu tentang agama, etnis dan suku merupakan sesuatu yang tidak realistik. Konflik yang terjadi karena isu tersebut dikonsepsikan akan berlangsung secara keras. Tarulah misalnya konflik di Ambon, Maluku Utara saat ini.

Dalam kacamata Coser lama tidaknya suatu konflik dipengaruhi oleh tiga hal. Yaitu luas-sempitnya tujuan konflik pengetahuan sang pemimpin tentang simbol-simbol kemenangan atau kekalahan dalam konflik, dan dalam mempersuasi pengikutnya. Dalam pemikiran semacam ini nampak jelas, bahwa peran pemimpin begitu besar. Dengan demikian, katakanlah untuk beberapa kasus di Indonesia solusinya menunggu keterlambatan sang pemimpin secara total.

D. Teori Psikologi Agama

1. Lingkup Psikologi Agama

Psikologi agama menggunakan dua kata yaitu psikologi dan agama. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab.⁷⁰ Menurut Robert H. Thouless, psikologi sekarang dipergunakan secara umum untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia.⁷¹ Dari definisi yang dikemukakan tersebut, secara umum psikologi mencoba meneliti dan mempelajari sikap serta tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya. Karena jiwa itu bersifat abstrak, maka untuk mempelajari kehidupan kejiwaan manusia hanya mungkin dilihat dari gejala yang nampak, yaitu pada sikap dan tingkah laku yang ditampilkannya.

Selanjutnya, agama juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Agama sebagai

⁷⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11

⁷¹ Robert H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama*, tej. Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 13.

bentuk keyakinan, memang sulit diukur secara tepat dan rinci. Hal ini pula barangkali yang menyulitkan para ahli untuk memberikan definisi yang tepat tentang agama. Kembali menurut Robert H. Thouless, dalam kaitannya dengan psikologi agama ia menyarankan definisi agama adalah sikap (cara penyesuaian diri) terhadap dunia yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terikat dengan ruang dan waktu - *the spatio temporal physical world* (dalam hal ini, yang dimaksud adalah dunia spiritual). Definisi ini secara empiris lebih cocok untuk membedakan antara sikap-sikap keagamaan (*religious*) dari yang bukan keagamaan (*irreligious*), antara lain seperti Komunisme dan Humanisme. Sebab, dapat saja orang menjadi baik dan rela mengorbankan diri tanpa harus menjadi penganut agama.⁷²

Robert H. Thouless dengan definisi ini ingin membedakan sikap-sikap yang bersumber dari suatu kepercayaan agama terhadap yang bersumber bukan dari agama, walaupun dalam realitasnya terdapat sikap yang sama. Sehubungan dengan hal itu, Thouless berpendapat bahwa, psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan.⁷³ Sementara menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Disamping itu, psikologi juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut.⁷⁴

Psikologi agama dengan demikian merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia

⁷² *Ibid*, h. 23

⁷³ *Ibid*, h. 25

⁷⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 1

dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Jadi penelaahan tersebut merupakan kajian empiris.

2. Agresi dan Kekerasan: Perspektif Psikologi

Terlepas dari ada tidaknya pihak-pihak yang merekayasa, secara psikologis; ada peluang bagi setiap individu maupun massa kolektif untuk melakukan kekerasan atau agresi. Perasaan dan emosi yang ditekan dalam waktu sekian lama, baik terjadi pada orang perorang maupun pada kelompok masyarakat, cepat atau lambat akan meletus eksplosif dalam bentuk agresi dan kekerasan.⁷⁵ Dalam kamus politik istilah agresi dapat diartikan sebagai serangan bersenjata terhadap negara lain yang maksudnya bukan untuk membela diri, melainkan tersembunyi ada tujuan yang bersifat agresif.⁷⁶ Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, agresi merupakan pengrusakan dan gangguan yang ditujukan kepada orang lain dengan niat terencana. Dengan demikian agresi sangat dekat dengan perilaku kekerasan. Kekerasan dapat terjadi jika potensi mental seseorang tidak sesuai dengan realitas aktual.

Menurut ilmu psikologi, perilaku agresi diatribusikan pada berbagai factor penyebab:

1. Teori Insting (*Instinct Theories*). Menurut teori ini, agresi berasal dari dorongan firtah biologis. manusia untuk bertindak merusak dan destruktif. Sigmun Freud mengemukakan bahwa agresi berasal dari insting *thanatos* atau keinginan untuk mati (*death wish*) yang dimiliki setiap manusia secara alamiah. Sedangkan Konrad Lorenz mengemukakan bahwa agresi bersumber dari semangat

⁷⁵ Franz Magnis Suseno, *Melawan kekerasan tanpa Kekerasan* (Jogjakarta: Pustaka

Pelajar, 2000), h. 129.

⁷⁶ W. Surya Endra, *Kannis Politik Serta Penjelasananya* (Surabaya: StudyGroup, 1979), h.

bertempur (*figlating spirit*) yang dimiliki manusia seperti spesies-spesies lainnya.

2. Teori Dorongan (*Drive Theories*). Agresi disebabkan oleh kondisi-kondisi eksternal (misalnya: frustrasi, kehilangan muka atau malu) yang membuat orang bennotif kuat melakukan tindakan menyakiti orang lain. Dollard mengemukakan hipotesis frustrasi-agresi, yaitu bahwa frustrasi adalah perasaan tidak menyenangkan yang menimbulkan tindakan agresi. Jadi ada hubungan erat antara perasaan negatif akibat frustrasi dengan perilaku agresif. Kebanyakan psikolog sosial menolak teori insting dan lebih menerima teori dorongan karena dipandang lebih optimistik dalam mencegah timbulnya perilaku agresif dibanding teori insting.
3. Teori Neo-Asosiasi Kognitif. Menurut teori ini agresi berasal dari reaksi negatif terhadap pengalaman, ingatan, dan kondisi yang tidak menyenangkan. Menurut Berkowitz, jika mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, orang cenderung akan melakukan tindakan agresi atau tindakan eskapis (melarikan diri) dari keadaan tak menyenangkan.
4. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theories*). Menyatakan agresi terbentuk karena pembelajaran dari lingkungan sekitarnya, melalui pengalaman langsung atau mengamati perilaku orang lain. Kecenderungan agresif dipengaruhi oleh penguatan atau hadiah (*reinforcement*) atau hukuman (*punishment*) dari lingkungan terhadap perilaku agresif. Albert Bandura mengatakan bahwa orang agresif dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalunya, penguatan atau hukuman terhadap agresinya, persepsi orang yang bersangkutan terhadap tepat tidaknya agresi dilakukan, dan antisipasinya terhadap potensi akibat

yang akan ditimbulkan oleh tindakan agresinya.⁷⁷

Tindakan agresi yang dilakukn oleh agresor banyak terjadi karena di picu oleh kata-kata atau perilaku orang-orang yang berintegrasi dengan agresor, atau oleh kondisi-kondisi sosial secara umum. Frustrasi, yaitu gangguan terhadap tercapainya suatu tujuan atau keinginan, dapat memicu agresi karena menimbulkan perasaan menyakitkan. Provokasi langsung berupa verbal maupun tindakan dari orang lain juga dapat menimbulkan kemarahan dan agresi, terutama; jika provokasi itu sengaja dilakukan dengan niat buruk. Kekerasan media (*media violence*) terutama dari media elektronika (televisi, internet dan film) juga dapat meningkatkan agresi sebagian penontonnya. Kegairahan yang meningkat juga dapat menimbulkan agresi, karena kognisi sering mempengaruhi emosi dan selanjutnya mempengaruhi agresi. Ada hubungan yang kompleks antara emosi dan kognisi, keduanya dapat mempengaruhi agresi. Alkoholisme juga dapat memfasilitasi agresi

Pada tingkat kerusuhan, agresi yang sifatnya individual sudah meningkat menjadi agresi yang sifatnya massal. Kerusuhan ini biasanya disebabkan oleh frustrasi sosial yang dialami oleh sekelompok masyarakat. Misalnya, masyarakat yang berada dalam tekanan politik sekian lama, tidak akan kuat menahan beban dan meletus dalam bentuk tindakan anarkhis. Faktor-faktor yang sifatnya psikososial inilah yang memberikan kontribusi atas tindak kerusuhan atau agresi (amuk massa).

Secara garis besar, proses psikososial yang mempengaruhi timbulnya konflik dan kerusuhan sosial-politik adalah; 1) memori atau kenangan sejarah bersama yang traumatis; 2) kompetisi yang tak berimbang atas sumberdaya yang terbatas; 3) konstruksi sosial dari sejarah yang manipulatif; 4) fiktimisasi dan pengambinghitaman; 5) polarisasi dan segregasi sosial; 6)

⁷⁷ Yayah Khisbiyah, *Agresi dan Kekerasan: Perspektif Teori Psikologi*, dalam Franz Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 4.

pencitraan demon tentang musuh secara timbal-balik (demonisasi);
7) privilasi politik, sosial ekonomi yang diskriminatif

3. Fungsi Agama bagi Masyarakat

Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dikenal tiga bentuk masyarakat, yaitu: 1) masyarakat homogen; 2) masyarakat majemuk; dan 3) masyarakat heterogen. Masyarakat homogen ditandai oleh adanya ciri-ciri yang anggotanya tergolong dalam satu asal atau suku bangsa dengan satu kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari.⁷⁸ Masyarakat heterogen memiliki ciri-ciri bahwa: 1) pranata-pranata primer yang bersumber dari kebudayaan suku bangsa telah diseragamkan oleh pemerintah nasional; 2) kekuatan-kekuatan politik suku bangsa telah dilemahkan oleh sistem nasional melalui pengorganisasian yang berlandaskan pada solidaritas; 3) memiliki pranata alternatif yang berfungsi sebagai upaya untuk mengakomodasi perbedaan dan keragaman; dan 4) adanya tingkat kemajuan yang tinggi dalam kehidupan ekonomi dan teknologi Sebagai akibat dari perkembangan pranata-pranata alternatif yang beragama tersebut.⁷⁹

Terlepas dari penggolongan masyarakat tersebut, pada dasarnya masyarakat terbentuk dari adanya solidaritas dan konsensus. Solidaritas menjadi dasar terbentuknya organisasi dalam masyarakat, sedangkan konsensus merupakan persetujuan bersama terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan kelompok.⁸⁰ Lebih jauh Elizabeth K. Notingham membagi masyarakat menjadi tiga tipe, *Pertama*, adalah masyarakat yang terkebelakang dan memiliki nilai-nilai sakral. *Kedua*, adalah masyarakat pra industri yang sedang

⁷⁸ Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 8.

⁷⁹ *Ibid*, h. 12

⁸⁰ Thomas F. O'dea, *The Sociology of Religion*. Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, Inc. tim penerjemah Yayasan Yasogama *Sosiologi Agama: Suatu Pengenal Awal*, (Jakarta: Rajawali dan Yasogama, 1985), h. 107.

berkembang. *Ketiga*, adalah masyarakat industri sekuler.⁸¹ Dalam masyarakat tipe pertama menurut Elizabeth, setiap anggota masyarakat menganut agama yang sama, oleh karena itu keanggotaan dalam masyarakat dan dalam kelompok keagamaan adalah sama. Agama menyusup ke dalam kelompok aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat ekonomis, politik, kekeluargaan maupun rekreatif.⁸²

Sedangkan dalam masyarakat pra industri yang sedang berkembang, organisasi keagamaan sudah terpisah dari organisasi kemasyarakatan. Di masyarakat ini organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi formal yang mempunyai tenaga profesional. Agama sudah tidak sepenuhnya menyusup ke aktivitas kehidupan masyarakat, walaupun masih ada anggapan bahwa agama dapat diaplikasikan secara universal dan lebih tinggi dari norma-norma kehidupan sosial sehari-hari.⁸³

Pada masyarakat industri sekuler, organisasi keagamaan terpecah-pecah dan bersifat majemuk.⁸⁴ Ia melihat pada masyarakat modern yang kompleks ini, ikatan antara organisasi keagamaan dan pemerintahan duniawi tidak ada sama sekali. Karena itu, agama cenderung dinilai sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan persoalan akhirat, sedangkan pemerintahan berhubungan dengan kehidupan duniawi. Dalam masyarakat industri sekuler ini Elizabeth mengemukakan ciri-ciri tersebut mengandung implikasi ganda bagi fungsi agama. *pertama*, perbedaan bidang agama dan pertumbuhan sekularisme menimbulkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama yang cukup tinggi. *Kedua*, keyakinan dan pengamalan keagamaan menjadikan agama sebagai pemersatu di lingkungan organisasinya,

⁸¹ Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Society*. New York: Random House, 1954, terjemahan Abdul Muis Naharong, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1975), h. 59.

⁸² *Ibid*, h. 51

⁸³ *Ibid*, h. 56

⁸⁴ *Ibid*, h. 60

khususnya bagi warga masyarakat minoritas.⁸⁵

Terlepas dari bentuk ikatan antara agama dengan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama, maka yang jelas dalam setiap masyarakat agama masih tetap memiliki fungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Masalah agama tak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain: 1) berfungsi edukatif, 2) berfungsi penyelamat, 3) berfungsi sebagai pendamaian, 4) berfungsi sebagai sosial kontrol, 5) sebagai pemupuk rasa solidaritas, 6) berfungsi transformatif, 7) berfungsi kreatif, dan 8) berfungsi sublimatif.⁸⁶

Dengan demikian, berbagai macam kerusuhan sosial, konflik maupun agresi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, termasuk Konflik Sosial-keagamaan yang terjadi di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, apabila di lihat dan pendekatan psikologi agama adalah karena kekeliruan masyarakat dalam memahami nilai-nilai agama, sehingga fungsi-fungsi agama di atas tidak lagi dilaksanakan dengan baik.

⁸⁵ *Ibid*, h. 61

⁸⁶ Jalaluddin, *Psikologi.....*, h. 233-235

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penduduk Indramayu

1. Sejarah Indramayu

Menurut tradisi Indramayu bahwa manusia pertama yang menghuni daerah Indramayu adalah Wiralodra dan purnbantunya yang bernama Ki Tinggil. Menurut Babad Dermayu, sebelum kedatangan kedua orang tersebut wilayah Indramayu masih berwujud hutan belantara. Kalau yang dimaksud dengan Dermayu dalam babad itu adalah tempat yang sekarang bernama desa Dermayu, mungkin berita itu ada benarnya. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah wilayah yang sekarang merupakan daerah jurisdiksi Indramayu, berita itu pasti tidak benar, sebab bertentangan dengan pemberitaan dari beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa sebelum Wiralodra datang ke Indramayu, di beberapa bagian wilayah ini sudah ada manusia yang berbudaya. Menurut Babad Cirebon, pada tahun 1415 M, wilayah Indramayu sudah berpenghuni.⁸⁷

Menurut cerita "*Purwaka Caruban Nagari* " diuraikan bahwa pada tahun 1471 M. Sunan Gunung Jati pernah datang ke desa Babadan dan menikah dengan putri Ki Gede babadan.⁸⁸ Itulah perkawinan Sunan Gunung Jati yang pertama sejak beliau menetap di Cirebon. Sementara menurut *Babad Dermayu*, diuraikan bahwa

⁸⁷ H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesie*, (Bandung: W. Van Hoeve's Graven Haage, 1949), h.80.

⁸⁸ Desa Babadan terletak kurang lebih 3 km dari kota Indramayu, termasuk wilayah Kecamatan Sindang. Dalam berbagai sumber sejarah tardisional tidak pernah disebut-sebut nama desa Babadan di tempat lain, kecuali desa Babadan yang ada di Indramayu. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa desa Babadan yang dimaksud dalam "*Purwaka Caruban Nagari*" itu adalah desa Babadan yang ada di Indramayu. Di perkiraan masa itu desa Babadan terletak di tepi pantai tidak jauh dari pelabuhan Cimanuk, yang pada tahun 1513 M pernah dikunjungi Tome Pires. Desa Babadan saat itu merupakan salah satu jaringan lalu lintas jalan laut.

pada saat Wiralodra datang ke Lembah Cirnanuk, di pulau Emas, yang lokasinya berada di sekitar desa Sentigi (Kecamatan Sindang) sekarang, disana ada sebuah kerajaan yang sangat dikenal oleh rakyat Indramayu sekarang sebagai kerajaan siluman dan yang menjadi rajanya bernama Werdinata. Terlepas dari apakah sikap penduduk pulau emas itu siluman atau manusia biasa, namun yang jelas sumber itu menjelaskan bahwa Sultan Werdinata menikah dengan putri R. Wilarodra bernama Nyi Ratu Inten dan berputra seorang bernama R. Waringin Anom.

Dari berita tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum Wiralodra datang ke Indramayu, selain desa Junti, Babadan dan Lemahabang, juga sudah ada kerajaan yang bernama pulau Emas. Jika ditilik dari namanya "pulau", maka bisa diduga bahwa kerajaan Pulau Emas itu, memang berada di atas pulau, artinya dikelilingi oleh laut. Tetapi dalam peta sekarang Pulau Emas itu sudah tidak ada lagi. Mungkin saja karena pulau itu karena perubahan iklim dan pasang surturnya lautan, telah bersatu dengan desa terdekat seperti Sentigi atau mungkin telah tenggelam oleh lautan yang semakin tinggi.

Melihat bukti-bukti sejarah tersebut di atas, bahwa pada akhir abad ke XVI M, daerah Indramayu sekarang sudah dihuni oleh manusia, bahkan telah dihuni manusia sebelum abad sebelumnya, misalnya zaman kerajaan Taruma Negara yang lokasinya sebelah barat Indramayu. Sampai sejauh ini belum pernah memperoleh fakta yang cukup meyakinkan, namun kemungkinan selalu ada, setelah diketemukannya benda-benda purbakala berupa alat-alat perabotan rumah tangga, alat-alat perang dan perhiasan di beberapa tempat di Indramayu sebelah barat,⁸⁹ yang diduga mempunyai hubungan dengan masa lalu

⁸⁹ Di desa Dermayu telah ditemukan sebuah lumoang terbuat dari batu dengan penumbuk yang juga terbuat dari batu yang masih belum sempurna, sementara dari desa kroya Kecamatan Gabuswetan, ditemukan benda-benda dari dalam tanah, berupa pipisan dari batu, gelang-gelang dari perunggu, manik-manik dan beberapa pahat dari besi yang tidak sempurna pembuatannya,

yang cukup jauh jaraknya, atau setidaknya dengan kerajaan Pajajaran Hubungan daerah Indramayu dengan kerajaan pajajaran, kiranya tak diragukan lagi, sebab banyak sumber sejarah menyebutkan bahwa batas kerajaan Sunda sebelum kedatangan Islam, sampai ke sungai Pamali (Brebes) di sebelah timur-laut sampai ke daerah Banyumas sekarang di sebelah tenggara.

Apakah penduduk Indramayu yang pertama terdiri dari satu suku bangsa ataukah terdiri dari ethnic group? Tidakkah pernah terjadi di daerah Indramayu ini suku-suku bangsa terdesak oleh suku bangsa yang lain, sehingga yang terdesak dibinasakan atau diasimilasikan ke dalam suku bangsa yang datang kemudian? Semua pertanyaan itu masih perlu dicari jawabannya. Namun kita semua tahu bahwa migrasi suku-suku bangsa dari daratan Asia ke kepulauan Nusantara ini terjadi dalam beberapa gelombang. Ini adalah gejala anthropologis, tapi juga merupakan gejala sejarah. Lantas muncul pertanyaan apakah penduduk Indramayu yang pertama termasuk dalam golongan penduduk autochton (asli) ataukah pendatang?

Di tinjau dari sudut pandang geopolitik sekarang, penduduk Indramayu dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni penduduk pesisir dan penduduk pedalaman yang mata pencahariannya berlainan. Penduduk pesisir mata pencahariannya menangkap ikan dan berlayar, sementara penduduk pedalaman sebelum periode javanisasi terdiri dari pahuma (peladang) bukan pesawah, alat-alat yang mereka pergunakan dalam bercocok tanam adalah kujang, patik, beliung, kored dan sadap. Semuanya adalah jenis alat yang biasa dipergunakan untuk bekerja di ladang.⁹⁰ Dalam hubungan ini Wertheim menulis buku *"Indonesian Society in Transition "*, bahwa masyarakat Indonesia lama dibagi dalam tiga tipe, yaitu

beberapa butir besi segi tiga yang diduga bekas peluru bandring. Penemuan tersebut telah dilaporkan pada Team Peneliti Sejarah Indramayu kepada Dinas Purbakala.

⁹⁰ H.A. Dasuki, *Sejarah Indramayu*, (Indramayu: Percetakan dan Toko Buku Sudiam, Cet ke-3, tahun 1960), h. 13.

masyarakat pantai, masyarakat sawah, dan masyarakat ladang. Secara umum disebutkan sebagai contoh masyarakat ladang yakni pedalaman Sumatera dan daerah pedalaman Jawa barat, sedangkan daerah pedalaman Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali termasuk masyarakat sawah.⁹¹

Daerah Indramayu sebelah Tenggara dan sebelah Barat Daya perbatasan dengan daerah Sunda. Apabila meninjau orang Sunda dalam rangka aspek kemanusiaan, jelas sekali bahwa orang Sunda itu sama dengan orang Batak dan orang Lampung, termasuk orang-orang penggembala, penghuni steppa atau savannah. Sang penggembala ini berada di daerah hutan tropis, menunjukkan bahwa orang Sunda bukanlah penduduk autochtoon, melainkan pendatang.⁹² Adapun penduduk pantai, berhubung tidak ada dokumen sejarah mengenai periode sebelum kedatangan Wiralodra, maka kita hanya dapat melihat perkembangan penduduk di pesisir Cirebon.

Demikian pula kiranya perkembangan penduduk pesisir Indramayu pada zaman prasejarahanya. Susunan masyarakat kota Indramayu sekarang yang masa lalunya merupakan masyarakat pelabuhan, masih menggambarkan susunan masyarakat pada masa awal pertumbuhannya. Berhubung dengan itu, dapat kiranya diambil kesimpulan, bahwa penduduk Indramayu yang pertama baik di daerah pantai maupun pedalaman bukanlah penduduk asli melainkan pendatang. Hanya untuk menentukan secara pasti kapan mereka itu datang dan dari mana mereka datang, masih merupakan bahan penelitian, meskipun sudah dapat dipastikan bahwa mereka sebagian besar datang dari daratan Asia seperti Funan; Campa, Vietnam dan lain-lain.⁹³

⁹¹ Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa barat, *Sejarah Jawa Barat Dari Masa Pra-Sejarah Hingga Masa Penyebaran Agama Islam*, (Bandung: Prasaran Saleh danasasmita, Masa baru, 1975), h. 42.

⁹² Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, *Sejarah Jawa Barat Sekitar Permasalahannya*, (Bandung: Prasaran Anwas Adiwilaga, 1975), h. 54.

⁹³ H.A. Dasuki, *Sejarah...*, h. 15.

2. Stratifikasi Sosial Indramayu

Untuk mengetahui gambaran sepintas mengenai corak kehidupan masyarakat Indramayu sejak awal masa kerajaan Islam Demak dan Cirebon, stratifikasi sosial yang ada adalah:

a. Golongan Bangsawan

Golongan bangsawan ini memiliki status yang tinggi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Tidak heran kalau golongan bangsawan (aristokrat) merupakan golongan yang banyak mendapatkan penghasilan, misalnya dari pajak, beacukai, upeti, hadiah-hadiah yang diterima dari beberapa negara asing, hasil tanah yang dikerjakan oleh rakyatnya dan dari sumber-sumber lain.⁹⁴

b. Golongan Elit

Golongan elit ini dipandang golongan yang memiliki kedudukan tinggi karena pekerjaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini meliputi; golongan aristokrat, tentara, keagamaan, pedagang (pengusaha) dan plotokrasi.⁹⁵ Mereka tergolong elit dengan segala macam coraknya, seperti elit politik, elit birokrasi, elit keamanan dan pedagang itu jumlahnya hanya sedikit jika dibanding dengan rakyat umum.

Golongan elit ini adalah golongan yang membedakan dirinya dengan masyarakat umum, bukan hanya karena ekonominya yang lebih tinggi, melainkan corak serta gaya hidup mereka dalam berpakaian, berbahasa, cara berumah-tangga dan sebagainya sangatlah jauh berbeda dengan golongan biasa. Biasanya mereka hidup berkelompok menurut jenisnya (exclusive). Golongan elit pedagang asing yang beragama Islam (Arab, Parsi, Turki dan lain-lain) mengelompok dalam satu tempat. Di Indramayu mereka mengelompok di daerah Indramayu bagian Barat Cimanuk, yaitu

⁹⁴ Sartono Kartodirjo, Marwati Juned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Grafitas, Departemen P & K, 1975), h. 81

⁹⁵ Pernadi Purbacaraka, *Syahbandar in the Aechipelago*, JSAH, Vol. II no. 2, Juli 1961, h.187.

Sindang (Dermayu), sedang yang tidak beragama Islam misalnya Cina, mengelompok di sebelah Timur Cimanuk yaitu jalan Pecinan lama.⁹⁶

c. Golongan Non Elit

Pada saat itu golongan non elit ini mencapai 80 % dan golongan elit mencapai 20 % dari jumlah masyarakat Indramayu, mereka tersebar di segenap pelosok wilayah Indramayu dengan beragam corak penghidupannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam dialek Indramayu mereka disebut *wong cilik* (orang kecil). Sementara golongan elit, terutama golongan elit birokrat disebut *"wong gede"* (orang besar).

Dilihat dari corak penghidupannya, golongan non elit di bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: golongan pedagang, golongan petani (merupakan kelompok mayoritas mencapai 70-80 % dari jumlah masyarakat Indramayu), golongan nelayan, golongan tukang dan pengrajin, golongan tentara, agama dan - fungsional, dan golongan budak.⁹⁷ Sampai sekarang kesenjangan sosial itu begitu nampak dan jelas antara golongan elit dengan golongan non elit.

3. Potensi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

a. Letak Geografis Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Berbicara mengenai letak geografis, kecamatan Sliyeg merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah sepanjang 6. 235,828 Ha atau 6. 235 KM 2. Terdiri dari tanah pemukiman seluas 756. 426 Ha, tanah pertanian seluas 5. 425.015 Ha dan tanah perkebunan seluas 35.250 Ha. Curah hujan yang ada di wilayah ini terbilang jarang bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Propinsi Jawa Barat, misalnya Bandung, Bogor, Sumedang dan lain-lain. Di kecamatan Sliyeg memiliki curah hujan rata-rata pertahun mencapai 898 mm atau 2.494 mm

⁹⁶ H.A. Dasuki, *Sejarah... h.* 13 6.

⁹⁷ *Ibib*, hlm. 138-145.

pertahun.⁹⁸ Kecamatan Sliyeg ini dibilang daerah yang memiliki topografi tanah dengan dataran rendah mencapai 100 %. Dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Indramayu, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Jatibarang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketasemaya, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Juntinyuat.

Dengan wilayah yang cukup luas serta memiliki 16 desa yang ada, berdasarkan sensus penduduk tahun 2001 wilayah kecamatan Sliyeg dihuni oleh 34.977 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 34.548 berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian jumlah total penduduk kecamatan Sliyeg secara keseluruhan berjumlah 69.548 jiwa, semuanya merupakan penduduk asli (pribumi). Kepadatan penduduknya mencapai 86,37 jiwa per km² atau dengan jumlah kepala keluarga mencapai 20.917 orang.⁹⁹ Berdasarkan struktur pemerintahan yang ada, kecamatan Sliyeg memiliki jumlah wilayah bawahan, yakni 16 desa dan 313 Rukun Tetangga. Disamping itu juga, memiliki cabang dinas atau instansi pemerintahan yang ada yaitu: satu buah Dinas P & K, satu buah KCD Pengairan, satu buah Balai Penyuluh Pertanian, dua buah PUSKESMAS, satu buah statistik, satu buah PLKB, dan satu buah KUA.¹⁰⁰

Di samping itu, perlu juga dikemukakan di sini mengenai hasil PEMILU tahun 1999 yang lalu, dari jumlah penduduk kecamatan Sliyeg 68.236 jiwa yang berhak memilih mencapai 38.999 di 97 TPS yang ada. Adapun dari 48 Partai Politik yang masuk di Kecamatan Sliyeg yang memperoleh peringkat lima besar adalah: PDI Perjuangan 18.817 suara, GOLKAR 7.719 suara,

⁹⁸ Sumber ini diambil dari Data Informasi Potensi Wilayah di Kecamatan Sliyeg Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kantor Camat Sliyeg, tahun 2001, h. 1.

⁹⁹ *Ibid*, h. 2.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 3.

PKB 4.689 suara. PPP 1.464, dan PAN 1.097 suara.¹⁰¹

b. Perekonomian di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Kondisi perekonomian masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat sebagai sumber penghidupan mereka. Karenanya harus ada kesesuaian antara pemilik tanah dengan buruh atau penggarap. Data statistik telah menunjukkan mengenai jumlah petani menurut statusnya, meliputi sebagai berikut: pemilik tanah sebanyak 6.090 orang, penggarap tanah sebanyak 6.185 orang, dan kuli atau buruh tani sebanyak 12.450 orang. Bila di buat rata-rata, maka kepemilikan tanah setiap petani mencapai 0, 10 Ha per petani. Dengan hasil produksi mencapai; padi 7 ton per tahun, palawija 26.50 per tahun, sayur-mayur 50.15 per tahun dan buah-buahan mencapai 16.10 per tahun.¹⁰²

Di samping itu, di kecamatan Sliyeg sendiri memiliki pasar sebagai sarana berbelanja atau pusat jual beli. Bahkan setiap desa memiliki pasar masing-masing disebut dengan pasar desa. Sarana dan prasarana yang ada meliputi lima buah pasar desa, dua buah Bank dan lembaga Perkreditan yakni BRI dan LPK atau lebih dikenal dengan BKPD, dua buah Koperasi Unit Desa (KUD) dengan beranggotakan 1.500 orang, satu buah Koperasi Pegawai Negeri dengan beranggotakan 650 orang dan satu buah koperasi pensiunan dengan beranggotakan 90 orang.¹⁰³

c. Pendidikan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Berbicara mengenai persoalan pendidikan, tidak lepas dari upaya semua pihak untuk membantu terlaksananya pendidikan, agar tidak terjadi kesenjangan. Karenanya upaya ini harus dilakukan dari mulai tingkat desa sampai tingkat Kabupaten. Di Indramayu sendiri, masalah pendidikan ini terbilang terbelakang bila dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang ada, telah menunjukkan bahwa kondisi pendidikan

¹⁰¹ *Ibid*, h. 5

¹⁰² *Ibid*, h. 10.

¹⁰³ *Ibid*, h. 13.

yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

- Mutu pendidikan rendah, SD atau MI mencapai 6,48, SLTP atau MTs mencapai 4,91 dan SMU/SMK/MA mencapai 3,94.
- Partisipasi masyarakat rendah, tingkat SD/MI mencapai 94,11 %, SLTP/MTs mencapai 53,14 % sedang SMtJ/SMK/MA mencapai 20,38 %.
- Angka Drop Out (DO) cukup tinggi, SD/MI mencapai 0,70 %, SLTP/MTs mencapai 2,22 %, SMU/SMK/MA mencapai 2,33%.
- Angka melanjutkan rendah, dari SD/MI ke SLTP/MTs mencapai 75,69 %, dan dari SLTP/MTs ke SMU/SMK/MA mencapai 61,36%. - Angka lama belajar masyarakat rendah, mencapai 3,8 tahun.
- Kurangnya pemberdayaan Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten.
- Stakeholder bidang pendidikan belum siap dengan paradigma baru yaitu MBS dan MBM.
- Sementara itu masalah pendidikan yang sedang di alami wilayah Indramayu selama ini adalah:
- Kurangnya tenaga pengajar baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- Masyarakat miskin begitu banyak, mencapai 51 % sehingga masyarakat tidak mampu lagi untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
- Political will pemerintah disemua tingkatan kurang memadai.
- Program MBS dan MBM belum optimal.
- Kurangnya profesionalisme para Kepala Sekolah dan Guru.
- Kurangnya kesejahteraan guru.

Dengan demikian, apabila persoalan-persoalan di atas ditangani secara serius dan sungguh-sungguh, maka akan terwujud

sesuai dengan visi Kabupaten Indramayu yakni, "terwujudnya masyarakat Indramayu yang religius, tangguh dan sejahtera dalam suasana kehidupan yang aman dan damai serta tatanan yang makmur lestari dan mandiri"¹⁰⁴ Sementara itu, saat ini di Kecamatan Sliyeg terdapat beberapa sarana pendidikan antara lain: 8 buah Taman Kanak-Kanak, 47 buah lokasi SD Negeri atau Inpres, 1 buah Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN), 5 buah Madrasah Ibtida'iyah Swasta, 1 buah MTs Negeri, 4 buah Mts swasta, 3 buah SLTP Negeri, dan 1 buah Sekolah Menengah Umum (SMU).¹⁰⁵

d. Sosial Keagamaan di Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu

Menurut catatan sejarah, sebelum agama Islam masuk ke Indramayu, rakyat Indramayu beragama Hindu atau Budha. Kepercayaan agama Hindu berintikan kepada "Tuhan Trimurti", yakni Brama, Wisnu, dan Siwa dengan sistem kasta yang terkenal, yaitu Brahmana, Kesatria, Wesya dan Paria. Sedang agama Budha berintikan kepada kepercayaan bahwasanya hidup ini "samsara", yakni kepedihan dan penderitaan.

Asal samsara adalah dari mula kejadian manusia harus melalui jalan itu baik dalam hidup sekarang, maupun dalam hidupnya sebagi penjelmaan (reinkarnasi). Kebenaran mengenai samsara itu harus melenyapkan hawa nafsu. Jalan yang harus ditempuh dalam hidup adalah delapan asta atau "asta sila", yaibu: 1) keyakinan yang lurus, 2) kemauan yang lurus, 3) berbicara yang lurus, 4) perbuatan yang lurus, 5) hidup yang lurus, 6) ingatan yang lurus, 7) pikiran yang lurus, dan 8) semedi adalah jalan yang terpendek untuk mengatasi samsara.

Sebelum agama Hindu datang di Indramayu, penduduk Indramayu menganut kepercayaan "animisme dan dinamisme",

¹⁰⁴ Sumber informasi ini di ambil di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Kabupaten Indramayu tahun 2001.

¹⁰⁵ Informasi Potensi Wilayah... h. 16.

yang berintikan pemujaan kepada arwah para leluhur. Meskipun sudah terjadi beberapa pertukaran agama, namun sisa-sisa kepercayaan yang lebih dulu datang telah menjadi tradisi masyarakat, masih berpengaruh terhadap tata hidup keagamaan serta kebudayaan masyarakat Indramayu, misalnya kebudayaan *fetisjisme* yaitu pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap berisi "semangat", seperti batu, keris dan sebagainya.

Masuknya agama Islam yang di bawa oleh Sunan Gunung Jati, telah membuka cakrawala baru dalam sejarah di Jawa Barat, khususnya di Indramayu. Sehingga dapat menciptakan susunan masyarakat yang lestari hingga sekarang dengan segala aspeknya, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.¹⁰⁶ Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa masyarakat Indramayu secara menyeluruh sekarang ini rata-rata menganut agama Islam. Termasuk juga di kecamatan Sliyeg. Berdasarkan data yang ada, dari jumlah penduduk 69.525 jiwa, berjumlah 69.493 (atau 99,96 %) beragama Islam dan 32 orang (atau 0,04 %) beragama Katolik.

Adapun jumlah sarana peribadatan yang ada yakni 20 buah Masjid dari 16 desa yang ada, 225 buah langgar atau mushalla, dikarenakan tiap-tiap desa memiliki mushalla atau langgar lebih dari 5 buah. Bahkan satu desa memiliki langgar atau mushalla mencapai 17 buah. Ini menunjukkan bahwa keberagamaan masyarakat kecamatan Sliyeg begitu hidup dan semarak karena di landasai dengan nilai-nilai agama (religius). Hal ini juga tidak lepas dari adanya pengaruh lembaga pendidikan non formal, yang ada di kecamatan Sliyeg, seperti: ada 4 buah Pesantren, 18 buah Madrasah dan 29 Majelis Ta'lim. Tidak kalah pentingnya juga, adanya pengaruh lembaga pendidikan atau pesantren dari luar kecamatan Sliyeg, yang menyekolahkan putra-putrinya di luar Indramayu. Dari sinilah terjadi akulturasi kebudayaan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

¹⁰⁶ H.A. Dasuki, *Sejarah...* h. 23-24, 31.

B. Bentuk Konflik: Kerusuhan Antar Desa di Kecamatan Sliyeg

Fenomena kekerasan sudah berkembang sedemikian rupa dan telah menembus alam budaya masyarakat Indonesia. Winaryo mengutip pendapat Montagu dan Matsan berkaitan dengan kekerasan dalam konflik di masyarakat sebagai berikut: *"This contemporary, vague-wich has been variously labeled terrorist chick, cruelty cult, and just plain punk, is not limited to the movie but runs like a crimson thread throught the realm of popular culture all the way..."*¹⁰⁷

Akhir-akhir ini tindakan kekerasan akibat konflik yang terjadi di masyarakat, marak diberbagai daerah di Indonesia misalnya, di Ambon (Maluku), Irian Jaya (Papua), Aceh, Poso, termasuk di daerah Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Menurut Winaryo kekerasan yang dilakukan oleh massa tertentu di Indonesia, dapat dipandang sebagai seni mereka dalam menyelesaikan persoalan konflik yang ada. Dalam pada itu derivasi atau pembenaran diri atas tindakan yang dilakukan oleh massa adalah menjustifikasi hukum positif yang ada sebagai konstitusi yang tidak dapat dipercaya lagi.

Penilaian semacam ini terkait dengan persoalan-persoalan umum seperti ketimpangan sosial, ekonomi, budaya, ketidakadilan politik, dan sektarianisme ideologi kehidupan semata, namun juga dalam masalah-masalah yang sifatnya individual. Terkait dengan upaya mengkritisi fenomena kekerasan semacam, tentu masih perlu dipertanyakan lagi, betulkah hukum kita telah menjadi semacam "black goats".¹⁰⁸ Bila dicermati dari pemberitaan melalui massmedia (Koran, majalah, surat kabar, tabloid dan lain-lain) maupun pemberitaan melalui TV atau radio, tampilan kekerasan atau kebrutalan massa dalam serial konflik dari waktu

¹⁰⁷ Ashley Montagu and Floyd Matson, *The Dehumanization of Man*, (New York: McGraw Hill Book Company, 1983), h. 153.

¹⁰⁸ Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, *Atasi Konflik Etnis*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama bekerja sama dengan Gharba dan UPN Veteran, 2001), h. 6.

ke waktu semakin menghadirkan aneka bentuk dan gaya. Kadangkala mempresentasikan kecenderungan karakter baru dan memiliki tema atau motif yang sangat lebar. Kerusuhan massa yang terjadi di wilayah Kecamatan Sliyeg akhir-akhir ini merupakan rangkaian peristiwa yang mirip dengan kejadian-kejadian di kota-kota besar. Misalnya pembakaran rumah, penjarahan toko, intimidasi dan lain-lain yang bisa membuat orang takut. Berikut ini deskripsi rangkaian peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Sliyeg dari tahun 1997 sampai tahun 2001.

1. Pada tanggal 28 April 1997, terjadi kerusuhan antara desa Gadingan dengan desa Tugu. Peristiwa kerusuhan itu terjadi berawal dari sebuah hiburan "*tarling dangdut*" di desa Mekargading. Dari situ terjadilah kerusuhan hebat yang mengakibatkan luka-luka dari kedua desa yang bertikai, antara lain 10 orang luka berat dan 15 orang luka ringan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai tersebut, dilakukan perundingan dan pembuatan surat pernyataan dengan di tandatangani oleh Kepala desa masing-masing.
2. Pada tanggal 30 Mei 1997, kerusuhan terjadi antara desa Sudimampir dengan desa Tugu. Peristiwa itu bennula dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda Sudimampir terhadap pemuda desa Tugu yang hendak pulang ke desanya. Akibat dari peristiwa itu, maka terjadilah kerusuhan massal antara kedua desa dengan mengakibatkan sedikitnya 10 orang luka berat, 25 orang luka ringan dan satu buah mesin penggiling padi di bakar massa. Upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kejadian itu, dengan mengadakan perundingan antara kedua kelompok yang berseteru dan masing-masing diwakili oleh kepala desa beserta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Hasil yang dicapai adalah penandatanganan damai yang dilakukan oleh peserta runding tadi.

3. Pada tanggal 25 September 1997, terjadi kerusuhan massal antara desa Sliyeg Lor dengan desa Majasih. Kerusuhan itu terjadi berawal dari hiburan "*Sandiwara Cablek*" di desa Majasih. Akibat yang diderita dari kerusuhan itu mengakibatkan 10 orang luka berat, 13 orang luka ringan dan sedikitnya 23 rumah rusak di serang massa. Kerugian materi yang diderita akibat kerusuhan massal itu diperkirakan mencapai Rp 700. 000.000. Upaya damai yang dilakukan untuk meredam peristiwa kerusuhan tersebut adalah mengadakan perundingan dan penandatanganan oleh pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing kepala desa yang warganya terlibat langsung dalam kerusuhan itu.
4. Pada tanggal 31 Mei sampai 2 juni 1998, terjadi kerusuhan massal antara desa Sliyeg Lor dengan desa Majasih babak ke-2. Kerusuhan tersebut berawal dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda desa Majasih terhadap pemuda desa Sliyeg Lor. Akibat dari kerusuhan itu. mengakibatkan satu orang meninggal dunaia dari desa Sliyeg Lor, 1 S orang mengalami luka berat dan 25 orang luka ringan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah timbulnya kerusuhan lagi, diadakan perundingan dan membuat surat pernyataan dengan ditandatangani oleh kepala desa masing-masing yang warganya terlibat kerusuhan.
5. Pada tanggal 9 sampai 16 Oktober 1998, kerusuha itu kembali terjadi antara desa Tugu dengan desa Sudimampir, babak ke-2. Kerusuhan itu terjadi di lokasi hiburan "*Tarling Dangdul Cahaya Muda*" di desa Sudimampir. Akibat dari kerusuhan massal itu, menelan korban 1 orang meninggal dunia, 10 orang mengalami luka berat dan 25 orang mengalami luka ringan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah supaya kerusuhan tidak kembali terjadi adalah mengadakan

perundingan dan membuat surat pernyataan dengan ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa yang bertikai, dalam hal ini diwakili oleh kepala desa masing-masing dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat.

6. Pada tanggal 6 Desember 1998 menjelang hari raya I'dul Fitri. Kerusuhan terjadi lagi antara desa Sleman Kecamatan Sliyeg dengan desa Bulak Kecamatan jatibarang. Kerusuhan itu bermula dari hiburan di *Banjar* di desa Bulak. *Banjar* adalah komplek pemakaman leluhur desa Bulak yang dijadikan ajang hiburan oleh masyarakat setempat. Biasanya hiburan itu diadakan ketika menjelang hari raya I'dul Fitri dan hari raya I'dul Adha (Qurban). Kerusuhan massal itu tidak menelan korban dari kedua belah pihak yang bertikai, namun demikian upaya damai tetap diakukan untuk mencegah kerusuhan supaya tidak terulang lagi. Upaya itu berupa mengadakan perundingan serta membuat surat pernyataan dengan ditandatangani oleh kepala desa masing-masing dan disaksikan aparat pemerintah tingkat Kecamatan.
7. Pada tanggal 3-5 Aril 2000, terjadi kerusuhan massal antara desa Sliyeg dengan desa Gadingan. Kerusuhan itu terjadi bermula dari pasar *sapton* di desa Sliyeg. Tidak tahu alasannya, beberapa pemuda dari kedua desa tersebut berkelahi di pasar. Tidak hanya sampai disitu, nampaknya dampak dari perkelahian itu memicu kerusuhan massal yang mengakibatkan 2 orang mengalami luka berat dan 5 orang mengalami luka ringan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusuhan itu, perwakilan dari kedua aparat desa mengadakan perundingan damai dengan sama-sama menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan kerusuhan lagi.
8. Pada tanggal 12-15 April, kembali terjadi kerusuhan massal antara desa Sleman dengan desa Tambi. Kerusuhan itu

bennula dari tontonan *organ tunggal* yang digelar di desa Sleman. Akibat dari kerusuhan itu, mengakibatkan 3 orang mengalami luka berat dan 10 orang luka ringan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusuhan itu, perwakilan dari kedua desa yang bertikai mengadakan perundingan damai dengan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulagi lagi.

9. Pada tanggal 27 Desember 2000 sampai 4 Januari 2001, kembali terjadi kerusuhan massal antara desa Gadingan dengan desa Tugu. Kerusuhan itu disebabkan adanya unsur penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda desa Tugu terhadap pemuda desa Gadingan. Akibat penganiayaan tersebut, pemuda desa Gadingan marah dan ingin membalasnya. Namun apa yang terjadi, maka terjadilah kerusuhan hebat antar kedua kubu itu. Peristiwa itu terjadi menjelang satu hari sebelum lebaran 1'dul Fitri dan setelah 1'dul fitri tahun 2001. Kerusuhan ini termasuk yang paling besar, karena banyak menelan kerugian dari kedua belah pihak, baik kerugian materi maupun non materi. Akibat dari kerusuhan itu 8 orang mengalami luka berat dan 15 orang mengalami luka ringan. Disamping itu, kerusakan terjadi pada sawah, kebun, pekarangan hancur luluh, beberapa becak di bakar massa, serta 17 rumah penduduk desa Gadingan dibakar habis. Kerugian akibat kerusuhan itu mencapai Rp. 200 Juta. Upaya damai yang dilakukan pemerintah desa adalah mengadakan perundingan dan menandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak yang bertikai untuk tidak terjadi kerusuhan lagi, sambil di saksikan oleh anggota BPD dari kedua desa yang bertikai.¹⁰⁹ Di samping itu, masih ada kerusuhan-kerusuhan

¹⁰⁹ Sumber kerusuhan ini diambil dari Data Tawuran Tahun 1997 sampai dengan Januari Tahun 2001, di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Di sampan itu, diperkuat wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah ini, antara lain: Bapak Sekretaris Kecamatan Sliyeg, Bapak Mukmin (sekretaris desa

lain antara lain; tanggal 27-28 Juni 2000, antara desa Majasih dengan desa Semirang Kecamatan Jatibarang. Dan tanggal 14-15 Januari 2001, antara desa Tambi dengan desa Sleman. Kedua kerusuhan itu, menurut hemat penulis tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah cukup mewakili dari kerusuhan-kerusuhan yang telah dikemukakan di atas.

C. Desa Rawan Konflik dan Desa Tidak Rawan Konflik

1. Desa Rawan Konflik

Menurut Johnson, konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju pada penciptaan keseimbangan sosial. Veeger mengatakan bahwa melalui proses tawar-menawar konflik dapat membantu terciptanya tatanan baru dalam interaksi sosial sesuai dengan kesepakatan bersama atau secara demokratis. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik sampai batas tertentu dapat juga dipakai sebagai alat perekat kehidupan masyarakat.

Konflik sosial menjadi tidak lumrah dan menjadi sumber biang malapetaka dan kehancuran kehidupan bermasyarakat ketika disertai dengan tindakan anarkhis dan kebrutalan seperti yang terjadi di penghujung kehancuran Orde baru dan diawala masa reformasi. Apalagi akhir-akhir ini konflik sosial yang terjadi diwarnai dengan agresivitas membabi-butakan ditandai dengan tindakan yang melampaui batas-batas perikemanusiaan disertai dengan kekerasan. Saling bunuh, saling bakar, saling rusak dengan cara-cara yang sadis yang terjadi di masyarakat. Konflik sosial semakin tidak patut karena sudah menuju ke bentuk kekerasan

Sliyeg), Bapak Edi Wahyudi (kepala desa Sliyeg Lor), Bapak Etuyanto (kepala desa Majasih), Bapak Sumitro (sekretaris desa Gadingan), Ibu Sutari (sekretaris desa Tugu Kidul), Bapak Sufyan Tsauri (lebe desa Tugu Lor), Bapak Surip (sekretaris desa Sudimampir), Bapak Keli (sekretaris desa Sudikampiran), dan Bapak Hartato (modin desa Longok). Hasil wawancara dengan tiap-tiap desa, sesuai dengan data yang ada di Kecamatan Sliyeg.

sosial di hampir lapisan masyarakat.

Kondisi semacam itulah telah terjadi di wilayah Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu. Tentu dengan latar belakang, obyek maupun subyek yang berbeda, penulis mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Kecamatan Sliyeg adalah Konflik Sosial Keagamaan. Ada beberapa alasan mengapa penulis memasukkan kerusuhan massal itu sebagai konflik sosial keagamaan yakni: 1) masyarakat yang bertikai adalah sesama Muslim, 2) latar belakang budaya mereka dilandasi dengan nilai-nilai agama (simbol-simbol agama) yang sama, 3) menggunakan unsur-unsur mitis untuk membentengi diri dari serangan lawan (misalnya, kekebalan dan kesaktian), dan 4) sama-sama memiliki sikap fanatisme beragama yang kuat.

Memperhatikan hal di atas, berdasarkan data yang ada bahwa diantara 16 desa yang ada di Kecamatan Sliyeg, yang sering terlibat dalam kerusuhan massal (atau desa rawan konflik) adalah desa Tugu, desa Sudimampir, desa Gadingan, desa Majasih dan desa Sliyeg, termasuk juga desa Tambi dan Sleman. Sedangkan desa yang tergolong tidak rawan konflik adalah desa Longok dan desa Sudikampiran.¹¹⁰

Jika dianalisis secara jernih, berdasarkan pandangan umum ada beberapa alasan mendasar mengapa konflik atau kerusuhan antar desa itu sering terjadi; 1) akibat banyaknya pengangguran, 2) rendahnya pendidikan, 3) lunturnya nilai-nilai agama, 4) adanya kesenjangan sosial 5) lemahnya hukum dan 6) dendam sejarah masa lalu.

2. Desa Tidak Rawan Konflik

a. Desa Longok

Desa Longok merupakan desa paling Utara yang berbatasan dengan desa Kecamatan Lohbener. Desa Longok ini termasuk desa yang tidak rawan konflik; meskipun persoalan umum persis sama

¹¹⁰ Data ini diambil dari Data Tawuran tahun 1997 sampai dengan Januari tahun 2001 di kecamatan Sliyeg, tertanggal 3 Februari 2001, mengetahui Camat Sliyeg (saat itu) Bapak Drs. Daddy Tarsatiadi.

dengan desa yang rawan konflik, seperti telah disebut di atas. Namun menurut Hartato salah satu aparat desa Longok menyebutkan, ada beberapa alasan mengapa desa Longok jarang terjadi kerusuhan.

- Berdasarkan wilayah, desa Longok merupakan desa terpencil dan terpisah jauh oleh sawah sehingga tidak terpengaruh oleh desa yang sering konflik.
- Tokoh masyarakat dan pemerintah desa masih disegani.
- Adanya program pembinaan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, remaja Masjid dan karang taruna.
- Adanya tim keamanan masyarakat.
- Kesadaran masyarakat cukup tinggi dalam menghalau konflik¹¹¹

b. Desa Sudikampiran

Desa Sudikampiran, sebagaimana desa Longok, desa yang termasuk tidak rawan konflik. Menurut Bapak Keli, salah seorang aparat desa Sudikampiran mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa desa Sudikampiran jarang terjadi kerusuhan antara lain;

- Adanya program pembinaan masyarakat oleh pemerintah desa mengenai ketertiban dan keamanan (KADARKUM).
- Adanya program pembinaan terhadap masyarakat, remaja Masjid dan karang taruna.
- Pemerintah dan tokoh masyarakat masih disegani.
- Kesadaran masyarakat akan bahaya kerusuhan.
- Desa Sudikampiran termasuk desa perbatasan dengan desa lain dan berdekatan dengan POLSEK Sliyeg.¹¹²

Alasan-alasan inilah yang menyebabkan desa Longok dan desa Sudikampiran tergolong desa tidak rawan konflik, meskipun secara umum kedua desa itu menghadapi persoalan yang sama

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hartato, jabatan *modin* pada tanggal 15 Juli 2002.

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Keli, (sekretaris desa Sudikampiran) pada tanggal 17 Juli 2002.

dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

D. Akar Konflik dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Mengingat masyarakat Indramayu khususnya di kecamatan Sliyeg merupakan daerah agraris, maka ada beberapa kemungkinan sumber atau akar konflik yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Iklim yang panas

Dikatakan bahwa bisa jadi iklim yang panas membuat orang semakin beringas, mudah tersinggung, dan cenderung berbuat kasar dan jahat. Analisis semacam ini barangkali dapat dipahami meskipun perlu pembuktian secara kausalistik.

2. Watak, sifat manusia yang keras

Hipotesis ini justeru berkaitan dengan dalam diri manusia sendiri. Artinya kekerasan itu ada di dalam dirinya sebelum akhirnya keluar dalam bentuk yang konkrit. Menurut Thomas Hobbes dan J.J. Rousseu apakah dalam dirinya manusia itu jahat atau baik. Hobbes memandang manusia mempunyai kecenderungan egois, anarkhis, dan destruktif. Sementara menurut Rousseu bahwa manusia lebih positif; pada dirinya tidak egois dan tidak altruis, hanya rantai peradabanlah yang membuat manusia berubah menjadi buruk.

3. Kesenjangan Sosial

Analisis ini harus menyentuh sistem atau struktur yang menyebabkan, mendorong dan memicu orang bertindak keras. Menurut Lewis Coser kekerasan menjadi tanda yang paling jelas dan paling efektif bahwa dalam sistem sosial, ekonomi, politik, dan hukum terdapat ketimpangan yang serius dan mendasar, karenanya harus diperbaiki. Adanya persoalan-persoalan mendasar itu dapat kita lihat banyaknya pencurian, perampasan, penodongan, pembegalan, penjarahan yang disertai tindakan kekerasan. Tindak kekerasan itu didorong oleh situasi ekonomi yang sulit-menjepit, yang tidak memberi ruang untuk mencari nafkah dengan cara yang wajar dan terpaksa menempuh jalan

pencurian, perampasan. Namun situasi sekarang ini semakin runyam karena kerusakan yang terjadi sering bercampur dengan motif politis dan SARA. Artinya, orang atau massa melakukan kerusakan dan pembakaran tidak semata-mata ingin menjarah barang, tetapi ingin menciptakan ketidakamanan pada skala lokal dan nasional.¹¹³

4. Sikap Keagamaan Menyimpang

Meredith Mc Guire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos dan agama.¹¹⁴ Dalam pandangan psikologi agama, sumber konflik juga diakibatkan adanya sikap keagamaan yang menyimpang. Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertindak laku. Norma-norma tersebut mengacu pada pencapaian nilai-nilai yang mengacu kepada pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dalam upaya memenuhi kepatuhan kepada Zat Yang Supernatural. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak terjadi penyimpangan.

Sikap keagamaan yang menyimpang terjadi bila sikap seseorang terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya mengalami perubahan. Perubahan sikap seperti itu dapat terjadi pada setiap orang, pada kelompok maupun masyarakat. Perubahan sikap itu memiliki tingkat kualitas dan intensitas, ada yang positif dan ada juga yang negative.¹¹⁵

Kasus-kasus sikap keagamaan yang menyimpang misalnya ditunjukkan dengan sikap kurang toleran, fanatisme, fundamentalisme, maupun sikap menentang atau memberontak, sikap regresif maupun demonstartif Sikap menyimpang seperti ini

¹¹³ Marshana Windhu, "Dimensi Kekerasan, Tinjauan Teoritis", dalam Franz Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 21-24.

¹¹⁴ Meredith Mc Guire, *Religion: The Social Context*, (California: Wadworth, Inc., 1984), h. 115.

¹¹⁵ Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*, (Jakarta: Balai Alsara Yudhistira dan Saadiyah, 1982), h. 17.

umumnya terjadi pada setiap individu maupun kelompok pada tiap-tiap agama. Hal ini barangkali yang terjadi di kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Menurut Kasmiran Wuryo, selain dalam bentuk kelompok, sikap keagamaan yang menyimpang juga terjadi pada orang per orang. Biasanya sikap keagamaan dalam bentuk kelompok aliran atau sekte biasanya berawal dari pengaruh sikap seorang tokoh. Seorang yang mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan dan keyakinan orang lain, sebageian dari tingkat pikir yang transenden.¹¹⁶

5. Adanya Prasangka

Prasangka di sini diartikan sebagai sikap terhadap anggota kelompok masyarakat, etnis atau ras tertentu, yang terbentuk terlalu cepat tanpa suatu induksi. Menurut Gordon Allport ada lima pendekatan dalam menentukan terjadinya prasangka.

a. *Pendekatan Historis*, pendekatan ini didasarkan atas teori pertentangan kelas, yaitu menyalahkan kelas rendah yang inferior, sementara golongan kelas atas mempunyai alasan (justification) untuk berprasangka terhadap kelas rendah. Antara penjajah dan yang dijajah, antara tuan dan budak dan antara pribumi dan nonpribumi.

b. *Pendekatan Sosiokultural dan Situasional*

Pendekatan ini menekankan pada:

- Mobilitas sosial: artinya kelompok orang yang mengalami penurunan status sosial.
- Konflik antar kelompok: dalam hal ini prasangka merupakan realitas dari dua kelompok yang bersaing, tidak selalu disebabkan oleh kondisi ekonomi.
- Stigma perkantoran: diartikan bahwa ketidakamanan atau ketidakpastian di kota disebabkan oleh noda yang dilakukan oleh kelompok tertentu.
- Sosialisasi: prasangka dalam hal ini muncul sebagai

¹¹⁶ Kasmiran Wuryo dan Ali Sjaifiillah, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 1982), h. 104.

basil dari proses pendidikan orang tua atau masyarakat di sekitarnya, mulai proses sosialisasi mulai kecil hingga dewasa.

- c. *Pendekatan Kepribadian*. Teori ini menekankan pada faktor kepribadian sebagai penyebab prasangka, disebut dengan teori "frustasi agregasi". Frustasi muncul dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh atasan (status yang lebih tinggi), yang tidak mungkin untuk melawan mereka atau sikap (authoritarian personality).
- d. *Pendekatan Fenomenologis*. Pendekatan ini menekankan bagaimana individu memandang atau mempersepsikan lingkungannya, sehingga persepsi yang menyebabkan prasangka.
- e. *Pendekatan Naive*. Pendekatan ini menyatakan bahwa prasangka lebih menyoroti pada obyek prasangka, dan tidak menyoroti individu yang berprasangka.¹¹⁷

Ini adalah persoalan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dengan kompleksitas permasalahan menumpuk menjadi satu sehingga mudah menyulut konflik atau kerusuhan antar desa atau antar kelompok masyarakat. Akibat dari konflik yang terjadi serta mengetahui sumber-sumbernya; dampaknya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu antara lain: perekonomian (pasar) tidak lancar, sarana transportasi tidak jalan, proses belajar mengajar terhenti, secara psikologis keamanan dan kenyamanan warga terganggu, proses sosialisasi tidak lancar, dan kegiatan rutinitas sehari-hari terganggu. Demikianlah adanya, ketika kerusuhan massal itu terjadi.

E. Upaya Penanganan Konflik

Kemunculan konflik antar kelompok masyarakat tidak dipicu oleh sebab-sebab yang berdiri sendiri. Oleh karena itu,

¹¹⁷ Gordon W. Allport, *The Nature of Prejudice*, (New York: Doubleday Anchor Books, Garden City, 1958). Dalam Munandar Soelaeman MS. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, Edisi Revisi, 1992), h. 237-239.

untuk mengatasi konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu perlu dilakukan penelaahan seksama, sehingga benar-benar mengenai akar masalahnya. Hal ini penting agar tindakan penanganan tidak sekedar menghilangkan gejala saja. Menyelesaikan secara menyeluruh terjadinya konflik terutama pasca kerusuhan amat penting demi penyelesaian yang langgeng. Menurut Hendropuspito, penanganan konflik antar kelompok masyarakat sesama agama semacam ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata latin *conciliatio* atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap baik kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya.

2. Mediasi

Mediasi berasal dari kata latin *mediutio* yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan perantara (mediator). Dalam hal ini seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat dan hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa itulah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Umumnya konsiliator berasal dari pihak yang masih ada kaitan fungsi ikatan struktural (berkewajiban) bagi pihak yang bersengketa, dalam hal ini pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Sedangkan mediator berasal dari pihak-pihak yang tidak punya hubungan ikatan fungsi struktural, seperti LSM, yang penting mediator punya citra baik (netral) bagi pihak yang bersengketa. Dan tingkat kepedulian masyarakat yang tidak

terlibat konflik sangat besar peranannya dalam menangani konflik.

3. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata latin *arbitrium* artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang Arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus dipatuhi. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu ia dapat naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Biasanya cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan atau pertandingan. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit. Di era Orde Baru cara-cara ini dilakukan dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan nasional. Konflik tidak diselesaikan tetapi ditekan dengan pendekatan kekuasaan, memang nampaknya dapat diselesaikan, tetapi itu bersifat hanya dipermukaan, tidak sampai pada akar permasalahan. Pokoknya cepat selesai. Akibatnya ketika kekuatan pemerintah lengah atau kendor maka konflik muncul kembali.

4. Paksaan (Coercion)

Paksaan adalah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil maka digunakan paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan ialah pihak yang kuat, pihak yang merasa menang bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah. Cara-cara pemaksaan terhadap pihak yang terdesak pada konflik di Kecamatan Sliyeg seperti penangkapan warga desa oleh pihak keamanan setempat. Meskipun pada akhirnya mereka mau berdamai karena keterpaksaan bukan karena kesadaran, sehingga

menyimpan dendam dan potensi konflik setiap saat akan muncul kembali.

5. Detente

Detente berasal dari bahasa Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Jadi dalam hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan menang. Dalam prakteknya, *detente* sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing, misalnya perang fisik diganti dengan perang saraf. Lama masa istirahat mereka tidak tentu. Jika masing-masing pihak merasa lebih kuat, biasanya mereka tidak melangkah ke meja perundingan melainkan ke medan perang lagi.¹¹⁸

Dente dapat digunakan dalam menangani kasus kerusuhan di Kecamatan Sliyeg, yang sedangkan dalam keadaan tenang atau mengendor. Untuk itu *Detente* harus disertai tindakan-tindakan lain dari berbagai pihak yang mampu mengurangi kecurigaan masing-masing pihak antar desa, misalnya dengan mengadakan pertemuan untuk memperbaiki komunikasi atau membangun informasi yang simetris. Perlu juga dilakukan penyelesaian konflik, walau pasca terjadinya kerusuhan.¹¹⁹

Menurut Chang Williem sudah waktunya untuk meninggalkan metode pendekatan dan metode penyelesaian masalah seperti dianut rezim Orba. Metode pendekatan deduktif dan represif sudah *out of date*. Mendatangkan aparat keamanan dari berbagai daerah hanya mampu meredam akumulasi kejengkelan dan kekecewaan sosial sementara waktu. Yang perlu

¹¹⁸ Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, *Atasi Konflik Etnis*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama bekerja sama dengan Gharba dan UPN, 2001), h. 198-2002.

¹¹⁹ Hendropuspito, D., OC., *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), dalam Agus Surata dan Tuhanaa Taufik Andriyanto, "Atasi Konflik Etnis" *ibid.* h. 198-202.

diterapkan kini adalah metode pendekatan induktif dan demokratis, dan bukan metode mendikte (diktator). Metode dari atas meja dan dari corong mikrofon umumnya bertolak belakang dengan kenyataan yang sedang hidup di lapangan. Suara-suara dari bawah sesungguhnya tidak akan menghilangkan wibawa penguasa. Yang diutamakan di sini adalah kebijaksanaan dan bukan hanya kebijakan.

Metode kontemporer penananganan konflik sosial keagamaan ini, bagaimanapun juga mesti menjunjung tinggi dialog hidup yang menyentuh lapisan masyarakat. Metode ini sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat setempat. Begitu saja mendiktekan solusi atas konflik sosial yang terulang hingga puluhan kali hanya akan menyengsarakan rakyat kecil yang hidup sederhana dan tidak tahu apa-apa. Banyak orang yang tidak berdosa, tua - muda, besar - kecil, harus menderita akibat keadaan sosial yang kian panas dan mengganas.¹²⁰

Agar konflik itu selesai tuntas maka perlu dibentuk akomodasi sebagai berikut:

1. Pencapaian Kompromi (*compromise*)

Tidak ada paksaan (*coercion*) dalam penyelesaian suatu konflik. Kedua pihak duduk bersama atas dasar kesejajaran, tidak ada yang dilemahkan. Adanya rasa saling memerlukan, saling menghargai, saling memenuhi kesepakatan atau adanya komitmen, saling memegang etika, saling percaya dan dapat dipercaya merupakan landasan pokok untuk mencapai kompromi.

2. Pembentukan Mediator

Mengingat kerusuhan di Kecamatan Sliyeg sering terjadi, maka perlu adanya pihak perantara yang dapat dilakukan oleh badan-badan yang terkait dengan kedudukan yang lebih tinggi atau minimal setingkat. Artinya kalau konflik tercakup dalam Kecamatan, maka dapat dilibatkan minimal pihak Kecamatan,

¹²⁰ William Chang, *Korflik Sosial dan Terobosan Baru*. Jakarta: "Kompas Opini". Edisi Senin 29 Maret, 1999.

lebih bagus lagi pihak Kabupaten di libatkan. Untuk menjadi mediator sehingga dapat menyelesaikan dengan damai dan tidak memihak.

3. Mengikis Fanatisme Buta

Fanatisme sering ditengarai sebagai penyebab konflik. Orang fanatic terhadap agama, suku, kelompok, daerah dan sebagainya, dikarenakan ia tidak mampu mengambil jarak atau mengkritisnya dengan berbagai alasan. Mengkritisi agama tidak dilakukan karena mengkritisi diartikan mengurangi keyakinan terhadap agamanya. Pada hal tidak begitu agama bersifat dogmatis. Manusia melaksanakan agamanya sebagai refleksi pemahamannya. Jadi yang perlu dikritisi adalah pemahamannya bukan agamanya.

Nilai pluralitas hendaknya tidak perlu dikerdilkan atas dasar kepentingan-kepentingan kelompok atau pribadi. Mengikis fanatisme harus dipandang sebagai *social capital*. Disamping itu, peluang pertemuan informal perlu diperluas misalnya dengan kegiatan olahraga, seni, organisasi, karang taruna, dan sebagainya untuk menghindari potensi konflik.

4. Mengurangi Kesenjangan Budaya dan Ekonomi

Kesenjangan budaya harus dikurangi. Artinya cara hidup yang sudah mengarah ke materialis perlu diimbangi dengan budaya santun dan agamis. Ini harus dilakukan supaya masyarakat dapat mengontrol diri untuk tidak terlalu menonjolkan sikap hedonismenya kepada masyarakat yang kurang mampu. Juga kesenjangan ekonomi itu harus dikurangi dengan cara membuka kesempatan--kesempatan kerja yang adil dan seimbang.

5. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan perlu ditingkatkan sebagai peningkatan daya pemahaman terhadap segala permasalahan sosial. Pendidikan ini bisa dilakukan secara formal maupun non formal. Dengan adanya peningkatan pendidikan diharapkan sikap saling menghargai mudah ditumbuhkan, akibat meningkatnya daya penalaran. Selain itu mereka menjadi lebih mengedepankan rasionalitas, tidak membabibuta, menghalalkan segala cara, harapan menyelesaikan

persoalan lebih banyak menggunakan cara-cara yang tidak anarki, tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu dapat mencegah terjadinya konflik sedini mungkin. Peningkatan pendidikan juga memunculkan budaya keterbukaan sehingga permasalahan bisa terdeteksi sedini mungkin, sebelum berkembang luas.

6. Pengembangan Budaya Egaliter

Budaya *egaliter* atau kesejajaran perlu ditumbuhkan agar rasa sombong atau merasa lebih tinggi dari pihak lain, yang dapat memancing konflik dapat dihindari. Untuk itu ruang-ruang interaksi perlu dibuka selebar mungkin dengan aktifitas yang berbau kebersamaan. Dengan suasana saling menghargai, saling percaya, saling memegang etika, saling mendidik dan saling membina.

7. Peningkatan Kualitas Aparat

Hal ini perlu dilakukan untuk membentuk aparat yang kuat. Artinya aparat yang paling bertanggungjawab terhadap perlindungan ketertiban umum, mampu bertindak cepat dan tepat. Semuanya dapat terjadi karena aparat punya percaya diri yang kuat sehingga mau dan mampu bergerak cepat. Aparat yang berkualitas mampu bertindak tepat. Kualitas yang memadai mampu melokalisir kejadian. Jadi untuk menyelesaikan kasus konflik yang berbau SARA aparat perlu percaya diri yang kuat, berkualitas, dan kualitasnya memadai.

8. Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan dengan tegas tanpa pandang bulu. Kalau ada tindakan kriminal, maka aparat harus secara cepat, tepat, dan tegas untuk bertindak adil. Namun sayangnya di Indonesia telah terjadi anomali hukum atau penyimpangan hukum sehingga kemampuan aparat penegak hukum jauh dari permasalahan yang dihadapi

Hukum di Indonesia masih bisa diperjual belikan. Lembaga yang berfungsi atau yang berkewajiban menyelesaikan masalah (*problem solver*) malah menjadi bagian permasalahan atau

pembuat masalah (*problem maker*). Akibatnya kinerja penegakan hukum berjalan jauh dari yang diharapkan, sehingga legitimasi terhadap aparat jadi berkurang. Akhirnya timbul main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, lalu berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Saat ini masyarakat Indonesia sangat membutuhkan suri tauladan dari para penegak hukum dibanding penyuluhan kesadaran hukum

9. Optimalisasi Peran Pemimpin Agama

Pemimpin agama bisa menjadi penyulut konflik tetapi bisa juga menjadi pemersatu. Pemimpin agama bisa jadi pemersatu atau peredam konflik kalau diasumsikan bahwa pemimpin agama berpegang bahwa tidak ada agama yang menyerukan konflik dan mereka bisa memberikan contoh sebagai pemersatu.¹²¹ Menurut Sonny Elizaluchu, masyarakat Indonesia terkenal dengan sangat menghargai dan menghormati para pemimpin agamanya. Apalagi tipe kepemimpinan agama di Indonesia adalah sangat karismatik. Pengaruh kiai, pendeta, atau pastur jauh melebihi komando seorang petinggi militer atau penguasa.¹²²

Masyarakat sipil demikian patuh terhadap simbol-simbol keagamaan yang dimilikinya. Inilah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Baru dimanfaatkan setelah terjadi konflik sehingga hasilnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pemimpin agama jauh sebelum terjadi konflik sudah dimanfaatkan dalam upaya membina kerukunan masyarakat antar kelompok desa. Supaya tidak terulang lagi kerusuhan antar desa itu. Maka peran pemimpin agama sedini mungkin dilibatkan untuk menjaga kerukunan warga masyarakat di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

¹²¹ Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, *Atasi Konflik*,... h. 205-213.

¹²² Sonny Elizaluchu, dalam Harian Umum "Jawa Pos". Edisi Pabruari 2001 – Agustus 2001.

BAB IV

REFLEKSI RESOLUSI KONFLIK

A. Analisis Sosiologi Agama

Kesenjangan kemampuan mengatasi tantangan hidup dan kesulitan yang dihadapi antara satu dengan lain kelompok dalam masyarakat, akan menimbulkan perbedaan sikap di antara kelompok tersebut. Di samping itu, ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan fasilitas kehidupan dapat mengancam kelangsungan solidaritas emosional yang bersifat mekanik dalam suatu masyarakat. Perbedaan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya polarisasi dan konflik antar sub kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, apabila sikap sosial adalah fungsi dari kepentingan, maka terjadinya suatu konflik sosial adalah akibat dari perbedaan kemampuan memenuhi kepentingan tersebut.

Dalam tradisi kehidupan sosial di lingkungan umat Islam, hirarki wewenang dan status sosial dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan keislaman seseorang dan kemampuan orang tersebut yang disebut ulama dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengetahuannya kepada umat dan masyarakat.¹²³ Ulama, sebagai elit santri adalah orang yang memiliki status sosial dengan suatu kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat Islam. Ulama, dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan seringkali disebut dengan kyai, khatib, muballigh atau guru ngaji. Mereka memiliki kedudukan khusus di dalam struktur sosial Islam, sebagaimana istilah tersebut sering dipergunakan untuk menyebut ulama dalam fungsinya sebagai penziar agama Islam.

Berbagai keputusan tindakan anggota masyarakat seringkali

¹²³ KH. A. Siddiq, *Refleksi Persoalan Konflik Sosial*. Kompas, edisi 16 November 1987.

diserahkan dan lebih banyak ditentukan oleh ulama sebagai referensi tindakan sosial. Oleh karena itu, sikap dan tindakan umat pengikut sebagai lapisan terbawah struktur sosial Islam adalah fungsi dari sikap dan tindakan ulama, kyai, khatib dan muballigh. Struktur hubungan sosial antara elit santri dengan anggota masyarakat atau dengan umat pengikut muncul dan tumbuh dari proses hubungan berdasarkan pengalaman keagamaan dan emosi keagamaan. Sifat hubungan yang demikian merupakan daya perekat dan pembentuk solidaritas keagamaan sebagai infra struktur tata kehidupan sosial umat. Proses interaksi tersebut secara tradisional terpelihara melalui kegiatan sosialisasi Islam, pengajian dan khutbah-khutbah.

Sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat, secara berangsur dan bertahap mengakibatkan pergeseran fungsi ulama dalam proses sosialisasi Islam. Hal itu ditunjukkan antara lain bahwa pengetahuan tentang Islam dikalangan umat dalam survey, ternyata tidak hanya diperoleh dari gerakan sosialisasi Islam tradisional yang dilakukan oleh para ulama. Semakin kurangnya sosialisasi Islam secara tatap-muka dalam situasi yang intens telah mendorong umat (jama'ah) mencari sumber referensi pengetahuan lainnya seperti melalui media penerbitan, media cetak dan elektronik yang bersifat terbuka dan masal.¹²⁴

Analisis lain mengatakan bahwa fenomena keagamaan merupakan bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan bahwa tingkat kemajuan budaya berbagai bangsa di dunia ini tidak sama. Ada dua tingkat kebudayaan yaitu kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah. Tolok ukur untuk menilai dan membedakan kebudayaan dalam dua kategori itu berupa asumsi yang sudah umum, *pertama*, akumulasi ilmu pengetahuan positif dan teknologis serta hasil pembangunan fisik. *Kedua*, bahwa agama merupakan motor penting dalam usaha

¹²⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sipress, 1992); h.45.

manusia menciptakan tangga-tangga kemajuan.

Agama sebagai motor atau promotor penting bagi pembudayaan manusia dan alam semesta umumnya, atau dengan meminjam kata-kata Peter L. Berger *"Religion is the enterprise by which sacred cosmos established. Put differently, religions in cosmization in sacred mode"*, (Agama adalah usaha manusiawi dengan mana suatu jagat raya ditegakkan. Dengan kata lain, agama adalah upaya menciptakan alam semesta dengan cara yang suci).¹²⁵ Agama mengamankan masyarakat manusia dan menampilkannya di depan mata manusia dalam istilah nilai-nilai, dan mengajak manusia untuk menghargai dan menghormatinya.

Kalau asumsi bahwa agama memainkan peranan dominan dalam menciptakan masyarakat budaya dan melestarikan alam semesta itu benar, maka suatu kewajiban moral dari bangsa-bangsa yang agamanya kurang berfungsi (disfungsional) untuk meninjau kembali ajaran agamanya. Bukan untuk meragukan isi ajaran agama melainkan; *pertama*, untuk mencari pemahaman baru tentang agama dan *kedua*, mengadakan reorganisasi sistem pendidikan agama, baik pada tingkat intern umat beragama, maupun pada tingkat nasional dan internasional.

Berbicara mengenai pembaharuan metodologis pemahaman agama sesungguhnya bukanlah kompetensi sosiologi, apalagi memberikan resep untuk menggunakan metode tertentu. Bertolak dari analisis Max Weber dalam *"An Essay on Sociology of Religion"*, yang kesimpulannya sama dengan pendirian Myrdal dalam *"The Asian Drama"* mengenai soal, mengapa bangsa-bangsa non-Barat lebih mundur di masa modern ini diberikan jawaban bahwa bangsa-bangsa tersebut berada dalam kungkungan agama. Lalu Fachry All menyambung dengan mengutarakan pendapatnya. "Tetapi bila ditelaah lebih lanjut, ditemukan kesimpulan bahwa penyebab kemunduran bangsa-bangsa non-Barat disebabkan oleh

¹²⁵ Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion*, (Penguin Book, 1973), h. 34.

kekeliruan dalam memahami konsep kehadiran agama oleh penganut-penganutnya, di mana agama dipahami secara definitif oleh masyarakat negara-negara non-Arab.¹²⁶

Suatu contoh dari sosialisasi oleh agama yang kurang berhasil adalah sistem pendidikan yang mengurung anak didiknya dalam alam pikiran yang sempit, dalam alam budaya yang tertutup (subkultur) di mana nilai kebudayaan dan kemajuan dilihat dengan mata sebelah yang kabur. Berhasilnya sosialisasi tergantung dari berhasilnya menegakkan keseimbangan antara dunia yang "profan" dan dunia "suci" antara dunia yang telah dibudayakan manusia dan dunia kesadaran yang dirsesepsi oleh nilai-nilai adikodrati. Peter L. Berger masih meyakini bahwa agama telah (dan masih) memainkan peranan yang strategis dalam usaha manusia membangun dunianya. Agama merangkul jangkauan yang paling jauh dari eksternalisasi diri manusia, untuk mencurahkan dirinya dalam realitas sesuai dengan arti yang diberikan olehnya. Agama mengandung arti bahwa pranata manusia diproyeksi ke dalam totalitas "yang ada". Dengan kata lain, agama adalah usaha manusia yang berani untuk menangkap jagat raya sebagai sesuatu yang berarti bagi manusia.¹²⁷

Kondisi sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg, termasuk masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama meskipun masih dalam taraf normatif. Menurut pengamatan peneliti, saat ini ada tiga kelompok sosial keagamaan masyarakat di Kecamatan Sliyeg yaitu kelompok "santri", "priyayi" dan "abangan". Sebagaimana di katakan oleh Clifford Geertz dalam *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Di Pulau Jawa itu ada tiga kelompok masyarakat yaitu: "santri", "priyayi" dan "abangan". Dari sisnilah pemahaman masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi saat ini mengalami perubahan drastis sehingga timbul gesekan-gesekan sosial yang tajam yang dapat mengakibatkan

¹²⁶ Fachry Ali, *Dimensi Agama: Pikiran Penganut ke Arah Netralisasi Perrgertian Agama*, Kompas 11- 8- 1978, h. IV.

¹²⁷ Peter L. Berger, *The Social Reality...*, h. 37.

konflik antar kelompok masyarakat.

Parsons dan pengikutnya telah berhasil membawa pendekatan fungsionalisme struktural ke tingkat perkembangan yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan teori-teori sosiologi sampai saat ini. Mereka menganggap bahwa disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan sosial yang mengakibatkan perubahan kemasyarakatan yang semakin kompleks, adalah akibat dari pengaruh yang datang dari luar. Anggapan semacam itu mengakibatkan kenyataan sebagai berikut.¹²⁸

1. Setiap struktur sosial mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan-perubahan sosial.
2. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra-systemic change*) tidak selalu bersifat adjustive.
3. Suatu sistem sosial, dalam waktu yang panjang dapat mengalami konflik sosial yang bersifat *visious circle*.
4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.¹²⁹

Di sini sosiologi agama dapat menganalisa konflik sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat Muslim di Kecamatan sliyeg Kabupaten Indramayu. Sejauh mana agama dapat dipahami oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dalam masyarakat. Fungsi dan tujuan agama itu dapat bersifat manifes dan laten. Fungsi manifest adalah yang di sadari, bukan yang tidak disengaja oleh manusia. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari, dan karenanya disengaja oleh

¹²⁸ Pierre L. Van den Berghe, "*Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis* ", dalam N.J. Demerath III, *System, Chayrge, and Conflict*, (The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London, 1967), h. 297.

¹²⁹ *Ibid*, h.32.

manusia.

Sebenarnya konflik antarkelompok terjadi di Kecamatan Sliyeg meskipun sudah terjadi atau agar tidak terjadi lagi hal ini dapat di atasi dengan cara:

- a. Kalau konflik itu menyangkut kemajemukan vertikal konflik yang timbul karena tiap-tiap kelompok atau individu yang berdasarkan pekerjaan, profesi dan tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan- alternatif yang bisa dilakukan adalah kemampuan semua pihak yang berkonflik untuk saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain.
- b. Kalau konflik itu menyangkut kemajemukan horisontal - struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan- adalah mengurangi disparitas (perbedaan) di antara dua belah pihak. Kalau hal itu menyangkut kekayaan adalah bagaimana kekayaan itu mampu didistribusikan secara merata. Sedangkan kalau menyangkut kekuasaan adalah adanya prinsip asas proporsionalitas yakni posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan masyarakat sesuai dengan posisi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.
- c. Kalau menyangkut kurangnya saluran katarsis politik adalah bagaimana proses penyaluran aspirasi, komentar, partisipasi dan uneg-uneg masyarakat bisa dilakukan. Sebab, selama ini disinyalir adanya kekuatan besar negara di satu sisi dan ketidakberdayaan masyarakat di sisi lain menyebabkan tersumbatnya saluran katarsis. Ini menyebabkan timbulnya sistem politik yang kaku dengan tidak adanya peluang kemandirian masyarakat. Akibatnya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemerintah akan menyingkir (atau memang disingkirkan) dan mengalah (atau sengaja dikalahkan).

Dengan demikian, untuk menekan kenyataan itu paling tidak

ada tiga alternatif yang bisa diajukan: (1) di ciptakannya (atau adanya) kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara, (2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan (3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

B. Analisis Konflik: Konflik Vertikal dan Konflik Horizontal

Konflik sosial secara teoritis dapat terjadi dalam berbagai tipe dan bentuk, yaitu konflik sosial vertikal dan konflik sosial horisontal. Uraian dari masing-masing konflik itu adalah: a) Konflik sosial vertikal yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara. Konflik vertikal ini boleh dikatakan laten karena benih-benih sudah ada dan terpendam selama Orde Baru berkuasa, tetapi dapat diredam oleh penguasa saat itu dengan menggunakan tangan-tangan militer dan aparat birokrat. Dengan penerapan pendekatan keamanan (intimidasi) penangkapan dan penyalpungan secara sistematis dan brutal seperti kasus Tanjung Priok, kasus penyerangan kantor PDI, kasus Marsinah, kasus Wartawan Udin, dll).

Melalui tindakan itu diharapkan konflik vertikal tidak muncul ke permukaan sehingga ada kesan hubungan antara negara dan rakyat harmonis. Dengan demikian seolah-olah stabilitas politik bisa terjaga dan tidak ada masalah dalam kehidupan bernegara. Penerapan cara ini jelas demi kepentingan rezim berkuasa dan kroninya karena investor asing diharapkan menanamkan modal dan kerjasama dengan para kroni penguasa. Praktek-praktek ini terus menerus dilakukan oleh penguasa Orde Baru selama beberapa tahun tanpa pernah mau tahu dan cenderung mengabaikan bahwa rakyat banyak menderita karena akibat cara-cara itu. Proses marjinalisasi dan pemiskinan terjadi selama cara itu diterapkan. Ini yang menyebabkan konflik vertikal bagaikan

gunung es tidak nampak dipermukaan tetapi telah meluas dan melebar di bawah permukaan.

Tidak mengherankan, begitu rezim Orde Baru porak poranda akibat krisis ekonomi dan politik di pertengahan tahun 1997, konflik vertikal muncul ke permukaan dan cenderung terbuka dan menajam. Gejala ini dapat dicermati dari protes masyarakat terhadap negara yang semakin meluas dan meningkat. Rakyat tidak segan-segan menjarah dan mencederai penegak hukum, menyerang, melempari, menghancurkan dan membakar kantor-kantor pemerintah dan simbol-simbol negara. Pengaruh konflik vertikal seperti di atas sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia, salah satunya di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Konflik di wilayah ini berbentuk konflik antar desa yang berakhir dengan penjarahan, pembakaran, perampokan serta penghancuran rumah-rumah warga yang bertikai.

Intensitas konflik vertikal disinyalir semakin meningkat di Indonesia. Penyebab hal ini dapat dilacak dari beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Luapan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku pemerintah dan aparatnya, terutama pemerintah pusat yang selama Orde Baru berkuasa secara sistematis mengeksploetasi dan mengurus secara tidak bertanggung jawab sumber daya alam daerah-daerah demi kepentingan orang-orang disepitar pusat kekuasaan.
- b. Pemerintah pusat dengan dalih pembangunan acap kali secara semena-mena merampas dan meniadakan hak-hak penduduk lokal di daerah. Sering kali penduduk lokal disingkirkan dengan cara kekerasan.
- c. Menurunnya kepercayaan masyarakat daerah kepada pemerintah karenapemerintah tidak lagi memihak pada kepentingan dan melayani tuntutan masyarakat tetapi secara terus menerus memperdaya masyarakat.
- d. Terbukanya ruang sosial (*social space*) yang selama Orde Baru berkuasa disumbat dengan berbagai cara.

Keterbukaan ini dapat merangsang terjadinya konflik vertikal dan tanpa disadari telah mendorong masyarakat untuk bereuphoria sebagai arena balas dendam atau sekedar melepaskan rasa jengkel pada pejabat pnerintah.

- e. Tidak tertutup kemungkinan konflik vertikal terjadi karena ditunggangi dan dikipas-kipas oleh sekelompok elit politik yang serakah dan haus kekuasaan. Di tengarai beberapa elit yang terpaksa menyingkir atau disingkirkan oleh pnerintahan baru berusaha untuk kembali ke kekuasaan dengan menghasut pengikut atau membayar seseorang untuk melakukan kerusuhan dengan memanfaatkan isu atau masalah konflik vertikal.

Sementara konflik sosial horizontal terjadi karena adanya konflik antar etnis, antar suku, antar golongan (agama), atau antar kelompok masyarakat (antar desa, antar kampung, antar pemuda dan lain-lain). Selama rezim Orde Baru berkuasa beberapa konflik sosial horizontal sering terjadi di beberapa daerah. Ada dugaan konflik itu direkayasa atau dibuat untuk kepentingan rezim, terutama elit politik yang berkuasa dan militer. Di yakini bahwa konflik horizontal dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk memperkuat personil militer untuk pengontrolan di sekitar daerah kejadian dengan dalih menjaga keamanan. Namun, dibalik itu sebenarnya ada kepentingan ekonomi dan politik. Bahkan konflik antar pemeluk agama direkonstruksi untuk kepentingan para penguasa dalam membatasi gerakan elit politik kelompok agama tertentu.

Belakangan ini insiden konflik horizontal cenderung meningkat diwarnai dengan tindak kekerasan, penghancuran harta benda, pembunuhan dan pengusiran bahkan cenderung ke arah pelenyapan etnis (*genozide*). Konflik horizontal dapat dipicu oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Dorongan emosional kesukuan karena ikatan-ikatan dan norma-norma tradisional. Bisa juga konflik horizontal muncul karena dorongan kefanatikan karena ajaran atau

ideologi tertentu. Konflik antarkampung, antar penganut aliran politik tertentu atau antarpendukung partai, tawuran antarpemuda kampung seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, bisa dimasukkan ke dalam tipe konflik ini.

- b. Sentimen antarpemeluk agama. Konflik ini terjadi karena pemahaman makna ajaran agama yang dangkal. Nampaknya selama ini banyak pemeluk agama hanya memahami agama pada tataran ritual simbolik belaka. Makna dan pengertian yang mendalam tentang hakekat ajaran agama kurang dihayati dan diamalkan secara benar. Oleh karena itu bila simbol-simbol agama disinggung, maka pemeluk masing-masing agama akan tersinggung dan secara emosional mudah bereaksi saling menyerang.
- c. Mudah dibakar dan dihasut oleh para dalang kerusuhan, bisa elit politik atau orang-orang yang mengidap jiwa haus kekuasaan. Keadaan ini didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang masih rendah diikuti dengan rendahnya kesadaran sosial. Bisa jadi kemiskinan disertai prustasi sosial membuat sebagian masyarakat gampang dibuai dengan janji dan mudah dihasut.

Perlu disadari bahwa akar persoalan konflik vertikal dan horizontal saling tumpang tindih dan kompleks. Tidak mudah untuk menetapkan akar persoalan konflik sosial. Apalagi benih-benih konflik latent dalam masyarakat sangat mudah dimanfaatkan oleh elit politik atau penguasa ataupun orang-orang untuk mencapai kepuasan dan kepentingan politik serta pribadi. Kompleksitas akar persoalan membuat kesulitan dalam mencari jalan keluar. Menurut Dahrendorf, analisis masyarakat dengan memakai pandangan konflik, bertitik tolak dari kenyataan bahwa anggota masyarakat dapat dikategorikan dua hal, yakni struktur dan perbedaan kepentingan. Pada gilirannya diverensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan. Inilah ketiga pengertian kunci mencakup; (1)

kekuasaan (2) kepentingan dan (3) kelompok konflik.

Kekuasaan. Biasanya sosiologi membuat perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk memenangkan kemauan sendiri, juga kalau kemauan itu bertentangan dengan kemauan orang lain. Sedangkan wewenang (*authority, Herrschaft*) di pakai dalam arti yang lebih terbatas. Kekuasaan yang mempunyai hukum sedangkan wewenang bertindak secara resmi.

Kepentingan. Perbedaan dalam posisi sosial mengakibatkan adanya kepentingan antagonistic di antara mereka. Pihak yang berwenang mempunyai *ruling interest* yang berlainan dari kepentingan pihak yang dikuasai. Hal ini telah dikemukakan oleh Karl Marx, dimana ia menyebutkan dengan istilah "pembagian kerja' sebagai permulaan masyarakat kelas dan kesadaran sesaat (*false consciousness*).

Mengingat kedua macam kepentingan ini bersifat antagonistic dan kontradiktif, maka kita harus menarik kesimpulan bahwa integrasi dan pengakuan sah terhadap pimpinan selalu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan penuh bahaya. Banyak peristiwa dalam sejarah dunia-termasuk di Indonesia membuktikan bahwa struktur sosial yang nampaknya mantap dapat berubah dalam waktu singkat. Menurut Dahrendorf, situasi konflik suatu masyarakat dapat dimengerti dan diuraikan dengan mudah, jika dilihat sebagai konflik mengenai sah tidaknya relasi-relasi wewenang yang sedang berlangsung.¹³⁰

Kelompok Konflik. Dahrendorf membuat distingsi antara kelompok potensial dengan kelompok aktual. Kalau sejumlah orang mempunyai kepentingan bersama -disadari atau tidak namun mereka belum berorganisasi dan bersatu, maka disebut *kelompok konflik potensial*. Ginsberg mengatakan bahwa mereka merupakan

¹³⁰ Ralf dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford University press, 1959). Dalam K.J. Veeger, *realitas Sosial, RefTeksi Filsafat sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala sejarah Sosiologi*, (Jakarta: gramedia, 1993), h. 214-217.

recruiting field for groups (ladang-ladang dari mana kelompok-kelompok dapat dikerahkan). Selama mereka belum mempunyai organisasi, mereka tidak bertemu, tidak saling mengenal, tidak tukar menukar pandangan atau menyusun rencana juang bersama sehingga diantara mereka belum dapat lahir suatu solidaritas dan perasaan bersatu.¹³¹

Sedangkan apabila orang yang berkepentingan dipertemukan ke dalam satu partai, serikat buruh, atau organisasi lain, dan kepentingan mereka menjelma menjadi suatu program konkrit, mereka menjadi *kelompok konflik aktual*. Mereka makin menyadari dimana letak kepentingan mereka, dan struktur kekuasaan manakah dalam masyarakat yang merintangi dan siasat manakah yang disusun dan dilaksanakan. Mereka mempermasalahkan dan menentang status *quo*. Kalau dibandingkan dengan kelompok kepentingan potensial, kelompok kepentingan aktual selalu lebih kecil.

Masih ada catatan sehubungan dengan relasi-relasi antagonis yang menurut teori konflik termasuk hakikat masyarakat atau kesatuan-kesatuannya. Karl Marx dan Max Weber telah mementingkan peranan individu yang bergabung dan berorganisasi atas dasar serba aneka kepentingan. Berbeda dari pendekatan ini, beberapa sosiolog antara lain, Vilfredo Pareto, Mosca, dan Raymond Aron, lebih mementingkan peranan kelompok kecil yang terdapat di tiap-tiap masyarakat dan terdiri sejumlah orang yang menduduki posisi penting dan menguasai rakyat di luar. Mosca menamakan mereka *kelas politik* atau *rulingclass*. Pareto menggunakan istilah *elit*, dan R. Aron memakai kata *minoritas yang berkuasa*, mengandung konotasi yang lebih luasangkanya daripada kata *elit*.

Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah tingkat desa sampai tingkat Kabupaten dalam menanganai konflik sosial keagamaan di Kecamatan Sliyeg atau konflik sosial lainnya adalah

¹³¹ Morris Ginsberg, *Sociology*, (London, 1953), h. 40.

dengan melauai pendidikan, keterampilan kerja, khutbah, ceramah keagamaan, dan lain-lain. Serta upaya tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat dengan semboyan "Cepat, Tepat dan Tegas" (CTT). Dengan upaya-upaya di atas kerusuhan antardesa menjadi reda, meskipun masih diliputi tanda tanya.

C. Analisis Psikologi Agama

Kasus konflik sosial keagamaan yang terjadi di Kecamatan Sliyeg bila dianalisa dengan teori psikologi agama ini, merupakan kasus sosial yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas masyarakat sebagai penganut agama dengan ajaran agama yang dianut. Pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang tidak sesuai itulah yang dapat menimbulkan berbagai macam kasus kerusuhan sosial atau konflik. Konflik bisa terjadi antar individu, antar keluarga, bahkan antar kelompok masyarakat.

Menurut Elizabeth K. Nottingham, masyarakat di bagi menjadi tiga bagian; *pertama* masyarakat terbelakang dan memiliki nilai-nilai sakral, *kedua* masyarakat praindustri yang sedang berkembang dan *ketiga* masyarakat industri sekular. Di Indramayu menurut penulis merupakan termasuk katagori masyarakat tipe pertama yaitu setiap anggota masyarakat menganut agama yang sama. Oleh karena itu, keanggotaan dalam masyarakat dan dalam kelompok keagamaan adalah sama. Agama telah menyusup ke dalam kelompok aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat ekonomi, politik, sosial, budaya, kekeluargaan maupun rekreatif Masyarakat seolah-olah menyatu menyatu dengan agama begitu pula agama menyatu dengan masyarakat. Sulit membedakan mana yang termasuk katagori tindakan agama dan mana yang termasuk katagori tindakan sosial. Inilah yang dikatakan penulis dengan istilah *agama sebagai realitas sosial*.¹³²

Untuk itu perlu dikemukakan hubungan antara agama dengan masyarakat, agar masyarakat mengetahui serta memahami

¹³² Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Societ*, (New York: Random Haouse, 1954). Terjemahan Abdul Muis Naharong, (Jakarta: Rajawali, 1985).

secara menyeluruh nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Menurut Prof Dr. Mukti Ali bahwa peranan agama dalam pembangunan masyarakat adalah:

1. Sebagai Etos Pembangunan

Maksudnya adalah bahwa agama yang menjadi anutan seseorang atau masyarakat jika diyakini dan dihayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dalam sikap. Selanjutnya nilai moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak, sesuai dengan ajaran agamanya. Segala perbuatan yang dilarang agama dijauhinya dan sebaliknya selalu giat dalam menerapkan perintah agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun demi kepentingan orang banyak. Dari tingkah laku dan sikap demikian tercermin suatu pola tingkah laku yang etis. Penerapan agama lebih menjurus perbuatan yang bernilai ahlak yang mulia dan bukan untuk kepentingan lain. Segala perbuatan individu maupun masyarakat selalu berada dalam garis yang serasi dengan peraturan dan aturan agama dan akhirnya akan terbina suatu kebiasaan yang agamis.

2. Sebagai Motivasi

Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong seseorang atau kelompok untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. Pengamalan ajaran agama tercermin dari pribadi yang berpartisipasi dalam peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharap imbalan yang berlebihan. Keyakinan akan balasan Tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan ganjaran batin yang akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat tanpa imbalan material. Balasan dari Tuhan berupa pahala bagi kehidupan hari Akhirat lebih didambakan oleh penganut agama yang taat.¹³³

Melalui motivasi keagamaan seseorang terdorong untuk berkorban baik dalam bentuk materi maupun tenaga atau

¹³³ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 236-237.

pemikiran. Pengorbanan yang seperti ini merupakan aset yang potensial dalam pembangunan.

Perlu pula dikemukakan di sini, beberapa teori mengenai perilaku keagamaan. Menurut Abraham Maslow salah seorang psikologi humanistik yang berusaha memahami segi esoterik (rohani) manusia, menyatakan bahwa kebutuhan manusia memiliki kebutuhan yang bertingkat dari yang paling dasar sampai yang paling puncak. *Pertama*, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar untuk hidup seperti makan, minum, istirahat dan sebagainya. *Kedua*, kebutuhan akan rasa aman yang mendorong orang untuk bebas dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan ini dimanifestasikan antara lain dalam bentuk tempat tinggal yang permanen. *Ketiga*, kebutuhan akan rasa kasih sayang, antar lain, berupa pemenuhan hubungan antar manusia. Manusia membutuhkan saling pengertian dan keintiman dalam pergaulan hidup. *Keempat*, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini dimanifestasikan manusia dalam bentuk aktualisasi diri antara lain dengan berbuat sesuatu yang berguna. Pada tahap ini orang ingin agar buah pikirannya dihargai.

Pengalaman yang transenden digambarkan sebagai kondisi yang sehat super normal (*normal super healthy*) dan sehat super-super (*super-superhealthy*), yang oleh Maslow disebut *peakers*. *Peakers* memiliki pengalaman-pengalaman puncak yang memberikan wawasan jelas tentang mereka dan dunia mereka. Kelompok ini cenderung lebih mistik, puitis, dan saleh.¹³⁴

Ada pula aliran *Behaviorisme* yang dimotori oleh Skinner. Skinner mengatakan bahwa agama memiliki institusi dalam kehidupan masyarakat, agama sebagai isme sosial yang lahir dari adanya faktor penguat. Menurutnya kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga keagamaan, bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan

¹³⁴Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashorisuroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 75.

masyarakat. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah. Manusia hanyalah robot yang bergerak secara mekanis menurut atas pemberian hukuman dan hadiah.¹³⁵

Secara psikologis akumulasi kejadian serta kekurangan-kekurangan yang ada dan terjadi dalam masyarakat dapat mengakibatkan munculnya ketegangan-ketegangan yang dapat mengakibatkan kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi retak dan rusak. Seperti kasus kerusuhan antar desa di Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu.

Ciri-ciri kelompok kecil itu adalah:

- a. Adanya rasa segan terhadap perubahan yang mungkin akan menggeserkan mereka dari posisi pimpinan.
- b. Kepekaan besar terhadap hukum yang mengesahkan wewenang mereka, sehingga setiap perubahan radikal dianggap tidak sah.
- c. Mobilitas sosial yang menyebabkan orang luar menjadi orang dalam dan orang dalam menjadi orang luar.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid'*, h. 74.

¹³⁶ Vilfredo Pareto, *Trattato di Sociologia Generale*, terjemahan Inggris; *The Mind and Society: A Treatise on General Sociology*, (New York: Dover, 4 jilid, 1963).

RAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik antarkelompok masyarakat Muslim di kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertuma. Konflik antar kelompok masyarakat Muslim disebabkan oleh: iklim yang panas, watak dan sifat manusia yang cenderung keras, struktur sosial yang timpang, sikap keberagamaan menyimpang dan adanya prasangka.

Kedua. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik antarkelompok masyarakat Muslim di kecamatan Sliyeg, dengan cara: konsiliasi atau perdamaian, mediasi atau lewat perantara, arbitrase atau melalui jalur hukum, *coercion* atau paksaan dan *detente* atau mengendorkan (melumpuhkan lawan) serta upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan dan politik.

Ketiga. Resolusi konflik antarkelompok masyarakat Muslim di kecamatan Sliyeg dapat dilakukan:

- a. Kalau konflik itu menyangkut kemajemukan vertikal konflik yang timbul karena tiap-tiap kelompok atau individu yang berdasarkan pekerjaan, profesi dan tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan alternatif yang bisa dilakukan adalah kemampuan semua pihak yang berkonflik untuk saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain.
- b. Kalau konflik itu menyangkut kemajemukan horisontal-struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan- adalah mengurangi disparitas (perbedaan) di antara dua belah pihak Kalau hal itu menyangkut kekayaan adalah bagaimana kekayaan itu mampu didistribusikan secara merata. Sedangkan kalau menyangkut kekuasaan adalah

adanya prinsip asas proporsionalitas yakni posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan masyarakat sesuai dengan posisi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.

- c. Kalau menyangkut kurangnya saluran katarsis politik adalah bagaimana proses penyaluran aspirasi, komentar, partisipasi dan uneg-uneg masyarakat bisa dilakukan. Sebab, selama ini disinyalir adanya kekuatan besar negara di satu sisi dan ketidakberdayaan masyarakat di sisi lain menyebabkan tersumbatnya saluran katarsis. Ini menyebabkan timbulnya sistem politik yang kaku dengan tidak adanya peluang kemandirian masyarakat. Akibatnya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemerintah akan menyingkir (atau memang disingkirkan) dan mengalah (atau sengaja dikalahkan).

Dengan demikian, untuk menekan kenyataan itu paling tidak ada tiga alternatif yang bisa diajukan: (1) di ciptakannya (atau adanya) kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara, (2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan (3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

B. Saran-Saran

Konflik antarkeompok masyarakat Muslim di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, gaya hidup yang materialis, pengaruh arus informasi global dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ajaran agama.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di atas, ada beberapa saran untuk mengatasi konflik antarkelompok

masyarakat Muslim kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu dengan cara:

1. Usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan cara membuka peluang usaha atau kerja, mengadakan kursus ketrampilan atau latihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
2. Upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu dan menekan biaya pendidikan agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Serta mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.
3. Upaya dari aparat dan penegak hukum untuk menyadarkan masyarakat akan dampak negatif terjadinya konflik. Juga dituntut untuk bertindak tegas dan adil terhadap para pelaku kerusuhan.
4. Upaya dari pemerintah untuk mengadakan penyuluhan, dan penerangan lewat berbagai media, baik media cetak, media elektronik maupun penyuluhan langsung ke desa-desa.
5. Memaksimalkan peran ulama dan cendekiawan sebagai *agen of social change* atau sebagai tolak ukur perubahan masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah watoniyah*.

Daftar Pustaka

Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sipress, 1992).

Brian Morris, *Anthropological Studies of Religion : An Ifrtroductory Text*, (New York: Cambridge University Press, 1987).

Abdul Aziz, *Kehidupan Beragama dan Kelompok Keagamaan di Kampres Universilas*.

Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sipress, 1992).

Abdullah dan T. Karim, M.R (ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989).

Agama di teorikan apakah ilusi atau realitas merupakan problem dalam pendekatan psikologi. Bisa di baca dalam Sy amsuddin Abdullah „*Agama dan Masyarakat pendekatan Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos, 1997)

Agus Surata dan Johana Taufik Andriyanto, *Atasi Konflik Etnis*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001).

Alex Inkeles, *Ulhal is Sociology: An Introduction on the Discipliar and Profession*, "Foundation of Modern Sociology Series", (New jersey: Prentice Hall. Inc, Englewood Cliffs, 1964).

Ashley Montagu and Floyd Matson, *The Dehumanization of Man*, (New York: McGraw Hill Book Company, 1983).

Auguste Comte lahir di Montpellier pada tanggal 19 januri 1798 dan meninggal di Paris pada tanggal 5 september 1857.

Charles A. Eliwood, *History of Social Philosophy*, (New York: Prentice-Hall, 1938).

Comte's theoretical formulations, as well as the voluminous historical reference adduced to illustrate them, focus on one theory of which he pinned the label "*The Law of Three Stages*", and which asserts that civilizations as a whole, as well as the various provinces of knowledge and belief which make it up, regularly developed through three stages; the theological, the metaphysical and the positive-that is scientific", demikian Stavislav Andraeski menyebutkan dalam *The Assertial Comte*, (New York: Barnes & Noble Books, 1974).

Data ini diambil dari Data Tawuran tahun 1997 sampai dengan Januari tahun 2001 di kecamatan Sliyeg, tertanggal 3 Februari 2001, mengetahui Camat Sliyeg (saat itu) Bapak Drs. Daddy Tarsatiadi.

Dengan batasan tersebut integrasi dalam pengertian ini lebih merupakan gabungan dari akomodasi, kooperasi, dan asimilasi. *Akomodasi* adalah penyesuaian sementara dari perbedaan antara dua kelompok yang saling bermusuhan untuk meredakan konflik. Masing-masing menjaga sikap permusuhannya dan berubah tingkah lakunya untuk tidak meneruskan pertentangannya. *Koperasi* adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, biasanya diiringi dengan pembagian kerja. *Asimilasi* adalah proses dimana dua kelompok atau lebih yang mempunyai pola sikap yang berbeda secara berlahan-lahan membentuk satu pola sikap baru yang bersumber dari sikap masing-masing kelompok. Untuk keperluan penjelasan konseptual analitis, integrasi sosial perlu dibedakan dari institusionalisasi dan segmentasi yang berarti kegiatan sub-unit untuk meluaskan diri dengan tetap tergantung kepada keseluruhan organisasi.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Desa Babadan terletak kurang lebih 3 km dari kota Indramayu, termasuk wilayah Kecamatan Sindang. Dalam berbagai sumber sejarah tradisional tidak pernah disebut-sebut nama desa Babadan di tempat lain, kecuali desa Babadan yang ada di Indramayu. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa desa Babadan yang dimaksud dalam "Purwaka Caruban Nagari" itu adalah desa Babadan yang ada di Indramayu. Di perkiraan masa itu desa Babadan terletak di tepi pantai tidak jauh dari pelabuhan Cimanuk, yang pada tahun 1513 M pernah dikunjungi Tome Pires. Desa Babadan saat itu merupakan salah satu jaringan lalu lintas jalan laut.

Di desa Dermayu telah ditemukan sebuah lumoang terbuat dari batu dengan penumbuk yang juga terbuat dari batu yang masih belum sempurna, sementara dari desa kroya Kecamatan Gabuswetan, ditemukan benda-benda dari dalam tanah, berupa pipisan dari batu, gelang-gelang dari perunggu, manik-manik dan beberapa pahat dari besi yang tidak sempurna pembuatannya, beberapa butir besi segi tiga yang diduga bekas peluru bandring. Penemuan tersebut telah dilaporkan pada Team Peneliti Sejarah Indramayu kepada Dinas Purbakala.

Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashorisuroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).

Muhammad Hatta, Ketua Perencana Sekolah Tinggi Islam (April, 1945) melalui memorendumnya, ia mengatakan: "dalam lingkungan Sekolah Tinggi Islam bisa diselenggarakan didikan agama yang berdasarkan pengetahuan tentang filsafat, sejarah dan sosiologi".

Elizabeth K. Notingham, *Religion and Societ*, (New York: Random Haouse, 1954). Terjemahan Abdul Muis Naharong, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Elizabeth K. Notingham, *Religion and Society*. New York: Random Hause, 1954, terjemahan Abdul Muis Naharong, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1975).

Emile Durkheim lahir di Epinde pada tahun 1858. Ia belajar filsafat pada Universitas Paris Pada tahun 1902 menjadi guru besar di Universitas Sorbone. Karangannya tentang agama; *Les Formes Ele,mentaires de la Vie Religiense, Le Systemre Totenrrore en A.nstralie*. Paris tahun 1912 Di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Joseph Ward Swain menjadi *The Elementary him of the Religious Live*, 1915. Tertera pada halaman 62 terjemahan Inggris itu ada definisi tentang agama yaitu "A religion is a unified system of believe and paractices relative to secred thing that is to say, things set a part forbidden beliefs and parctices with unite one single moral community colled a Chruch, all those who adhere to them".

Emile Durkheim, *The Elementan- Form of Feligiuos Life*, terjemahan ke dalam bahasa Insgris oleh Joseph Ward Swain, (New York: The Free Press, 1965), dalam Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat Pendekaant Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos, 1997).

Fachry Ali, *Dimensi Agama: Pikiran Penganut ke Arah Netralisasi Perrgertian Agama*, Kompas 11- 8- 1978.

Franz Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Gordon W. Allport, *The Nature of Prejudise*, (New York: Doubleday Anchor Books, Garden City, 1958). Dalam

- Munandar Soelaeman MS. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, Edisi Revisi, 1992).
- H.A. Dasuki, *Sejarah Indramayu*, (Indramayu: Percetakan dan Toko Buku Sudiam, Cet ke-3, tahun 1960).
- H.H. Gerth and C. Wright Mills, (Ed), from Max Weber; *Essay in Sociology*, trans and into. By H.H. Gerth and C. Wright Mills, (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1952).
- H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesie*, (Bandung: W. Van Hoeve's Graven Haage, 1949).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998).
- Hasil wawancara dengan Bapak Hartato, jabatan *modin* pada tanggal 15 Juli 2002.
- Hasil wawancara dengan Bapak Keli, (sekretaris desa Sudikampiran) pada tanggal 17 Juli 2002
- Hendropuspito, D., *OC., Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Istilah "micro dan macro" pada mulanya dipergunakan dalam ilmu ekonomi sehingga dikenal antara dua tipe analisis, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro; Maurice Duverger, *An Introduction to the Social Sciences; With Special Reference to Their Methods*.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Joachim Wach, *Sociology of Religion*, (Chicago: The University of Chicago Press. 1944), dalam Syamsuddin Abdullah, *Agama dan pendekatan Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos, 1997).

- Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (California: Wadsworth Publishing Company, 1991). Dalam Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andri Susanto. *Atasi konflik Etnis* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001).
- Kasmiran Wuryo dan Ali Sjaifiillah, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 1982).
- KH. A. Siddiq, *Refleksi Persoalan Konflik Sosial*. *Kompas*, edisi 16 November 1987.
- Konsep dasar totemisme menjadi tema buku Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Joseph Word Swain, New York, the Free Press, 1965.
- Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto Pent., (Jakarta: UI Press, 1995).
- Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*, (Jakarta: Balai Asara Yudhistira dan Saadiyah, 1982).
- Marshana Windhu, "Dimensi Kekerasan, Tinjauan Teoritis", dalam Franz Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae, (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Max Weber, *The Sociology of Religion*, Trans. Ephraim Fischhoff, into by Talcott Parsons, Boston Beacon Press, 1963)
- Max Weber, *The Sociology of Religion*, Terjemahan Ephraim Fischhoff, intro-oleh Talcott Parsons, (Boston: Beacon Press, 1963), h. XXXII. Lihat juga Brian Morris, *Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text*, 1987.
- Meredith Mc Guire, *Religion: The Social Context*, (California: Wadsworth, Inc., 1984).
- Morris Ginsberg, *Sociology*, (London, 1953).

Mursyid Ali, *Studi Kasus Keagamaan dan Kerusuhan Social, Profil Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1999-2000).

Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendekatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989).

P.J. Bouman, *Sosiologi Pengertian-Pengertian dan Masalah-Masalah*, terjemahan Suaito Sujitno, (Yogyakarta: Kanisius, 1974).

Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang hanya bersifat deskriptif atau bersifat menjelajah dan berbeda pula dengan penelitian yang bersifat menguji hipotesis atau teori (*verivikatory*) yang sering juga dikelompokkan sebagai salah satu bentuk dari riset eksplanatoris (*explanatorv reseach*). Lihat Mely G. Tan "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam huntjaraningrat, *Model Penelitian Masyarakat*, edisi ketiga. 1997.

Pernadi Purbacaraka, *Syahbandar in the Aehipelago*, JSAH, Vol. II no. 2, Juli 1961.

Pertimbangan-pertimbangan nilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan dibahas antara lain dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*. Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Daniel Dhakidae, (Jakarta : cv. Rajawali, 1998)

Peter L. Berger, *"Th.e Sacred Canopy "*, terjemahan Hartono, *I,angit Suci Agama Sehagai Realilas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994).

Pierre L. Van den Berghe, *"Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis"*, dalam

Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa barat, *Sejarah Jawa Barat Dari Masa Pra-Sejarah Hingga Masa Penyebaran Agama Islam*, (Bandung: Prasaran Saleh danasasmita, Masa baru, 1975).

Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, *Sejarah Jawa Barat Sekitar Permasalahannya*, (Bandung: Prasaran Anwas Adiwilaga, 1975).

Ralf dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford University press, 1959). Dalam K.J. Veeger, *realitas Sosial, RefTeksi Filsafat rosial atas Hubungan Individu Maayarakat dalam Cakrawala sejarah Sosiologi*, (Jakarta: gramedia, 1993).

Riwayat hidup Joachim Wach dapat di baca dalam karyanya *The Comparative Study of Religions*, (New York: Columbia University Press, 1958), h. xviii-xxii; terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Djam'annuri, (1984).

Robert C. Bogdan & Steven Taylor, *Introducion to kualitatif Reseach Methods* (New Jersey: John Willey and Sons, 1984)

Robert H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama*, tej. Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1992).

Rumusan tersebut berbeda dengan Coser yang mengatakan bahwa dorongan untuk menyerang atau dorongan rasa permusuhan tidaklah cukup untuk menimbulkan Konflik Sosial. Konflik sosial hanya dapat terjadi dalam interaksi antara subyek dan obyek. Rumusan tersebut juga memperlihatkan batasan bahwa yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah konflik antar kelompok (dalam hal ini konflik antara kelompok intern umat Islam). Dengan meminjam istilah Dahrendorf, yang dibahas dalam penelitian ini adaiah, *exogenous conflicts* bukan

endogenous conflict. Lihat Dahrendorf, Ralf, dalam *Toward a Theory of Social Conflict*, (Stanford University Press, 1959).

Sartono Kartodirjo, Marwati Juned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Grafitas, Departemen P & K, 1975).

Sartono Kartodirjo, *Protest Movement in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, second impression, 1978).

Sonny Elizaluchu, dalam Harian Umum "Jawa Pos". Edisi Pabruari 2001 – Agustus 2001.

Sumber informasi ini di ambil di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Kabupaten Indramayu tahun 2001.

Sumber ini di ambil dari *Pikiran Rakyat*, Edisi 29 September, 2001.

Sumber ini diambil dari Data Informasi Potensi Wilavah di Kecamatan Sliyeg Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kantor Camat Sliyeg, tahun 2001.

Sumber kerusakan ini diambil dari Data Tawuran Tahun 1997 sampai dengan Januari Tahun 2001, di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Di sampan itu, diperkuat wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah ini, antara lain: Bapak Sekretaris Kecamatan Sliyeg, Bapak Mukmin (sekretaris desa Sliyeg), Bapak Edi Wahyudi (kepala desa Sliyeg Lor), Bapak Etuyanto (kepala desa Majasih), Bapak Sumitro (sekretaris desa Gadingan), Ibu Sutari (sekretaris desa Tugu Kidul), Bapak Sufyan Tsauri (lebe desa Tugu Lor), Bapak Surip (sekretaris desa Sudimampir), Bapak Keli (sekretaris desa Sudikampiran), dan Bapak Hartato (modin desa Longok). Hasil wawancara dengan tiap-tiap desa, sesuai dengan data yang ada di Kecamatan Sliyeg.

- Thomas F. O'dea, *The Sociology of Religion*, tim penterjemah Yasogama, *Sosiologi Agama Suatu Pengnalan Awal*, (Yogyakarta: Rajawali, 1985).
- Thomas F. O'dea, *The Sociology of Religion*. Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, Inc. tim penterjemah Yayasan Yasogama *Sosiologi Agama: Suatu Pengenal Awal*, (Jakarta: Rajawali dan Yasogama, 1985).
- Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, (Jakarta: Wijaya, terj. H.A. Nawawi Rambe, 1979).
- Vilfredo Pareto, *Trattato di Sociologia Generale*, terjemahan Inggris; *The Mind and Society: A Treatise on General Sociology*, (New York: Dover, 4 jilid, 1963).
- W. Surya Endra, *Kannis Politik Serta Penjelasanya* (Surabaya: StudyGroup, 1979).
- William Chang, *Korflik Sosial dan Terobosan Baru*. Jakarta: "Kompas Opini". Edisi Senin 29 Maret, 1999.
- Yayah Khisbiyah, *Agresi dan Kekerasan: Perspektif Teori Psikologi*, dalam Franz Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Zakiah Daradjat, *Ilma Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Imam Suprayogo dan Tabrani. *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, -001).
- Indonesia Jakarta*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1994).
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- N.J. Demerath III, *System, Chayrge, and Conflict*, (The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London, 1967).
- Terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Malcolm Anderson, (New York: Frederick A. Praeger, Publisher, 1964).

BIODATA PENULIS



Dr. Ismail, M.Ag.

Ia lahir di Desa Sliyeg Indramayu 11 Juni 1972. Jenjang pendidikannya ia mulai dari SDN I Sliyeg dan MTsN di Sliyeg Kabupaten Indramayu. Kemudian, melanjutkan ke kejenjang berikutnya di MAN Babakan Ciwaringin Cirebon (Bacicir), sembari belajar mengaji di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Babakan dari tahun 1988-1991. Jenjang pendidikan S1 (lulus 1998) dan S2 (lulus 2003) ia peroleh di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (yang sekarang UIN Sunan Kalijaga). Alumni S1 Bahasa dan Sastra Arab dan S2 Hubungan Antar Agama ini, dan gelar Doktornya di peroleh di Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang dengan Konsentrasi Peradaban Islam /Islam Melayu Nusantara.

Semenjak kuliah di Yogyakarta, ia juga sambil menimba ilmu pengetahuan agama di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan KH. Attabik Ali dan Pesantren Sunan Pandanaran asuhan Mbah KH. Mufid al-Magfurlah. Kesibukannya sebagai Dosen di UIN Sunan Kalijaga (saat itu), tidak menghalanginya untuk mengabdikan (mengajar) pada kedua pesantren tersebut sampai akhir tahun 2006.

Sejak 2007 sampai sekarang, ia telah menjadi dosen di STAIN/IAIN Bengkulu. Di tengah-tengah kesibukan sebagai tenaga fungsional dosen, ia pernah ditunjuk menjadi Sekretaris Program Studi FPPI tahun 2008-2010, menjadi Ketua Program Studi FPPI tahun 2010-2012 dan kini mendapat amanah menjadi Ketua Jurusan Adab pada

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu periode 2013-2017.

Keterlibatan dalam kegiatan bidang sosial-keagamaan, pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Yogyakarta, Keluarga Santri se-Wilayah III Cirebon (KSC) Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dan Korp Dakwah Mahasiswa (KODAMA) Yogyakarta. Sedangkan kini, ia aktif di organisasi sosial-keagamaan sebagai pengurus Nahdlatul 'Ulama (NU) Kota Bengkulu.

Dalam bidang tulis menulis, ia menuilis karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian, jurnal maupun buku; dalam bentuk penelitian antar lain: *Al-Madhu Fi Si'r al Mutanabbi Dirasah Tahliliyyah Adabiyyah* (1998), *Konflik Sosial-Keagamaan Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat* (2003), *Tradisi Embes Ape: Melacak Agama Asli Masyarakat Lebong* (Ismail dkk, 2010), *Nilai-Nilai Agama Dalam Ritual Mengundang Benih: Analisis Nilai-Nilai Spiritual Kearifan Lokal Masyarakat Lebong* (2010), *Agama-Agama Dalam Kitab al-Milal wa An-Nihal: Analisis Historis Kitab al-Milal wa An-Nihal Karya As-Syahrastani* (2013), *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Aantara Ilmu-Ilmu Agama Dengan Ilmu-Ilmu Umum*, (Ismail dkk, 2014). *Falsafah Wujudiyah Hamzah Fansuri (Analisis Sufistik-Filosofis Pemikiran dan Perkembangannya di Dunia Islam Melayu Nusantara)*, (tahun 2015), *Epistemologi Intelektual Ulama Melayu Nusantara (Upaya Memahami Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman Ulama Melayu Nusantara Abad 17-18 M)*, (tahun 2016).

Dalam bentuk jurnal antara lain; *Pluralitas Kehidupan Beragama: Memahami Konteks Agama-Agama di Indonesia* (Syi'ar, 2009), *Memahami Dimensi Esoteris Pluralitas Kehidupan*

Baragama (Madania, 2009), *Landasan Etis Hubungan Antar Agama di Indonesia* (Nuansa, 2010), *Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Konteks Pluralisme di Indonesia* (Nuansa, 2010), *Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sejarah* (Nuansa, 2013), *Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama* (Syi'ar, 2013), *Pemikiran Syahrastani Tentang Agama-Agama dalam Kitab al-Milal wa An-Nihal* (Manhaj, 2014), *Peradaban Progresif: membaca 'Aql Dialog Maryam Ait Ahmad* (El-Afkar, 2014) dll.

Sementara itu, karya dalam bentuk buku antara lain; *Filsafat Islam: Tokoh dan Pemikirannya* (IPB Press, 2013), *Filsafat Agama* (IPB Press, 2014).